

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 50 TAHUN 2025
RENCANA INDUK PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat arah kebijakan Riset dan Inovasi serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai peningkatan daya saing.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan Pembangunan Daerah yang sejalan dengan visi dan misi Daerah untuk mencapai Pembangunan Daerah yang inovatif, berkelanjutan dan berbasis pengetahuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

1. untuk menciptakan landasan strategis dan operasional yang jelas dalam mendorong kegiatan Riset dan Inovasi guna mendukung pembangunan Daerah;
2. menganalisis gambaran umum dan kondisi Riset di Daerah.
3. menganalisis tema prioritas Riset dan Inovasi Daerah.
4. menganalisis tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah.
5. Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
6. Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
7. Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset di Daerah.

- (2) Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan isu-isu strategi yang berkembang serta kebijakan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi.
- (6) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan dalam rencana aksi Riset Dan Inovasi Di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

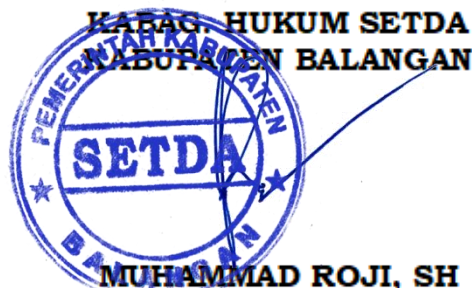
Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

Pi SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di berbagai aspek. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengarahkan proses pembangunan agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Di era otonomi Daerah, pemerintah Daerah merupakan pemegang mandat konstitusi sebagai penyelenggara negara beserta perangkat Daerah yang membantunya. Tujuannya jelas yaitu kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui kebijakan publik yang efektif dan penggunaan anggaran yang efisien. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah Daerah. Itu artinya, persoalan yang terjadi di Daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah Daerah setempat.

Sebagai kabupaten yang relatif muda, Kabupaten Balangan menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah Daerah diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan melalui perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Balangan merupakan Daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi Daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya. Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal.

Di era yang semakin kompetitif dan cepat berubah ini, Riset dan Inovasi memegang peranan krusial dalam mengatasi tantangan tersebut.

Riset yang berbasis kebutuhan Daerah dan Inovasi yang relevan dengan potensi lokal dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, keberadaan Riset dan Inovasi memegang peran yang sangat krusial dalam transformasi dan pembangunan suatu Daerah, menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi secara signifikan. Dengan memfokuskan pada Inovasi, sebuah Daerah dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mendalam, tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga di tingkat regional dan global. Inovasi ini bukan hanya tentang menciptakan produk dan layanan baru, tetapi juga tentang memecahkan tantangan lokal yang unik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui Riset, Daerah dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat infrastruktur pengetahuan dan keterampilan teknis. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ilmuwan dan inovator lokal, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mendesak.

Secara lebih khusus, Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah khususnya di Pasal 26 ayat 1 menekankan pentingnya Daerah memiliki RIPJPID dan mengamatkan bahwa dokumen ini harus tersedia setidaknya enam bulan setelah kepala Daerah definitif terpilih. Penyusunan dokumen ini perlu dilalui dengan proses teknokratik yang baik. Pasal 27 ayat 3 menekankan bahwa di dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA/BAPPERIDA perlu memastikan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dilalui dengan baik. Penyusunan RIPJPID perlu selaras dengan RPJMD dan RPD. Prioritas program Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD perlu menjadi rujukan dalam RIPJPID. Selain itu, RIPJ tidak disusun secara generik, tetapi harus berbasis potensi dan problem di Daerah, yang harus mengangkat ciri khas Daerah. penguatan analisis potensi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan perekonomian Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan telah menjalankan fungsi Riset dan Inovasi untuk menyokong pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan. Kini, fungsi Riset dan Inovasi lebih dikembangkan karena dorongan pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan BRIN agar kebijakan pembangunan berbasis Riset dan Inovasi. Hal ini yang akan menumbuhkan ekosistem Riset dan Inovasi yang lebih kokoh, tentunya dengan perbaikan dan pengembangan yang terus menerus. Pembangunan Kabupaten Balangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan Daerah dan menunjang kemajuan serta kesatuan nasional. Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Balangan merupakan rencana jangka panjang Daerah dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi. Peningkatan investasi dalam Riset dan Inovasi diharapkan dapat membuka peluang baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Balangan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)

1.3. Metode Penyusunan Dokumen

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan membutuhkan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Metode penelitian dalam kajian ini adalah mix method dengan pendekatan Evidence Based Policy (EBP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah. Pendekatan mix method dan Evidence-Based Policy (EBP) dalam penelitian adalah kombinasi yang kuat untuk menghubungkan data empiris dengan kebijakan yang dibuat. EBP adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris yang terbaik. Kebijakan dibuat berdasarkan data dan penelitian ilmiah yang telah terbukti efektif. Dalam konteks penelitian, ini berarti mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mendukung keputusan kebijakan. EBP biasanya menggunakan hasil dari mix method untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, sehingga pembuat kebijakan memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan. EBP adalah Kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta (LAN, 2015).

Penerapan kebijakan berbasis bukti atau Evidence Based Policy (EBP) sendiri merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, melalui pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi. Ini artinya evidence-based policy sudah harus diterapkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan di Indonesia.

Evidence-based policy dapat berperan dalam siklus kebijakan, dalam menentukan agenda kebijakan, isu, berbagai alternatif pilihan, pilihan tindakan, mengeksekusi kebijakan, hingga memantau dampak dan keluaran. Dalam Riset yang dilakukan oleh Overseas Development Institute, penggunaan evidence-based policy secara baik telah membantu menyelamatkan kehidupan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kinerja pembangunan di negara berkembang. Sehingga dapat ditegaskan kembali bahwa dokumen ini disusun berdasarkan evidence based policy yang mengadvokasi pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan dengan lebih rasional, teliti, dan menggunakan pendekatan sistematis.

1.4. Sistematika Dokumen

Penjelasan singkat isi masing-masing BAB dari Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan tujuan sasaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) Kabupaten Balangan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum Daerah seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing Daerah; dan produk unggulan Daerah.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Menjelaskan tentang tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;

- 1) Peluang dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;
- 2) Kondisi kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang diharapkan.
- 3) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan (PUD dan Permasalahan utama Daerah).

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Menjelaskan gap analysis dalam kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi (PUD dan Permasalahan Utama) saat ini dan kondisi yang diharapkan.

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Menjelaskan Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan Strategi pengembangan produk unggulan Daerah dan/ atau penyelesaian permasalahan prioritas/ utama Daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Memuat kesimpulan, saran, dan tindak lanjut akademis dari keseluruhan RIJPD Kabupaten Balangan

BAB II GAMBARAN UMUM, DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari Daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk Masyarakat.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

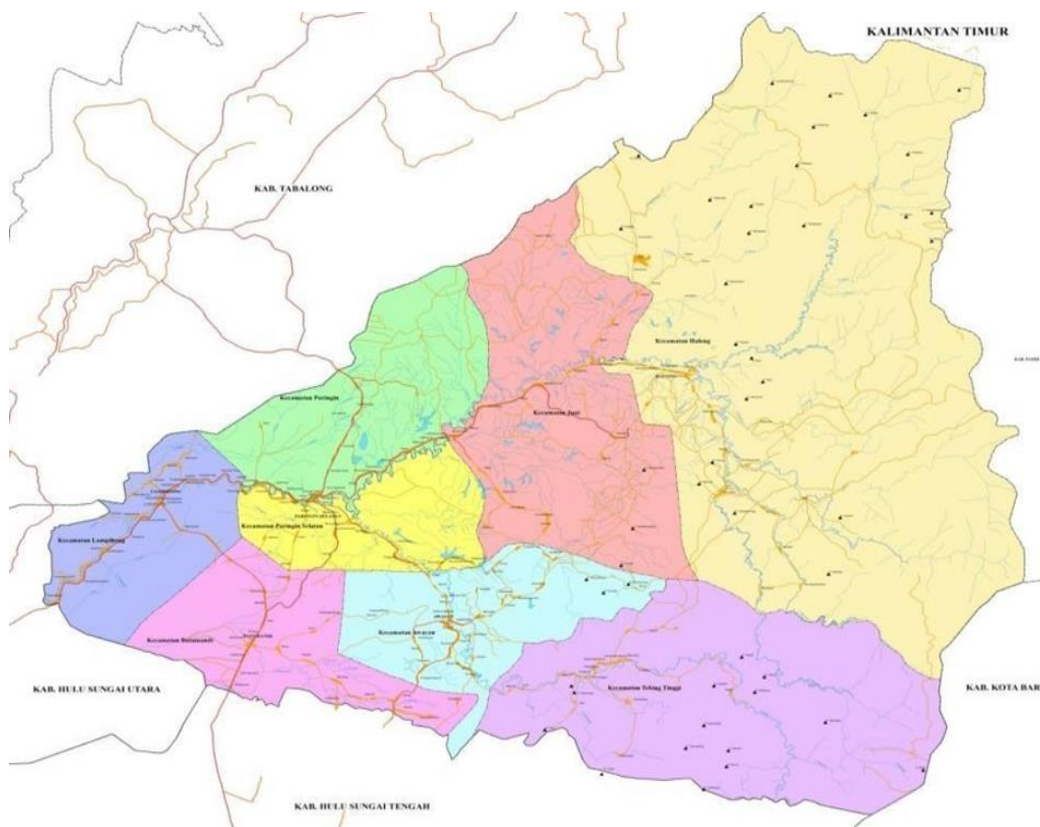
A. Letak, luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Balangan sebagian besar merupakan Daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak 2° 01' 37" sampai dengan 2 ° 35' 58" Lintang Selatan dan 114°50' 24" sampai dengan 115°50' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km² dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Tabalong dan Kabupateb Paser Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Barat	:	Kabuapten Hulu Sungai Utara
Sebelah Timur	:	Kabupaten Kota baru dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006, Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km²), Batumandi (112,25 km²), Awayan (122,73 km²), Tebing Tinggi (285,15 km²), Paringin (138,65 km²), Paringin Selatan (85,48 km²), Juai (230,82 km²), serta Halong (752,91 km²).

Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan).

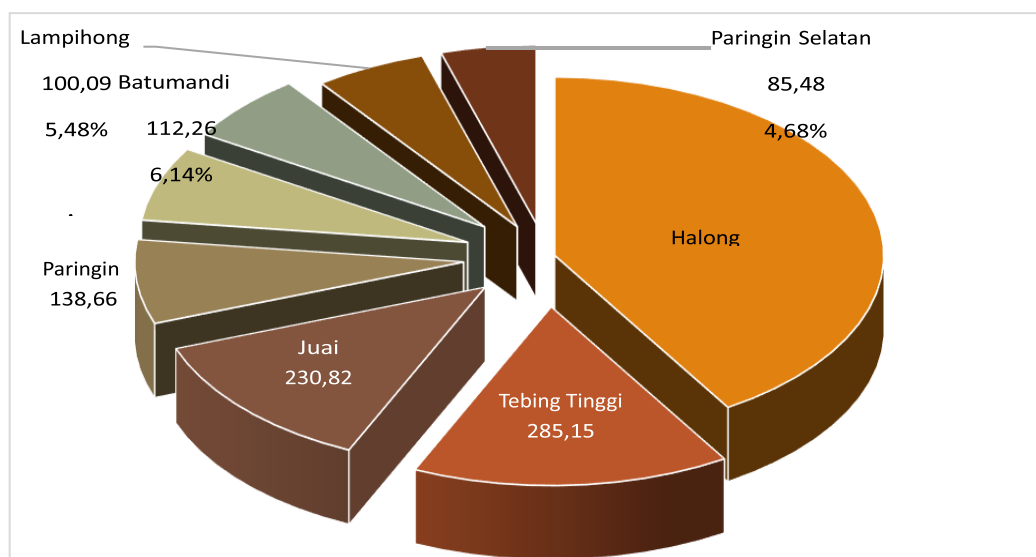


Gambar 2. 1. Batas Administrasi Kabupaten Balangan
 Sumber: RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2014

Tabel 2. 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	20
4	Halong	-	24
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	153

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023



Gambar 2. 2. Luas Kecamatan di Kabupaten Balangan (Km)

Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022

B. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2% yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

C. Geologi

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat

kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64%). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

D. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di Daerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka Daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu: pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada termasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.

Aliran sungai di Kabupaten Balangan mencapai 1.301.015,72 meter dengan pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik memberikan keuntungan karena mendistribusikan air ke semua arah. Sungai terpanjang di Kabupaten Balangan adalah Sungai Balangan dengan panjang mencapai 111.947,98 meter. Aliran sungai-sungai besar dan kecil membentang ke seluruh wilayah dan menjadikan distribusi air permukaan tersebar merata.

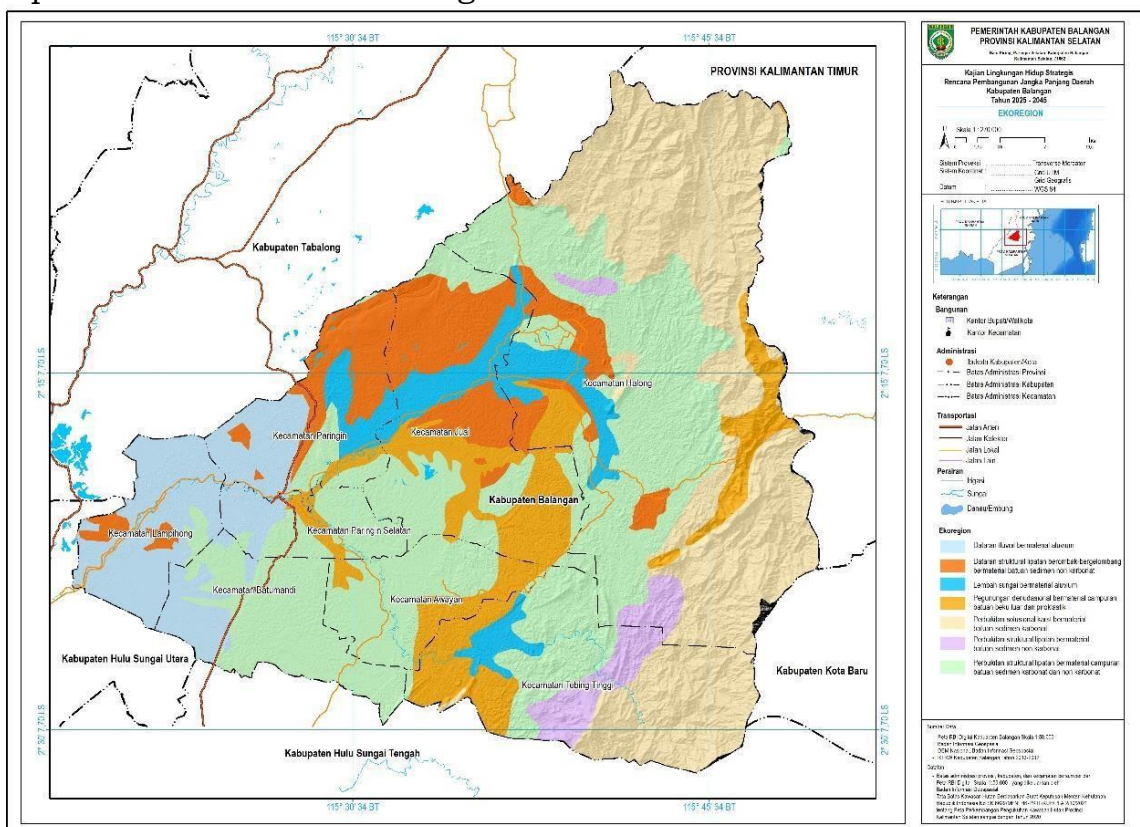
E. Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 13,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai

201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

F. Ekoregion

Ekoregion dikategorikan berdasarkan kesamaan ciri fisik suatu wilayah baik dari aspek iklim, tanah, air, flora, dan fauna. Ekoregion secara geomorfologis dipengaruhi oleh proses asal bentuk lahan yang berlangsung oleh faktor tenaga endogen dan tenaga eksogen. Wilayah Kabupaten Balangan dibentuk oleh tiga proses asal yaitu proses fluvial oleh tenaga aliran air sungai, proses denudasional oleh tenaga angin, dan proses struktural oleh tenaga tektonik.



Gambar 2. 3. Peta Ekoregion Kabupaten Balangan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Ekoregion dataran fluvial bermaterial aluvium meliputi 9,77 persen wilayah Kabupaten Balangan. Dataran fluvial terbentuk oleh tenaga aliran air sungai yang mengikis dan mengendapkan material sepanjang alirannya. Deposisi material aluvium tersusun atas tekstur liat dan berpasir serta cenderung memiliki kesuburan tanah yang baik untuk

pertanian. Sebagai hasil deposisi, bentuk lahan ini berkarakteristik topografi datar dan landai. Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat menyusun 23,37 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini terbentuk dari proses erosi batuan karbonat yang berlangsung sangat lama hingga terbentuk topografi dataran.

Selanjutnya adalah bentuk lahan dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat meliputi 10,17 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini awalnya berasal dari proses lipatan dari tenaga tektonik, kemudian mengalami erosi sehingga terbentuklah dataran berombak-bergelombang. Sisi timur Kabupaten Balangan merupakan rangkaian pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan persentase luas mencapai 10,99 persen. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat merupakan bentuklahan yang meliputi area terluas dengan persentase 40,80 persen wilayah.

G. Komunitas Vegetasi

Komunitas vegetasi tersusun oleh beberapa tipe vegetasi dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan responnya terhadap unsur lanskap. Struktur, komposisi jenis, dan biogeografi vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama karakteristik iklim, tanah, dan topografi. Tipe vegetasi merupakan komponen biotik dalam siklus ekologis dan memiliki peranan khusus bagi lingkungan hidup seperti pengaturan sistem hidrologis, pertukaran unsur hara tanah, dan pengaturan iklim sebagai penyerap karbon (carbon sink). Tipe vegetasi Kabupaten Balangan secara khusus berperan penting dalam penilaian jasa ekosistem, memahami interaksi dan peran vegetasi terhadap ekosistem akan membantu menarik kesimpulan terhadap pemanfaatan sumberdaya dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. 1. Luas Jenis Vegetasi Kabupaten Balangan

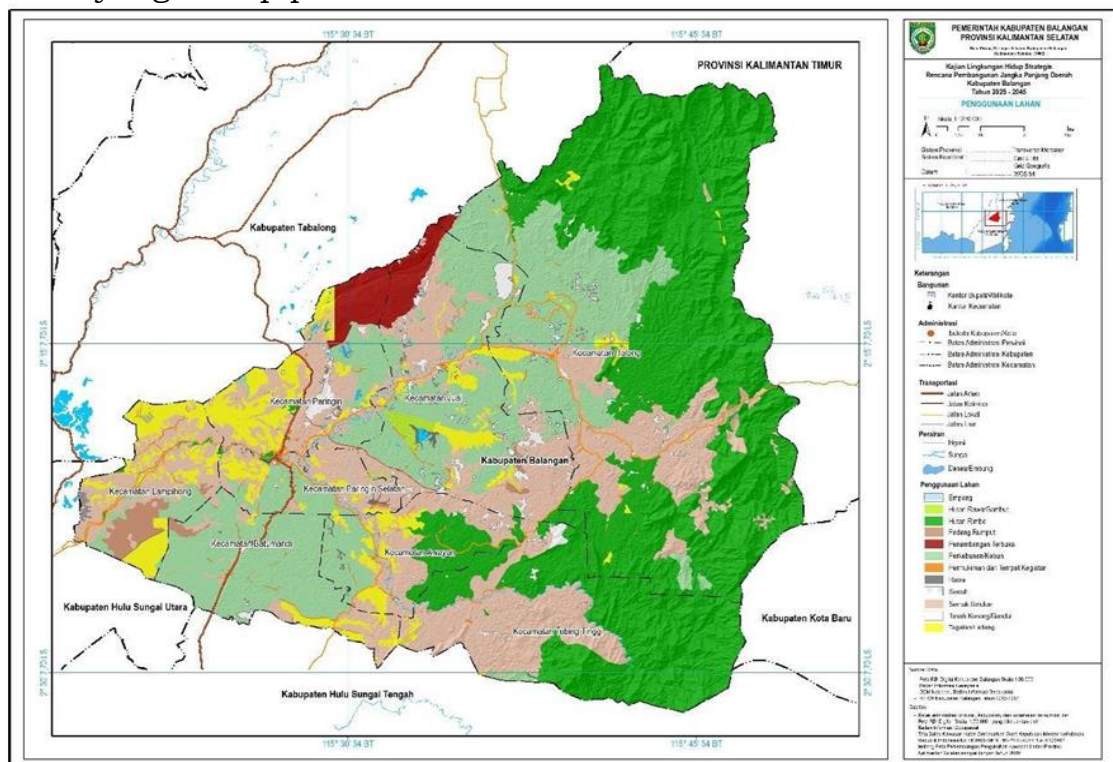
No	Ekoregion	Luas (Ha)	%
1	Vegetasi hutan batuan ultra basa	19.776,31	10,82
2	Vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst	47.313,80	25,88
3	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	74.614,72	40,81
4	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.899,09	4,32
5	Vegetasi hutan pegunungan bawah	5.306,95	2,90
6	Vegetasi terna rawa air payau	10.517,52	5,75
7	Vegetasi terna rawa air tawar	15.643,78	8,56
8	Vegetasi terna rawa gambut	1.777,83	0,97
Kabupaten Balangan		182.850,00	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

H. Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya Kabupaten Balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan dan di sepanjang jalan

berupa perumahan penduduk. Sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.



Gambar 2. 1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tanah sawah, tanah bukan sawah, dan bukan lahan pertanian. Jenis penggunaan lahan tanah bukan sawah melingkupi wilayah yang lebih luas dengan cakupan 51,8 persen luas wilayah, artinya struktur perekonomian masyarakat lebih didominasi pada komoditas perkebunan dan tanaman semusim di ladang. Jenis tutupan lahan terbangun, hutan, dan pertambangan dikategorikan sebagai bukan lahan pertanian yang mencakup 40,46 persen luas wilayah. Hutan lahan kering primer merupakan jenis tutupan yang meliputi 25,6 persen wilayah. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman hanya meliputi 1,58 persen, hal ini menandakan pemanfaatan lahan di Kabupaten Balangan lebih luas diperuntukkan sebagai lahan budidaya non terbangun.

2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung

A. Penyediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukkan bagi konsumsi manusia.

Tabel 2. 2. Penyediaan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Kecamatan	Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Awayan	652,82	4,25	8633,11	10,98		0,00	2802,11	3,97	12088,04	6,61
2	Batumandi	381,26	2,48	11673,83	14,85	533,90	2,93		0,00	12589,00	6,89
3	Halong	3501,47	22,79	20954,27	26,66	508,82	2,79	45614,90	64,58	70579,46	38,60
4	Juai	4375,58	28,84	13715,96	17,45	2861,81	15,69	356,13	0,50	21309,49	11,66
5	Lampihong	270,17	1,76	2889,25	3,68	8219,00	45,05	257,31	0,36	11635,73	6,36
6	Paringin	4092,61	26,64	5044,70	6,42	5074,02	27,81	347,69	0,49	14559,02	7,39
7	Paringin Selatan	940,80	6,12	5900,34	7,51	1045,83	5,73	205,40	0,29	8092,38	4,43
8	Tebingtinggi	1149,75	7,48	9779,43	12,44		0,00	21047,47	29,80	31976,66	17,49
	Balangan	15364,47	100,00	78590,90	100,00	18243,38	100,00	70631,02	100,00	182829,77	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

B. Penyediaan Air

Penyediaan air di Kabupaten Balangan dengan kategori sangat tinggi berada di Kecamatan Halong. Kondisi tersebut sebagai implikasi dari wilayah Halong sebagai Daerah hulu dengan ketinggian Daerah yang tinggi, sehingga pada wilayah tersebut dominasi sebagai wilayah imbuhan air bagi Kabupaten Balangan. Berikut disajikan distribusi luasan jasa penyediaan air di Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Tabel 2. 1. Penyediaan Air Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Awayan		0,00	1685,00	5,63	7545,48	9,19
2	Batumandi		0,00	414,63	1,38	12164,14	14,81
3	Halong	55,35	100,00	7275,90	24,30	17633,44	21,47
4	Juai		0,00	6835,14	22,83	14092,26	17,16
5	Lampihong		0,00	1763,90	5,89	9752,73	11,87
6	Paringin		0,00	4395,82	14,68	9823,65	11,96
7	Paringin Selatan		0,00	1307,44	4,37	6456,30	7,86
8	Tebingtinggi		0,00	6264,50	20,92	4667,79	
	Balangan	55,35	100,00	29942,33	100,00	82135,79	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan

Daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan gambar 2.4 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjaga bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

- 1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman hortikultura lainnya.
- 2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah Karet dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
- 3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan.

Tabel 2. 1. Daya Dukung Pangan Kabupaten Balangan

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Padi (Kg) (Tpij)	Kebutuhan Penduduk (Piji)	Daya Dukung Pangan	Keterangan
1	Lampihong	396524,8738	18861	377663,8738	Belum Terlampaui
2	Batumandi	173828,4066	19448	154380,4066	Belum Terlampaui
3	Awayan	114434,0303	14169	100265,0303	Belum Terlampaui
4	Tebingtinggi	66012,97765	7338	58674,97765	Belum Terlampaui
5	Paringin	59279,01947	20354	38925,01947	Belum Terlampaui
6	Paringin Selatan	41975,48666	16429	25546,48666	Belum Terlampaui
7	Juai	136423,9366	17063	119360,9366	Belum Terlampaui
8	Halong	176178,8032	20850	155328,8032	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan pada peta daya dukung dan daya dukung pangan lingkungan hidup berbasis jasa penyedia pangan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan swasembada pangan. Pendekatan swasembada pangan berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan penduduk dan berbanding lurus dengan luasan lahan pertanian dan panen. Secara operasional, proses penyusunan status daya dukung pangan dilakukan dengan proses pengolahan spasial yang berdasarkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilengkapi

juga dengan data tabular yang berupa jumlah penduduk, produksi padi, pola konsumsi dalam rumah tangga. Dalam kajian, bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan beras.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu Daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%).

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah sektor industri atau kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan kunjungan seseorang ke suatu tempat atau Daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, pendidikan, atau alasan lainnya. Tujuan utama dari pariwisata adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu Daerah. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan Daerah, mempromosikan warisan budaya dan alam, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Pengelolaan pariwisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan alam, melestarikan warisan budaya, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan kebijakan yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata.

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga telah berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan tujuan wisata, memfasilitasi reservasi dan pembayaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 3. Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tumate	Desa Aniungan Kecamatan Halong

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
3.	Air Terjun Pemandian Anggang	Desa Uren Kecamatan Halong
4.	Air Terjun Buntar Sawang	Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.	Air Terjun Tanjung Jamalu	Desa Marajai Kecamatan Halong
6.	Gunung Batu Kiras	Desa Kapul Kecamatan Halong
7.	Wisata Goa Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
8.	Telaga Pemujaan	Desa Kapul Kecamatan Halong
9.	Watu Braii	Desa Kapul Kecamatan Halong
10.	Puncak Baringin Wanai	Desa Hauwai Kecamatan Halong
11.	Pisang Tulis Belibing	Desa Puyun Kecamatan Halong
12.	Air Panas	Desa Hauwai Kecamatan Halong
13.	Gua Berangin Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
14.	Batu Begantung	Desa Liyu Kecamatan Halong
15.	Banyu Babau	Desa Liyu Kecamatan Halong
16.	Air Panas	Desa Liyu Kecamatan Halong
17.	Air Terjun Sidandu	Desa Liyu Kecamatan Halong
18.	Wisata Goa	Desa Puyun Kecamatan Halong
19.	Puncak Gunung Hauk	Desa Marajai Kecamatan Halong
20.	Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
21.	Kampung Anggrek	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
22.	Air Terjun Batu Bainggi	Desa Liyu Kecamatan Halong
23.	Danau Baruh Bahinu	Desa Dayak Pitap Desa Binjai Kecamatan Parsel
24.	Gunung Batu Sungsum	Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing Tinggi
25.	Air Terjun Batarius	Tinggi
26.	Puncak Belawanai	Desa Mamigang, Halong
27.	Gunung Hantanung	Desa Ajung, Tebing Tinggi
28.	Sungai Maranting	Tebing Tinggi
29.	Air Terjun Desa Liyu	Desa Sungsum, Tebing Tinggi
30.	Danau Tangkup	Desa Liyu, Halong
31.	Marajai	Desa Marajai, Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2. 4. Wisata Agro dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Buper Eks Tambang Batubara	Kecamatan Paringin
2.	Tugu Perjuangan Rakyat Paringin	Kecamatan Paringin
3.	Hutan Kota Balangan	Kecamatan Paringin
4.	Taman Hijau Balangan	Kecamatan Paringin Selatan
5.	Danau Tampang	Desa Tampang, Kec. Lampihong
6.	Waterpark Ar-Raudah	Kelurahan Paringin Kota, Paringin
7.	Danau Tangkup	Desa Lok Haur Lampihong
8.	Al Fatah Stabel	Batumandi

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2. 5. Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Benteng Tundakan	Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.	Aruh Adat Dayak Meratus Halong	Desa Kapul, Kec. Halong
3.	Aruh Adat Dayak Pitap	Desa Dayak Pitap, Kec. T.Tinggi
4.	Aruh Adat Dayak Deah	Desa Liyu, Kec. Halong
5.	Rumah Bubungan Tinggi Tarangan	Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
6.	Pahajatan	Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
7.	Rang Pitu (Sumur Magis)	Desa Liyu, Kec. Halong
8.	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	Desa Kapul Kecamatan Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2. 6. Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Makam Datu Kandang Haji	Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.	Makam Datu Martika	Desa Tampang Kec. Lampihong
3.	Mesjid Syuhada Kyai Martasura	Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.	Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre)	Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.	Makam Datu Amir Husin	Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.	Mesjid Jannatul Ma'wa	Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.	Mesjid Bangkal	Desa Bangkal, Kec. Halong
8.	Kubah Makam K.H. Tarmiji	Desa Nungka Kecamatan Awayan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2. 7. Objek Wisata yang Mendapatkan SK Pokdarwis

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Karang Bintang	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua gunung batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan Bontar Batarius	Desa Kapul, Kecamatan Halong Desa Mamigang, Kec. Halong

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022

D. Pengembangan Kawasan yang Mendukung IKN

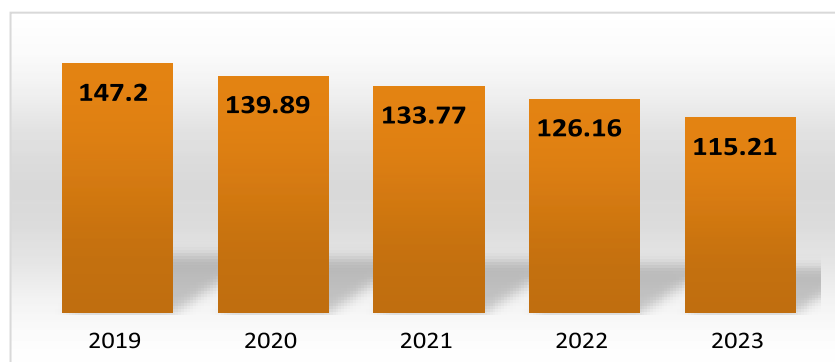
Kabupaten Balangan merupakan Daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi Daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya.

Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Indikator Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap Daerah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya pengelolaan risiko bencana di Balangan. Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2023 mencapai 115,21 dengan kriteria Sedang. Capaian

ini lebih rendah dari nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 129,44 dengan kriteria Sedang.



Gambar 2. 4. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Balangan
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan.

Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018.

Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (*mass movement*) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

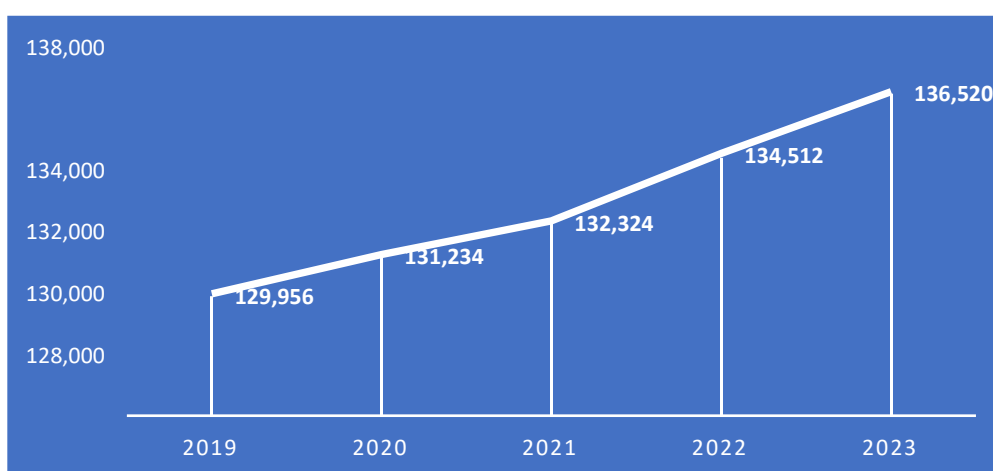
2.1.5. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai pada Tahun 2023 sejumlah 136.520 penduduk dengan kondisi keseluruhan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 trennya selalu meningkat. Kondisi demografis juga dapat mempengaruhi rasio kepadatan penduduk yang menandakan bertumbuhnya suatu Daerah. Luas wilayah Kabupaten Balangan sebesar 1.878,3 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Balangan 75 jiwa/km². Wilayah yang paling padat berada di Kecamatan Paringin seluas 100,04 km² dan dihuni sebanyak 20.050 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Lampihong yaitu dengan luas wilayah 96,96 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 19.520 jiwa. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 2. 5. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 (jiwa)

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk pertahun mengalami



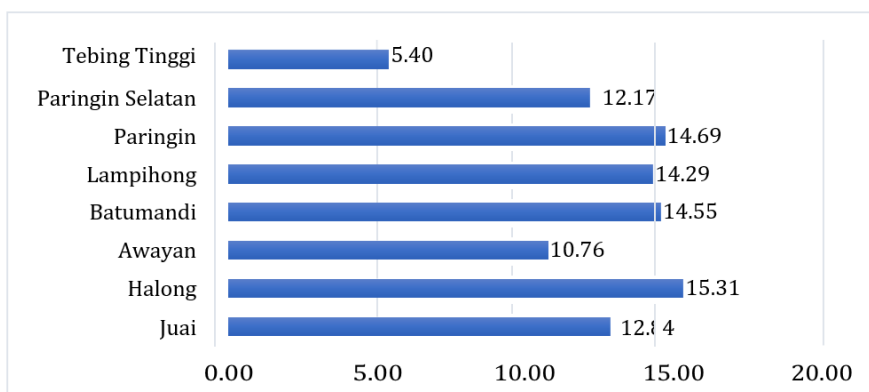
penambahan pada kisaran 1.000 hingga 2.000 penduduk. Hal ini juga didukung dengan persentase penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Halong sebagai kecamatan yang memiliki wilayah terluas, setelah itu disusul dengan Kecamatan Paringin yang berada di wilayah perkotaan atau pusat aktifitas masyarakat Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong memiliki luas 31,60 km², diikuti dengan persentase jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Halong sebesar 15,31% penduduk.

Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	66.325	65.905	66.821	67.958	69.150
Perempuan	65.103	64.450	65.392	66.554	67.380
Jumlah	131.428	130.355	132.213	134.512	136.520

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

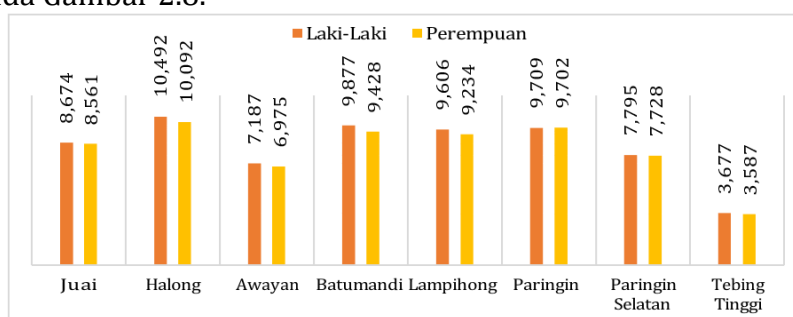
Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.7.



Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2023 (jiwa)

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.8.

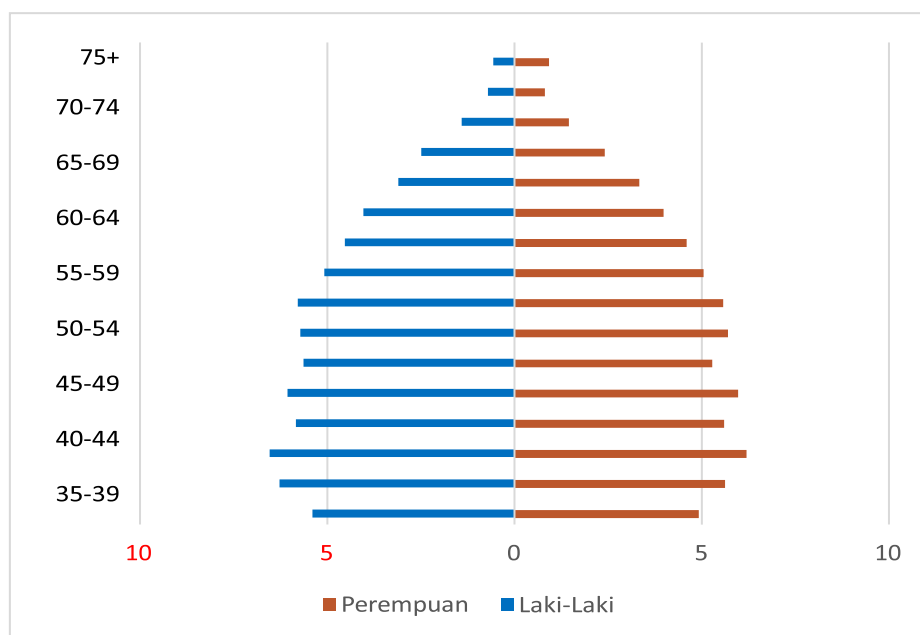


Gambar 2. 7. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (jiwa)

Sumber: Buku Profil Kependudukan Kabupaten Balangan, 2022

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan jumlah komposisi usia dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Balangan sendiri memiliki piramida penduduk tipe ekspansif, tipe piramida ekspansif bisa ditemukan pada wilayah yang masuk dalam kategori berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan bonus demografi. Pemerintah Daerah juga harus memiliki perencanaan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan

saran pendidikan, dan peningkatan sarana kesehatan untuk memenuhi kesiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing.



Gambar 2. 8. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan kelompok umur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan lebih besarnya jumlah penduduk produktif dibanding penduduk belum dan tidak produktif. Lebih rinci perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 9. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023

Usia	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	13.110	12.300	12.149	12.120	10.310
5-9	13.133	13.115	13.228	13.218	11.890
10-14	12.297	11.100	11.410	11.851	12.740
15-19	10.753	10.990	10.981	11.019	11.440
20-24	10.325	11.488	11.484	11.501	12.030
25-29	10.135	11.300	11.344	11.438	10.910
30-34	9.788	11.397	11.460	11.540	11.420
35-39	9.849	9.755	9.853	9.997	11.360
40-44	9.718	9.064	9.168	9.279	10.130
45-49	8.983	7.854	8.061	8.290	9.130
50-54	7.525	7.191	7.431	7.697	8.010
55-59	5.045	5.765	6.006	6.260	6.430
60-64	3.890	4.219	4.453	4.720	4.900
65-69	2.250	2.450	2.611	2.766	2.860
70-74	1.518	1.271	1.427	1.608	1.520
75+	1.186	1.096	1.147	1.208	1.480
Total	129.505	130.355	132.213	134.512	136.520

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024

Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti di bawah.

Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2019-2023

Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	2019	2020	2021	2022	2023
Bukan Angkatan Kerja	25.924	22.341	23.676	26.929	26.542
Bekerja	65.072	70.928	70.707	68.313	70.395
Pengangguran Terbuka	1.549	1.789	1.768	2.830	1.955

Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Penduduk Kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang Dianut Tahun 2019-2023

Agama	2019	2020	2021	2022	2023
Islam	123.985	124.776	125.054	126.628	129.185
Protestan	877	904	939	954	992
Katolik	272	275	267	270	269
Hindu	1.901	1.854	1.791	1.719	1.742
Budha	4.199	4.230	4.167	4.103	4.175
Lainnya	-	64	106	115	161
Jumlah	131.234	132.103	132.324	133.789	136.520

Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

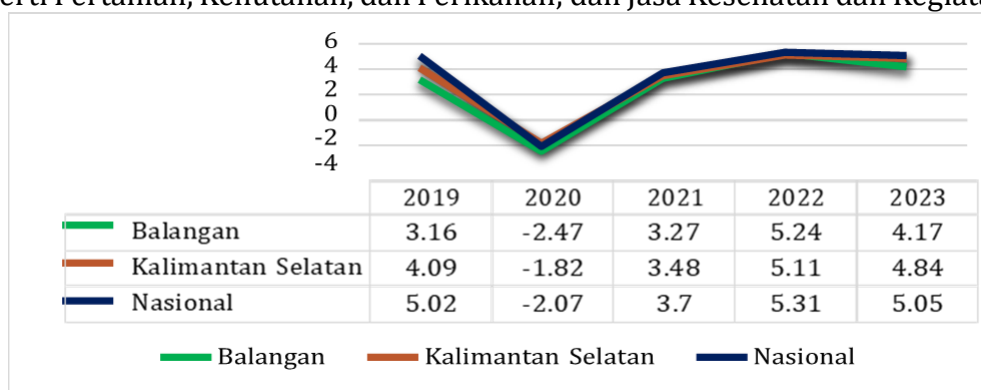
Dari tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Balangan cenderung selalu mengalami percepatan, kecuali saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, tidak hanya sekedar mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Balangan bahkan mengalami penurunan hingga mencapai angka -2,47 persen. Setelah itu, perekonomian Balangan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 dan mampu tumbuh hingga 3,26 persen, hingga pada akhirnya di tahun 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi sekitar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 3,16 persen tahun 2019. Kemudian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami penurunan hingga -2,47 persen. Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi melebihi angka pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, yaitu 3,27 persen di tahun 2021 dan 5,24 persen di tahun 2022 dan 4,17 persen di tahun 2023.

Berfluktuasinya pergerakan pertumbuhan ekonomi di Balangan kurang lebih didominasi oleh pengaruh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang sangat dominan di Balangan, yaitu kategori pertambangan dan penggalian, yakni kategori pertambangan dan penggalian 6,19%, industri pengolahan 4,57%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,35% dan transportasi dan pergudangan 6,08%. Subkategori pertambangan batubara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian Share subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar jelas dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan.

Dari tahun 2019 hingga 2022, kecuali tahun 2020, pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian selalu mengalami percepatan karena produksi batubara yang tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mau tidak mau memicu PDRB ADHK Balangan secara total mengalami percepatan pertumbuhan juga karena share kategori tersebut yang sangat mendominasi perekonomian di Balangan, yaitu selalu lebih dari 50 persen. Dominasi tersebut juga kembali dirasakan dampaknya pada tahun 2021. Kategori pertambangan dan penggalian dengan produk utamanya batubara yang produksi dan permintaannya mengalami peningkatan cukup signifikan mampu membuat kategori tersebut tumbuh mencapai 6,19 persen di tahun 2022 dan pada akhirnya ikut menarik pertumbuhan ekonomi total Balangan

hingga menyentuh angka 5,24 persen. Peningkatan pertumbuhan kategori tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Balangan secara umum karena peranan kategori pertambangan yang mencapai 74,52 persen di tahun 2022. Dimulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022, permintaan global akan komoditas batubara yang merupakan produk dari kategori pertambangan dan penggalian cenderung mengalami peningkatan. Bahkan harga komoditas batubara melonjak tinggi selama tahun 2022. Hal tersebut tentu menjadi pemacu bagi peningkatan produksi batubara yang dihasilkan. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di Daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten

Balangan. Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dipercepat tahun 2022, yaitu sebesar 5,24 persen. Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha di dalam PDRB Balangan tumbuh positif, bahkan hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Akan tetapi, masih terdapat kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.



Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023

Sumber: PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, Namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Sedangkan di tahun 2023 kembali berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 4,17%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,84%, dan Nasional sebesar 5,05%.

Tabel 2. 12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Selatan	4,08	-1,81	3,48	5,11	4,84
Tanah Laut	3,76	-1,99	3,47	5,12	4,78
Kotabaru	4,19	-1,87	3,36	4,58	4,29
Banjar	4,54	-1,96	3,21	4,48	4,35
Barito Kuala	5,06	-1,04	3,17	3,59	3,91
Tapin	4,26	-1,50	3,41	4,91	4,88
Hulu Sungai Selatan	5,32	-1,19	4,18	4,02	5,27

Kabupaten	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hulu Sungai Tengah	4,80	-1,01	3,01	3,93	4.11
Hulu Sungai Utara	5,54	-0,67	3,23	4,09	4.51
Tabalong	3,69	-2,62	3,28	5,30	4.90
Tanah Bumbu	3,64	-1,46	4,23	5,45	4.84
Balangan	3,18	-2,47	3,26	5,24	4.17
Kota Banjarmasin	6,13	-1,91	3,41	5,69	5.62
Kota Banjar Baru	6,93	-1,88	3,32	7,93	6.81

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,81%, di urutan kedua yaitu Kota Banjarmasin dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,62% dan di urutan ketiga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan berada pada uruan ke 11 sebesar 4,17%.

B. Indeks Gini

Data menunjukkan capaian indeks gini di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2020 yang sempat naik akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, indeks gini mencapai 0,310 menurun sampai 0,266 pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, indeks gini Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,277 pada tahun 2021 menjadi 0,266 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan pendapatan masyarakat cukup rendah.

Tabel 2. 13. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

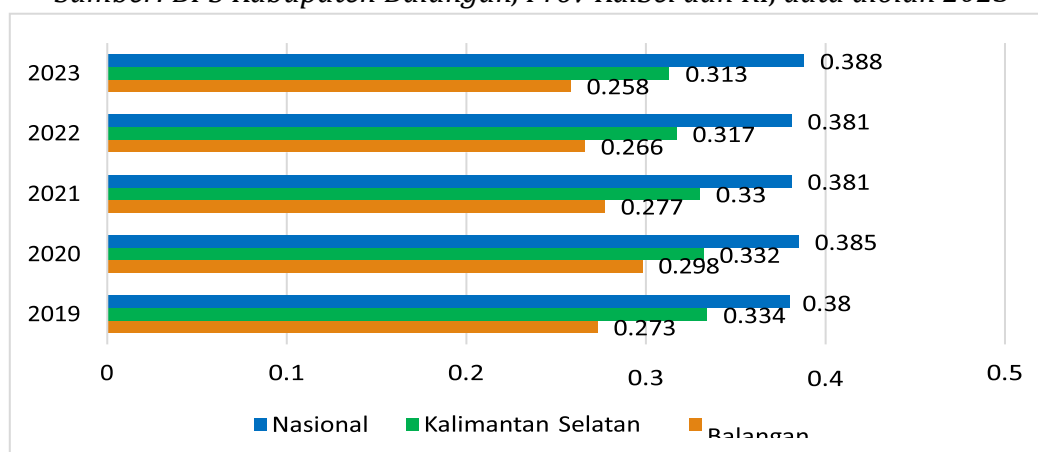
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini	0,273	0,298	0,277	0,266	0,258

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,258%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,13%, dan Nasional sebesar 3,88%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di di Kabupaten Balangan semakin membaik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Gambar 2. 10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov KalSel dan RI, data diolah 2023



C. Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

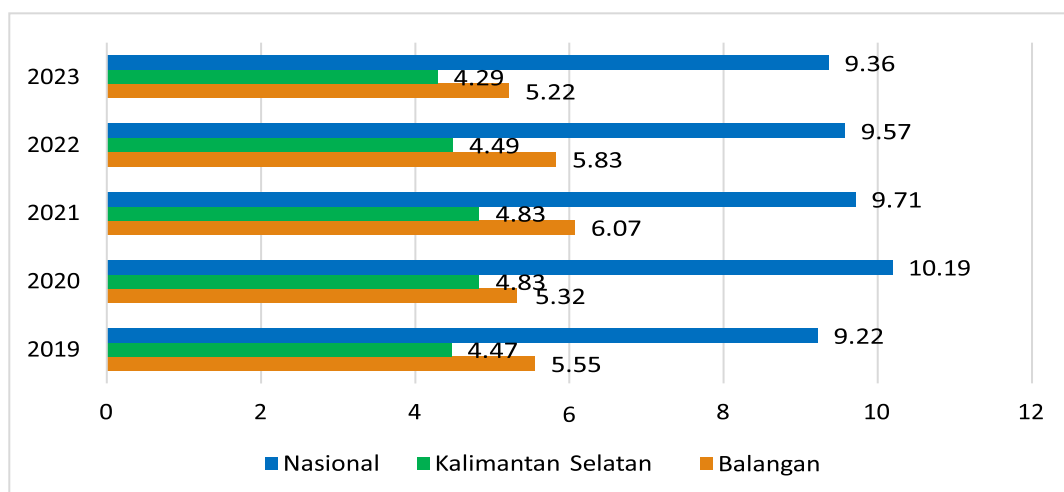
Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif kecuali pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Kabupaten Balangan mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada Tahun 2023 menurun sejumlah 5,22% dari sebelumnya pada tahun 2022 5,83%. Persentase masyarakat miskin pada tahun 2021 meningkat sebagai dampak pandemic COVID-19 yang beriringan juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan cenderung lambat. Garis kemiskinan di Kabupaten Balangan tampak melalui peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 508.157, ke tahun 2023 sebesar 476.190 atau peningkatan sebesar RP. 31.967. Meskipun pada Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih cenderung lambat pada capaian RPJMD yakni hanya 1,16%. Penurunan kemiskinan yang cenderung lamban dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat kecenderungan jumlah kepala keluarga perempuan yang meningkat diakibatkan pengurangan tenaga kerja semasa pandemi COVID-19.

Tabel 2. 14. Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023

Uraian					
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
7214	7266	7064	8062	7825	7.074
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
382.835	396.532	441.488	453.928	476.190	508.157
Persentasi Penduduk Miskin (P0)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,59	5,55	5,32	6,07	5,83	5,22
Tingkat Kedalaman (P1)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,04	0,87	0,88	0,78	0,67	0,554
Tingkat Keparahan (P2)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,25	0,2	0,24	0,19	0,12	0.128

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Selatan, namun selalu berada di bawah Nasional. Pada tahun 2023, penduduk miskin di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 5,22%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,29%, dan Nasional sebesar 9,36%.



Gambar 2. 11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, data diolah 2024

Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana keadaan individu atau kelompok miskin berada dibawah rata-rata garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharuskan menjadi 0 persen diseluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten Balangan sendiri tercatat menurut data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) sejumlah 9.568 keluarga atau 37.998 individu. Jumlah penduduk miskin ekstrem pada data P3KE secara umum dan di Kabupaten Balangan juga ditentukan menurut Desil 1, 2, dan 3. Secara rinci Desil 1 atau kelompok terendah dalam kemiskinan ekstrem, 1.450 keluarga atau 6.859 individu. Data yang keluar dari Kemenko PMK tersebut, masih harus diverifikasi dan divalidasi kembali di tahap desa hingga kabupaten dengan tata aturan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 guna akurasi data dan penerima bantuan social kedepan.

Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi didapatkan sejumlah 4.934 keluarga dengan rincian 807 keluarga desil 1, 1.490 keluarga desil 2, dan 2.640 keluarga desil 3. Pada individu, terdapat 19.134 orang/jiwa yang terdaftar dengan rincian 3.840 desil 1, 6.031 desil 2, dan 9.263 desil 3. Intervensi kebijakan pemerintah Daerah menysasar pada tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan kantong- kantong kemiskinan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan ketiga yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

D. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Meskipun inflasi merugikan, tetapi ada sejumlah pihak yang diuntungkan. Sebut saja eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan, dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, importir atau pembeli, kreditur, masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Tabel 2. 15. Perkembangan Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (per juli)
Kalsel	2,63	4.01	1.68	2.55	6.99	-

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (per juli)
Kotabaru	-	-	1.44	2.68	8.65	0.16
Tanjung	2,60	2.15	2.05	2.43	5.01	-0.06
Banjarmasin	2,63	4.15	1.67	2.54	6.98	-0.01

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2023

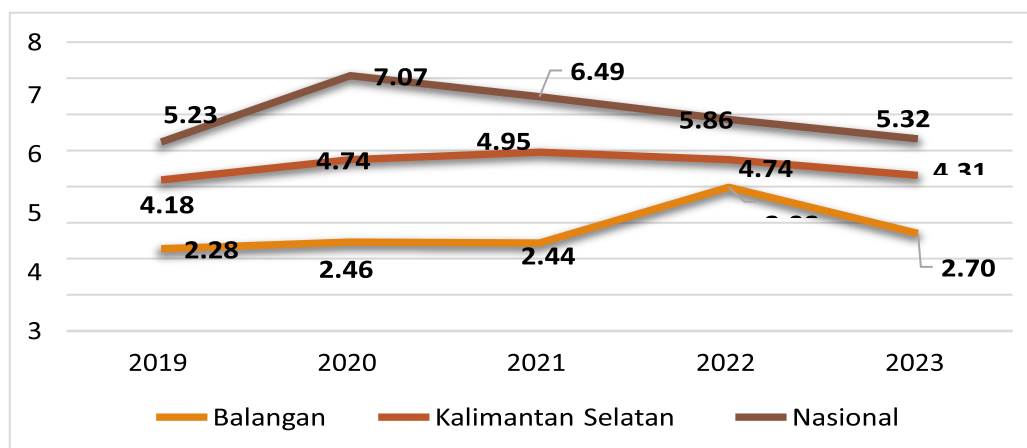
Melihat pada Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Juli tahun 2023 data belum ditemukan. Daerah di Kalimantan Selatan diwakili dan diukur oleh 3 kota yaitu kota Tanjung, Banjarmasin dan Kotabaru. Wilayah Balangan sendiri diwakili oleh kota Tanjung Kabupaten Tabalong per bulan Juli 2023 mengalami deflasi di angka -0,06.

Untuk wilayah Banua Anam yang diwakili Kota Tanjung terjadinya Inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti beras, tarif air minum PAM, bensin, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, emas perhiasan, angkutan antar kota, mie kering instan, telur ayam ras, dan solar. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi diantaranya minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, cabai merah, ikan baung, kacang panjang, daster, dan ikan patin. intervensi dari pemerintah Daerah dan provinsi baik berupa pasar murah hingga subsidi sejumlah bahan pokok menjadi salah satu faktor penurunan angka inflasi.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sebesar 3,98% dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,7%. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan, salah satunya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap produktivitas usaha yang berakibat berkurangnya kesempatan kerja dan peluang kerja.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 TPT di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 2,7%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,31%, dan Nasional sebesar 5,32%.



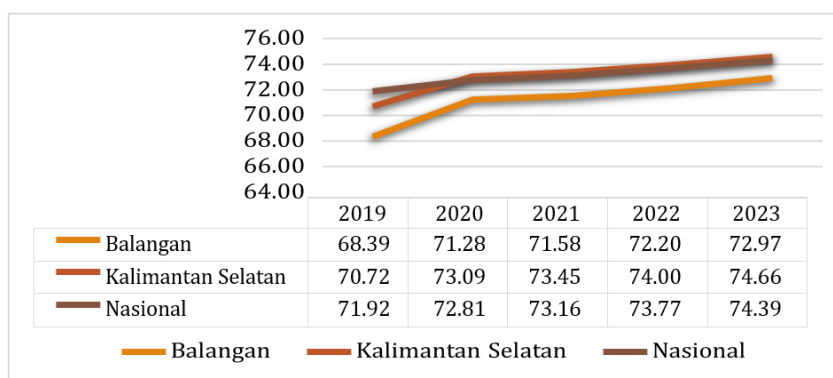
Gambar 2. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan BPS RI, 2024

F. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39% dan terus mengalami peningkatan menjadi 72,97% pada tahun

2023, meskipun memang angkanya masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66%. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM di Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Pada tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan mencapai 72,97%, sementara IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66, dan IPM Nasional sebesar 74,39%.

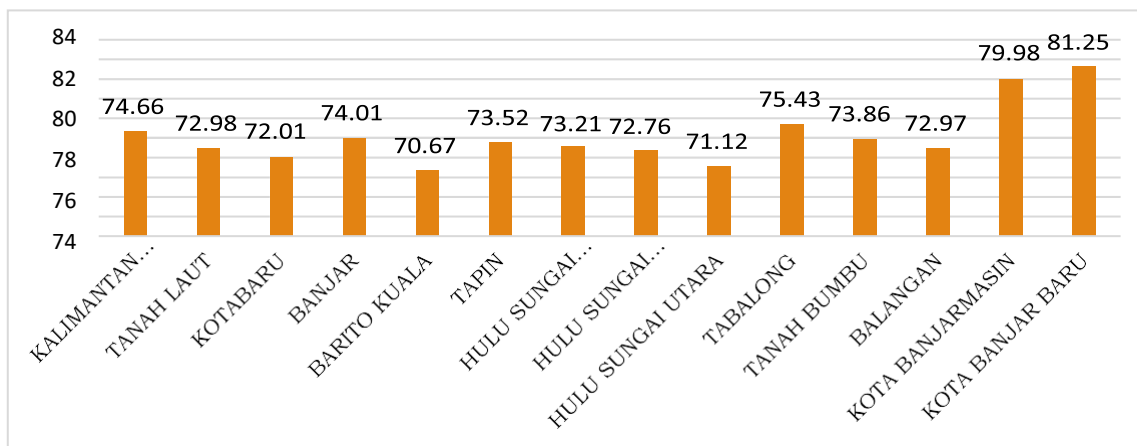


Gambar 2. 12. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, 2024

Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.

Gambar 2. 13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024

Terlihat pada gambar di atas, posisi IPM Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peningkatan indikator penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita disesuaikan.

Tabel 2. 16. Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran/ Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/kapita/thn)
2019	67,59	12,37	7,27	11.557
2020	73,02	12,46	7,55	11.452
2021	73,15	12,47	7,69	11.500
2022	73,42	12,61	7,85	11.659
2023	73,69	12,82	8,03	11.888

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 dan BPS Kabupaten Balangan 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dengan capaian 93,21. Capaian tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki. Lebih lanjut, capaian IPG Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 selalu berada di atas IPG Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2. 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Balangan						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,12	92,22	92,33	93,10	93,21
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,55	70,14	70,57	70,03	73,27
Prov. Kalimantan Selatan						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,61	88,86	88,86	89,44	89,65
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,60	74,48	74,58	74,80	75,97

Sumber: BPS RI, 2023

Partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan. BPS RI mencatat skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Balangan sebesar 73,27 pada tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 70,03. Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka capaian IDG Kabupaten Balangan lebih rendah. Penurunan IDG Kabupaten Balangan dan posisi yang lebih rendah dari IDG provinsi perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga dapat terwujud keadilan dan kesetaraan gender berdasarakan partisipasi politik dan ekonomi.

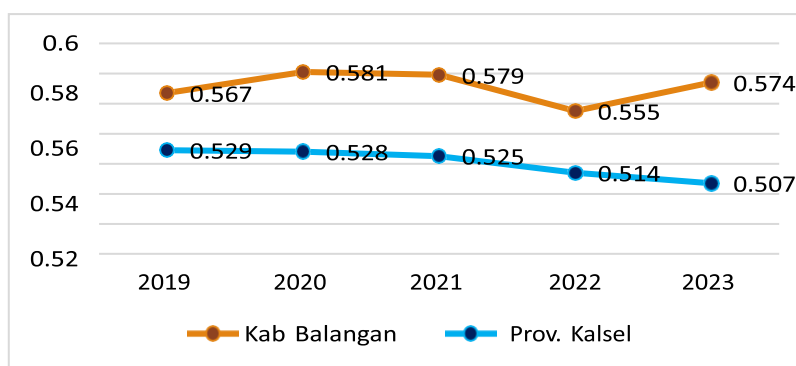
B. Indeks Ketimpangan Gender

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di wilayah dengan pembangunan manusia yang sudah baik, cenderung sudah merata kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir cenderung menurun kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,007 poin. Walau demikian, bila dibandingkan dengan IKG Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada gambar di bawah IKG Balangan selalu lebih tinggi. Capaian IKG provinsi pada tahun 2023 sebesar 0,507 sementara Kabupaten Balangan 0,574. Ini berarti kesetaraan gender di tingkat provinsi lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan.

Gambar 2. 14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS RI, 2024



2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 20.876,19 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.335,8 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19.540,39 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sektor PDRB terutama pada sektor pertambangan yang naik di tahun 2023. Namun jika dilihat PDRB tanpa Batubara pada tahun 2023 sebesar 5.484,96 miliar rupiah, naik sebesar 506,96 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Balangan sudah mulai mengalami pemulihan, setelah mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020.

Tabel 2. 18. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Urusan , Kehutanan, dan	1.326,25	1.311,57	1.406,44	1474,32	1.603,24
B	Pertambangan dan Penggalian	6.680,58	6.317,73	7.581,21	14562,33	15.391,23

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
C	Industri Pengolahan	213,25	212,25	231,37	252,75	262,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,14	4,42	4,68	5,09	5,53
E	Pengadaan Air	28,20	30,15	30,50	31,90	33,96
F	Konstruksi	500,03	501,84	525,05	582,78	643,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	641,00	640,39	671,41	751,05	867,76
H	Transportasi dan Pergudangan	219,82	216,77	221,15	249,09	300,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,45	40,27	41,73	45,07	49,51
J	Informasi dan Komunikasi	149,41	157,48	165,84	178,87	191,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,09	40,66	40,79	44,93	48,59
L	Real Estate	111,12	115,76	121,72	127,58	137,87
M,N	Jasa Perusahaan	8,62	8,68	9,12	10,19	11,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	520,17	551,73	545,47	572,28	627,29
P	Jasa Pendidikan	378,60	396,31	416,00	445,99	474,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,49	110,86	122,26	132,09	144,46
R, S, T, U	Jasa Lainnya	64,45	65,42	66,85	74,07	82,69
PDRB		10.751,68	10.722,30	12.201,61	19.540,39	20.876,19
PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalan		4.071,10	4.404,57	4.620,40	4.978,06	5.484,96

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yakni dari 9.974,65 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 10.390,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Balangan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,17 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah mengalami perbaikan perekonomian sebagai akibat pandemi COVID-19 dan diperkirakan tidak dipengaruhi perubahan harga yang terjadi di tahun 2023 atau tetap mengacu pada harga produk tahun 2010.

Tabel 2. 19. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.010,08	991,90	1.027,02	1030,66	1.071,80
B	Pertambangan dan Penggalan	6.382,36	6.143,65	6.379,57	6774,16	7.019,43
C	Industri Pengolahan	144,75	140,77	146,76	153,47	158,90
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,45	2,55	2,65	2,85	3,09
E	Pengadaan Air	20,05	21,27	21,38	22,03	22,68
F	Konstruksi	340,00	339,68	342,18	356,72	382,85

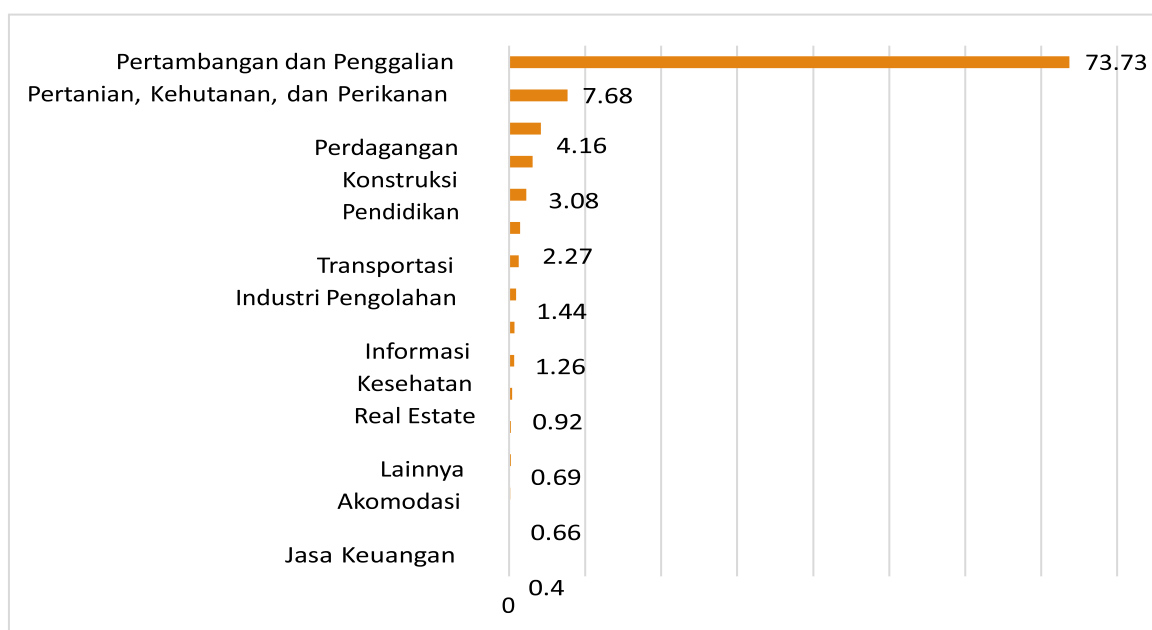
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412,45	407,92	412,95	435,79	464,84
H	Transportasi dan Pergudangan	148,58	145,31	147,55	156,52	166,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,35	27,28	27,64	29,15	31,80
J	Informasi dan Komunikasi	114,59	122,32	128,69	135,69	143,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,78	26,94	25,86	26,27	27,95
L	Real Estate	81,40	83,42	86,25	89,43	94,38
M,N	Jasa Perusahaan	5,42	5,28	5,51	5,91	6,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	328,66	340,48	332,17	341,82	360,56
P	Jasa Pendidikan	255,91	265,57	271,28	286,14	299,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,28	72,28	78,70	83,75	88,88
R, S, T, U	Jasa Lainnya	41,75	41,26	41,69	44,30	47,04
PDRB		9.409,83	9.177,87	9.477,83	9.974,65	10.390,60
PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian		2.900,17	3.027,47	3.034,22	3.200,49	3.371,17

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023*

Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah Daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi Lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2023.

Gambar 2. 15. Distribusi PDRB Balangan Tahun 2023

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023*



Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2019-2023 sebesar 66,15 %. Tahun ini ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2019 sebesar 60,58% naik menjadi 73,73% pada tahun 2023. Hingga tahun 2019 sampai 2023 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Tingginya share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Harga batubara acuan di Januari 2022 sudah mencapai 158,50 USD/ton, yang mana harga tersebut sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat Januari 2021 yang hanya 75,84 USD/ton. Sepanjang tahun 2022 harga batubara acuan cenderung selalu meningkat dan Desember 2022 masih berada di harga 281,48 USD/ton. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2022 menjadi sangat tinggi.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori ini mencapai 4,16%. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 2. 20. Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery	12,03	12.23	11.53	7.54	7,68
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	60.58	59.92	62.13	74.52	73,73
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	1.93	1.98	1.90	1.29	1,26
D	Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas	0.04	0.04	0.04	0.03	0,03
E	Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities	0.26	0.28	0.25	0.16	0,16
F	Konstruksi / Construction	4.53	4.68	4.30	2.98	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles	5.81	5.97	5.50	3.84	4,16
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation And Storage	1.99	2.02	1.81	1.27	1,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities	0.36	0.38	0.34	0.23	0,24
J	Informasi dan Komunikasi / Information And Communication	1.35	1.47	1.36	0.92	0,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial And Insurance Activities	0.35	0.38	0.33	0.23	0,23
L	Real Estate / Real Estate Activities	1.01	1.08	1.00	0.65	0,66
M,N	Jasa Perusahaan / Bussiness Activities	0.08	0.08	0.07	0.05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4.72	5.15	4.47	2.93	3,00
P	Jasa Pendidikan / Education	3.43	3.70	3.54	2.28	2,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities	0.94	1.03	1.04	0.68	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Service Activities	0.58	0.61	0.57	0.38	0,40
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan

dapat kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sampai tahun 2023 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi COVID-19.

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 di angka Rp. 5.449,15 Miliar bahkan pada tahun 2023 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 13.124,55 Miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat signifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan.

Tabel 2. 21. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022**	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.488,04	2.503,01	2.569,69	2 948,93	3.236,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,58	109,74	113,21	121,53	139,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.108,12	1.118,07	1.099,61	1 200,12	1.315,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.464,84	2.451,22	2.516,05	2 809,28	3.088,17
Perubahan Inventori	50,92	1,97	2,66	26,26	(27,30)
Net Ekspor Barang dan Jasa	4.803,16	4.538,29	5.449,15	12 486,79	13.124,55
Produk Domestik Regional Bruto	11.027,66	10.722,30	11.750,38	19.540,39	20.876,19

Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2019–2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total. Sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan nilai tambah dari 10 komponen.

Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintegrasi. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut. Perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Mengingat kategori lapangan usaha pertambangan dengan produk utamanya yaitu batubara merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan, tentunya jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian

global, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi pergerakan perekonomian Balangan.

B. PDRB Per Kapita

Selama kurun tahun 2019–2023, PDRB ADHB per kapita Balangan meningkat dari 84,73 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 153,37 juta rupiah tahun 2023. Tingginya nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Hal tersebut tentunya berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri, salah satunya sebagai bahan energi alternatif. Mengingat peranan sektor pertambangan sangat dominan bagi PDRB Balangan, adanya kenaikan harga dan peningkatan produksi tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 sangat tinggi.

Laju pertumbuhan PDRB ADHB per kapita Balangan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, hingga 2020 terjadi penurunan nominal dan tahun 2021 kembali mengalami percepatan laju pertumbuhan. Apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi harga konstan, PDRB ADHK per kapita Balangan cenderung mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 2,66 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang semakin membaik dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, pada tahun 2020 PDRB ADHK per kapita mengalami penurunan dikarenakan penurunan dari nilai PDRB itu sendiri akibat macetnya berbagai kegiatan ekonomi sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19. Namun, kembali mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebagai dampak dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perbaikan perekonomian. Peningkatan PDRB ADHK per kapita tersebut juga kembali terjadi di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang hampir dua kali lipat daripada pertumbuhan tahun 2021.

Tabel 2. 22. Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2019-2023 (ribu rupiah/kapita/thn)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022**	2023**
PDRB perkapita ADHB (ribu rupiah)	84.738,21	82.550,98	93.645,02	148.028,75	153.371,69
PDRB perkapita ADHK (ribu rupiah)	72.306,56	70.660,42	71.799,05	74.392,70	76.336,93
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHB (persen)	2,07	(2,58)	13,44	58,07	3,61
PDRB perkapita ADHK (persen)	2,66	(2,28)	1,61	3,61	2,61

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2024

C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2019 hingga 2022 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 55,24% pada tahun 2019 dan sampai naik hingga 55,27% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan di angka 54,23 meskipun memang tidak setinggi pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 52,75%. Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 17,43% di tahun 2023, cukup menurun dibanding tahun 2022 di angka 19,18%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding

konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%.. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi, serta gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan yang sudah mulai berubah.

Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi rokok yang juga cenderung naik secara konsisten dari 5,56% pada tahun 2019 hingga 6,42% pada tahun 2021 dan baru mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 di angka 5,69%. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan.

Tabel 2. 23. Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019-2023

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribuan Rp)	547,068	627,078	638,764	675,742	654,043
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)	55,2	55,27	52,88	54,23	52,75
1	Padi-padian	6.34	6,35	5,95	5,56	7,22
2	Umbi-umbian	0.18	0,18	0,27	0,32	0,31
3	Ikan / udang / cumi / kerang	5.66	5,66	5,78	6,28	5,46
4	Daging	1.74	1,74	1,73	2,05	1,8
5	Telur dan Susu	3.2	3,2	2,81	3,35	3,21
6	Sayur-sayuran	2.89	2,89	3,40	3,19	3,14
7	Kacang-kacangan	0.83	0,84	0,83	0,82	0,73
8	Buah-buahan	3.09	3,1	1,65	1,98	2,22
9	Minyak dan Kelapa	1.54	1,54	1,42	1,89	1,51
10	Bahan Minuman	1.95	1,95	1,89	1,79	1,62
11	Bumbu-bumbuan	0.96	0,96	1,10	1,16	1,03
12	Konsumsi Lainnya	1.5	1,5	1,55	1,64	1,39
13	Makanan dan Minuman Jadi	19.8	19,8	18,08	19,18	17,43
14	Rokok	5.56	5,56	6,42	5,02	5,69
Jumlah		55.24	55,27	52,88	54,23	52,75

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

D. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga

Di tahun 2023 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga tertinggi adalah Perumahan dan fasilitas rumah tangga di angka 23,84 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat mulai tahun 2019-2023 konsumsi Perumahan dan fasilitas rumah tangga ada di angka rata-rata 23,204%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi adalah konsumsi aneka barang dan jasa yang angka rata-ratanya 9,290. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan.

Tabel 2. 24. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019-2023

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rata-rata Pengeluaran (Ribuan Rp)	442,870	559,112	569,272	570,370	585.873
B	Distribusi Pengeluaran (%)	44.73	44,73	47,12	45,77	47,25
1	Perumahan & Fasilitas Rumah tangga	22.08	22,08	24,66	23,36	23,84

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Aneka Barang dan Jasa	8.89	8,89	9,84	9,84	8,99
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	3.03	3,03	3,03	3,00	2,77
4	Barang Tahan Lama	5.06	5,06	4,54	3,20	5,74
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3.82	3,82	4,57	4,89	4,96
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1.85	1,85	0,48	1,49	0,95
Jumlah		44.73	44,73	47,12	45,77	47,25

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sebesar 44,73%. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12%, menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%, artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%.

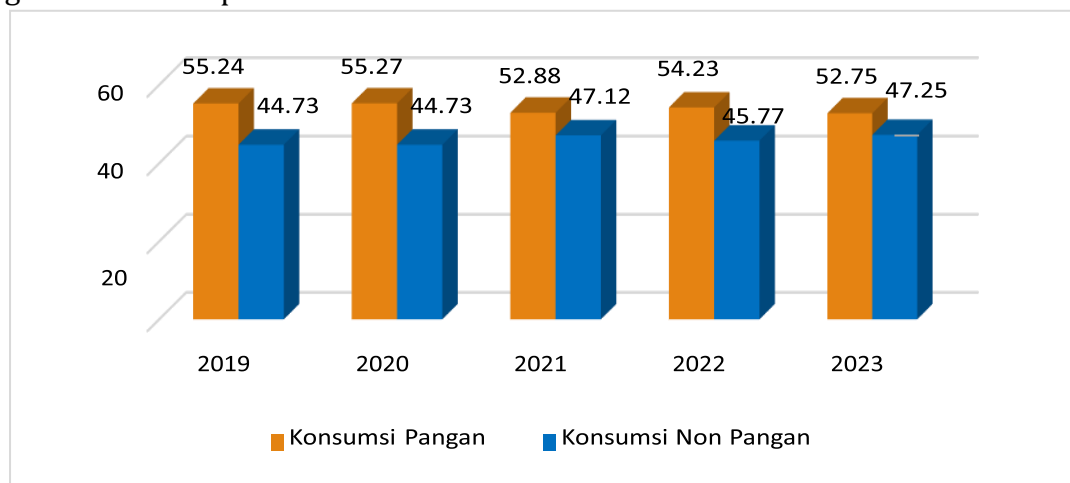
E. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Jika dilihat, pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya secara umum pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 44,73%, kemudian menurun sampai tahun 2020 menjadi 47,12%, Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12% dan menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%.

Gambar 2. 16. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

F. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

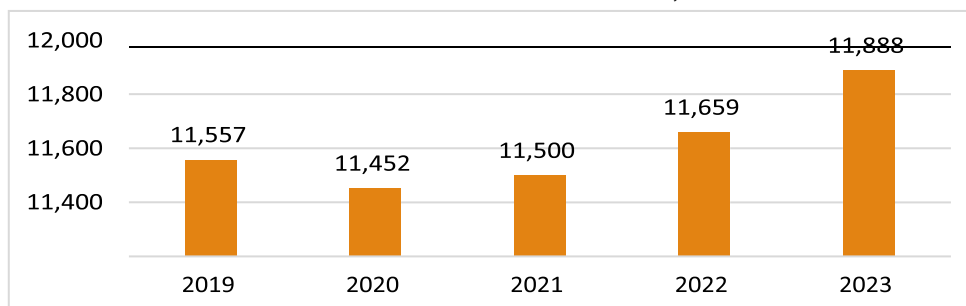


Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pada Tahun 2020 mencapai 11.452.000/orang/tahun sementara tahun 2023 mencapai 11.888.000/orang /tahun.

Gambar 2. 17. Pengeluaran Per kapita disesuaikan di Kabupaten Balangan 2019–2023 (Ribu Rupiah/kapita/thn)

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023



2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil publikasi Perpustakaan Nasional RI, diketahui nilai IPLM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencapai 67,73 dengan kategori Sedang. Capaian IPLM tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,47. Ini berarti IPLM Kabupaten Balangan lebih rendah dibandingkan IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,29 dengan kategori Sedang.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2. 25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,63	76,50	75,38	72,54	73,16

Sumber: BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan 2024

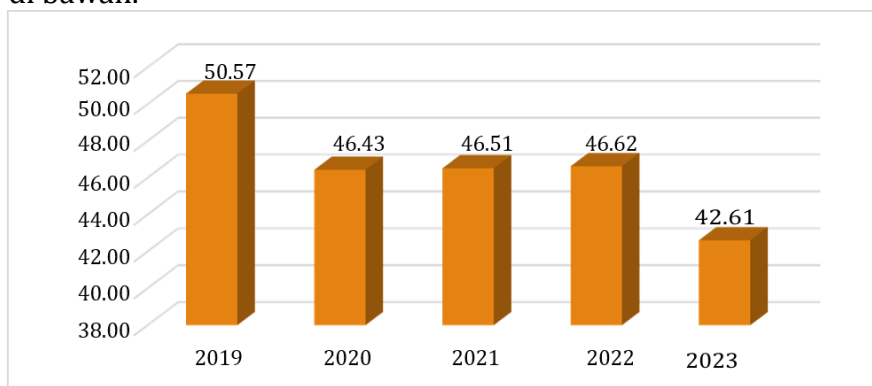
Berdasarkan tabel tersebut, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin berkurang pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Penurunan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya.

Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan telah mengalami peningkatan menjadi 73,16 %. Artinya pada tahun 2023 di antara 100 penduduk usia kerja,

terdapat 73 hingga 74 orang merupakan angkatan kerja. Sisanya, 26,84% bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga.

C. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 memiliki tren menurun yaitu dari 50,57 menjadi 46,43 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 46,51 dan 46,62. Namun di tahun 2023 menurun kembali menjadi 42,61. Rasio ketergantungan 42,61 berarti 1 orang penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan menanggung 4 atau 5 orang tidak produktif. Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 18. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan 2019–2023

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

D. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan, dari 220 indikator dapat dibagi menjadi 4 (empat) pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada tabel di bawah. Pada tabel tersebut dimuat capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Balangan berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 84 indikator, belum mencapai target 42 indikator, tidak ada data sebanyak 91 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.

Tabel 2. 26. Capaian Indikator TPB Kabupaten Balangan

No.	Tujuan	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data	Tidak Ada di Wilayah Kajian	Total
PILAR SOSIAL						
TPB1	Tanpa Kemiskinan	8	6	10	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	6	5	0	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	7	12	0	34
TPB4	Pendidikan Berkualitas	2	7	4	0	13
TPB5	Kesetaraan Gender	9	4	1	0	14
PILAR EKONOMI						
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0	2	0	2
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	3	9	0	19
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	0	3	3	13

No.	Tujuan	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data	Tidak Ada di Wilayah Kajian	Total
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	5	3	3	0	11
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8	1	7	0	16
PILAR LINGKUNGAN						
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	2	13	0	18
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	1	8	0	13
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	1	0	4	0	5
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	0	1	0	2
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan	1	1	2	0	4
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	7	2	12	0	21

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2022

E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dasar sebagai hak warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut dijabarkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan wajib terkait pelayanan dasar di Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Tabel 2. 27. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
I. PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Thn yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	22402	22216	Orang	98,83%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	667	622	Orang	89,33%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang	4587	4517	Orang	95,73%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
		berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				
II. KESEHATAN						
1	Pelayanan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2.167	1.866	Orang	86,22%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.005	1.924	Orang	96,41%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	1.945	1.901	Orang	98,07%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	8.085	8.085	Orang	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	20.134	19.857	Orang	95,63%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	70.538	44.611	Orang	70,36%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	9.321	9.319	Orang	99,98%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	14.292	13.226	Orang	93,85%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	4.033	3.748	Orang	93,88%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	236	236	Orang	97,14%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	2.361	1.350	Orang	61,84%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	3.120	3.120	Orang	100%
III. PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	43.507	38.180	Rumah Tangga	87,76%
			45.540	39.977	Kepala Keluarga	87,78%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	43.507	42.964	Rumah Tangga	98,75%
			45.540	44.972	Kepala Keluarga	98,75%
IV. PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	8	8	Rumah	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	1	1	Lahan	100%
V. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	8.000	8.000	Orang	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7.400	7.400	Orang	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	871	871	Orang	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	7.813	7.813	Orang	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	umlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	112	112	Orang	100%
VI. SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti, dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi di Luar Panti	59	59	Orang	100%
		Jumlah Anak yang Memperoleh Terlantar Di Luar Panti	28	28	Orang	100%
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	30	30	Orang	100%
		Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh	73	73	Orang	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian %
	Pengemis di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti				
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	200	200	Orang	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Balangan Tahun 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Infrastruktur Publik

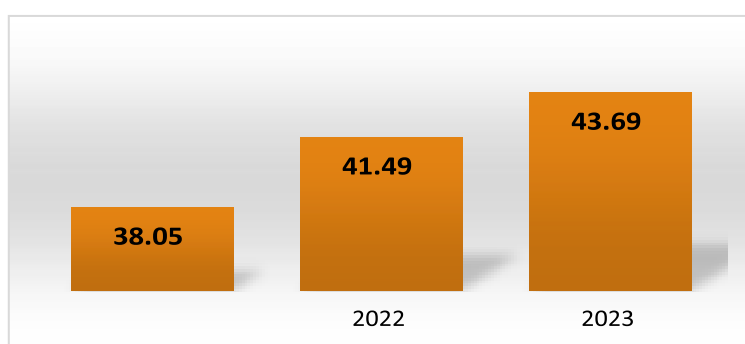
Indeks Infrastruktur Publik merupakan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir untuk mengukur kinerja pelayanan terkait infrastruktur. Indeks Infrastruktur Publik pada tahun 2023 mencapai 43,69. Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,49. Tingkat capaian kinerja indeks infrastruktur publik pada tahun 2023 sebesar 105,07% dari target 41,58 dan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD. Capaian kinerja indeks infrastruktur publik didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah akses jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jembatan dalam kondisi mantap, terbangunnya infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang menjadi kewenangan Daerah, tersedianya jaringan Daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, tersedianya bangunan gedung/publik dalam kondisi baik dan tersedianya luasan RTH.

Gambar 2. 19. Indeks Infrastruktur Publik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023

Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023

B. Indeks Infrastruktur Permukiman

Indeks Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 mencapai 29,87. Angka ini lebih rendah dibandingkan Indeks infrastruktur permukiman pada tahun 2022 yang

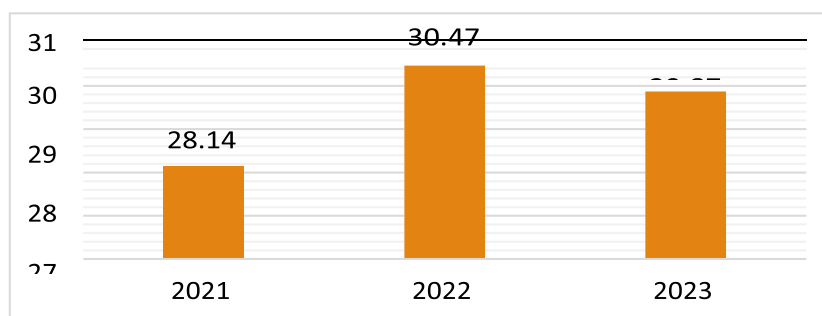


mencapai 30,47. Capaian kinerja indeks infrastruktur permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak, rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik, cakupan ketersediaan rumah layak huni, perumahan yang sudah dilengkapi PSU, luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani. Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 39.977 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 45.540 KK.

Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestik adalah sekitar 98,75%. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 38.423 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 35.425 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 40,40 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 ha.

Gambar 2. 20. Indeks Infrastruktur Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023

Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023



2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing Daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas Daerah. Pada tahun 2022, IDSD Kabupaten Balangan berada pada peringkat ke-8 (delapan) di Provinsi Kalimantan Selatan dari 11 Daerah yang diukur, dengan skor 2,71. Nilai ini masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan skor masing-masing 3,14 dan 3,26. Nilai IDSD Balangan meningkat pada tahun 2023 mencapai 2,74. Walaupun meningkat, namun IDSD Balangan paling rendah dari 11 Daerah yang diukur di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil penilaian BRIN, komponen yang mempengaruhi rendahnya nilai IDSD Balangan yakni pada Pilar 7, Pilar 9, Pilar 11, dan Pilar 12. Pilar 7: pasar produk, menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Pilar 9: Sistem keuangan, terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik. Pilar 11: Dinamisme bisnis, menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Sementara Pilar 12: Kapabilitas Inovasi, memberikan gambaran kuantitas dan kualitas Riset dan Inovasi suatu Daerah.

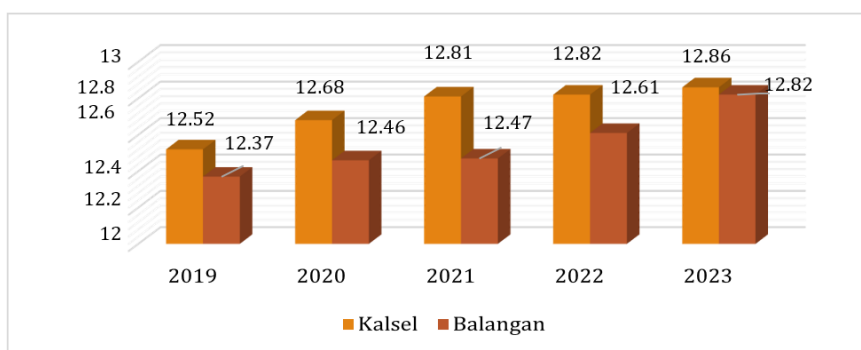
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.



Gambar 2. 21. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Selama 5 tahun terakhir HLS di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan namun belum signifikan. Dimana Tahun 2019 HLS di Kabupaten Balangan 12,37 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,82 tahun, hal ini berarti secara rata-rata menggambarkan penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,82 tahun (sekitar kelas 3 SLTA).

HLS menjadi salah satu dasar dimensi pembentukan IPM. Rendah dan lambatnya peningkatan HLS Kabupaten Balangan menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan hingga dari tahun 2021 sampai 2022 hanya mampu berada di peringkat ke 10 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 72,20 dengan kategori sedang.

Masih belum optimalnya kinerja HLS disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu dan jarak yang jauh (terpencil) untuk mengakses pendidikan formal dimana masih ditemukan tidak tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permanen di Daerah terpencil pemukiman.

Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar yaitu hanya 74 dan sekolah menengah hanya 134 yang memicu belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) disetiap jenjang, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan masih banyak ditemukan Anak Putus Sekolah (APtS) setiap tahunnya disetiap jenjang.

APS SD/MI sebesar 92,86%, APS SMP/MTS sebesar 68,17% dan APS SMA/MA/SMK sebesar 71,89%. AMS SD/MI ke SMP/MTS sebesar 75,65%, AMS dari SMP/MTS ke SMA sebesar 39,08%. APtS tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 0,59% atau 29 orang untuk tingkat SD/MI dan 1,59% atau 24 orang untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan untuk tingkat SMA/MA/MK sebanyak 1,07% atau 17 orang. Masih tingginya APtS tersebut antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan diperparah dengan adanya pandemic COVID-19 tahun 2021 dan awal 2022 yang memicu anak memilih bekerja karena terlalu lama tidak masuk sekolah sehingga menimbulkan kejenuhan dan akhirnya ketika sudah bekerja mereka merasa nyaman karena mampu memiliki uang sendiri, selain itu juga karena transportasi umum untuk kesekolah sementara orangtua tidak memiliki kendaraan pribadi, adanya pernikahan dini juga menyebabkan terjadinya APtS.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan HLS tahun 2022 di Kabupaten Balangan, karena dengan meningkatkan HLS dapat meningkatkan IPM Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2022 sebanyak 52 pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana sebagai pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer yaitu pengadaan Chromebook bagi seluruh sekolah jenjang SD dan SMP sebanyak 202 buah

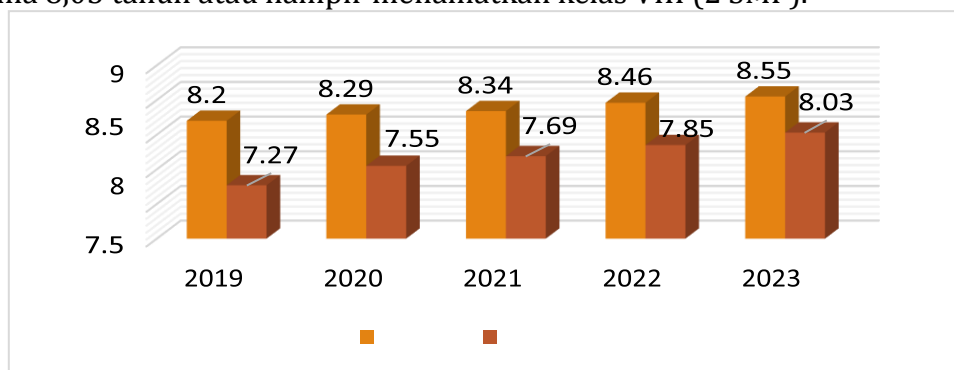
- c. Peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai memberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2018 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama di luar Kalimantan)

Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 600 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dimensi RLS terdiri atas penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian RLS Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir masih cukup rendah dalam peningkatannya. Dimana pada tahun 2019 sebesar 7,27 tahun dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 8,03 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,03 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (2 SMP).



Gambar 2. 22. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Balangan 2019-2023
Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Masih rendah dan lambatnya peningkatan RLS Kabupaten Balangan di sebabkan oleh banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun di Kabupaten Balangan yang hanya mengenyam pendidikan di SD dan juga banyak yang tidak melanjutkan kejenjang SMP serta masih ada penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pada saat berusia dibawah 25 tahun. Pada tahun 2022 dari jumlah penduduk 25 tahun keatas sebanyak 59.104 orang terdapat 36.993 orang yang tidak menamatkan pendidikan dasar sampai lanjutan yang terdiri dari 9.463 orang yang belum menamatkan pendidikan dasar, 15.588 orang yang tidak menamatkan pendidikan menengah dan 11.492 orang yang tidak menamatkan pendidikan lanjutan.

Dari 59.104 orang penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas hanya 22.111 orang atau 37,41% yang menamatkan pendidikannya. Terkait hal tersebut maka upaya pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan RLS di tahun 2022 antara lain dengan memberikan kesempatan kepada penduduk diatas usia 25 tahun untuk mengambil paket A, B dan C. dengan meningkatkan pelayanan pendidikan kesetaraan yaitu dengan meningkatkan jumlah penyelenggaraan paket yaitu paket B dari 13 penyelenggara menjadi 21 penyelenggara

dengan 78 totur menjadi 126 orang totur, paket C dari 31 penyelenggara menjadi 33 penyelenggara dengan 186 tutor menjadi 198 totur.

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Pada tahun 2021 tercatat jumlah 4.888 anak di usia 5- 6 tahun dan 4.364 yang sudah mendapatkan pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau cakupan layanan sekitar 89,28%. Masih terdapat 16 desa dari 157 desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan yang masih belum memiliki PAUD karena ada beberapa desa yang letak geografisnya berada dipedalaman / pegunungan sehingga masih belum tersedia layanan PAUD dan juga ada beberapa desa yang letaknya saling berdekatan sehingga layanan PAUD bisa ditempuh terdekat dengan desa lainnya, kemudahan juga ada desa yang penduduknya sekarang tidak lagi menetap didesa tsb sehingga tidak memerlukan penyediaan layanan jenjang PAUD.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

Tabel 2. 28. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	47,6	70,27	71,77	89,28	70,89	72,23
2	SD/MI/Paket A	100,11	98,78	108,35	108,08	102,18	99,84
3	SMP/MTs/Paket B	80,53	77,38	86,12	85,26	104,32	89,68
4	SMA/SMK/Paket C	-	-	95	98,02	105,51	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2022-2023 dan Neraca Pendidikan Daerah.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa APK di Kabupaten Balangan di semua jenjang kecuali SMA/SMK/Paket C angkanya masih fluktuatif. Dimana Tahun 2022 pada jenjang PAUD terjadi penurunan sebesar 89,28, tahun 2023 menjadi 72,23 tahun 2023 hal ini disebabkan karena belum meratanya lembaga PAUD pada desa desa khususnya Daerah terpencil, namun hal ini sudah di tindak lanjuti dengan pelaksanaan program satu desa satu PAUD kemudian faktor geografi kabupaten balangan sebagai Daerah yang diapit oleh Kabupaten tetangga yang lebih maju pembangunannya sehingga ada beberapa desa yang secara letak lebih dekat ke Kabupaten tetangga sehingga ada kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Tentangga, sehingga dalam perhitungan APK anak tsb tidak masuk dalam rumus APK hal ini sudah disikapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu sarana dan prasarana sekolah ataupun mutu dari pendidikan sehingga menarik minat penduduk untuk bersekolah di dalam Kabupaten Balangan.

Sedangkan jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 108,08 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2022 sebesar 104,32 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 85,26. APK SMA/SMK/Paket C tahun 2021 sebesar 98,02 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 95,00

penyebabnya sama halnya dengan APK PAUD penurunan terjadi karena kondisi geografis balangan yang masih ada Daerah terpencil dan Daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga yang lebih maju, dan karena Masyarakat Kabupaten Balangan yang agamis sehingga banyak juga masyarakat menyekolahkan / melanjutkan anaknya untuk sekolah dipesantren pesantren baik itu didalam Kabupaten Balangan ataupun diluar Kabupaten Balangan, bagi yang sekolah dipesantren dalam kabupaten Balangan pemerintah Daerah sudah mensikapinya dengan menawarkan kepada ponpes tersebut untuk membuka kelas paket kesetaraan didalam agar para santri lulusan nanti bisa juga mendapatkan ijazah dari jalur pendidikan non formal.

5) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B) turut diperhitungkan. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan.

Tabel 2. 29. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	84,64	85,01	99,27	99,17	91,16	90,96
2	SMP/MTs/Paket B	60,45	58,23	82,69	76,28	69,19	61,66
3	SMA/SMK/Paket C	49,15	51,03	70,84	65,83	56,23	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI selama 6 tahun bersifat fluktuatif yang mana tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 84,6 menjadi 99,27 pada tahun 2020, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 90,96. Sedangkan APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Balangan dikarenakan banyaknya anak Usia 13-15 Tahun yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan Pendidikan mereka ke Kabupaten Tetangga sehingga tidak tercatat di kabupaten Balangan, di mana pada era saat ini terjadi fenomena atau trend sekolah sekolah pesantren modern dengan bilingual (Dua Bahasa) yang mereka tawarkan sementara di kabupaten balangan belum tersedia pesantren pesantren modern sebagai penyeimbang pesantren pesantren modern yang ada di kabupaten tetangga.

Tabel 2. 30. Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru dan Murid						
1	SD/MI					
1,1	Jumlah Guru	1786	1761	1939	1945	1331
1,2	Jumlah Murid	15085	14949	15216	15090	11656
1,3	Rasio	1:08	1:08	1:08	1:08	1:09
2	SMP/MTs					
2,1	Jumlah Guru	614	601	594	670	275
2,2	Jumlah Murid	5840	5616	5555	5135	2368
2,3	Rasio	1:09	1:09	1:09	1:09	1:08
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah						
3	SD/MI					
3,1	Jumlah gedung sekolah	208	209	211	212	211

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3,2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14631	14933	15164	15202	15229
3,3	Rasio	0,09027778	0,09097222	0,09236111	0,09166667	0,09027778
4	SMP/MTs					
4,1	Jumlah gedung sekolah	42	42	42	43	43
4,2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7100	7258	6985	6971	7268
4,3	Rasio	0,15902778	0,16180556	0,15694444	0,15416667	0,12638889
Perkembangan Angka Melek Huruf						
5.1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	65.494	65,831	97,897	97,897	99,47
5.2	Jumlah penduduk usai 15 tahun ke atas	65.779	66,116	98,396	98,182	-
5.3	Angka Melek Huruf	99,57	99,57	99,49	99,71	99,64
Angka Partisipasi Sekolah						
6	SD/MI					
6,1	Jumlah murid usia 7-12 thn	12,313	12,694	13,661	13,547	13,328
6,2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14,631	14,933	15,164	15,202	15,227
6,3	APS SD/MI	84,16	85,01	90,09	89,11	99,03
7	SMP/MTs					
7,1	Jumlah murid usia 13-15 thn	4,292	4,226	5,089	4,414	479
7,2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7,1	7,258	6,985	6,971	7268
7,3	APS SMP/MTs	60,45	58,23	72,86	63,32	98,15
8	Angka pendidikan yang ditamatkan	100	100	100	100	100
9	Angka Kelulusan:					
9.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
9.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
9.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100
10	Angka Melanjutkan (AM):					
10.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	86,39	80,16	83,48	73,77	77,74
10.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,65	97,12	97,92	90,88	87,92
11	Fasilitas Pendidikan:					

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
11.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100	100
11.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100	100
11.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	115,04	114,67	114,23	115	112,9
11.4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	30,56	30,72	31,34	31,06	37,48
11.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1163,86	1148,55	1143,8	1197,63	1136,63
11.6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	856,26	882,1	885,01	986,03	1039,24
11.7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:12	1:12	1:12	1:11	1:11
11.8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:25	1:25	1:25	1:23	1:23
11.9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	94,49%	91,54%	92,23%	95,93	99,73
12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV (%)					
12.1	Guru TK/PAUD		53,95	91,03	-	53,3
12.2	Guru SD		81,2	92,78	88,62	97,6
12.3	Guru SMP		90,35	98,48	95,95	98,9
13	Persentase Guru SD bersertifikat		58,82	79,39	95,84	73,55
14	Persentase Guru SMP bersertifikat		52,43	96,04	97	42,3
15	Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah		100	100	100	100
16	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Kepala Sekolah		100	100	100	100

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Laporan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2023

Dari data tabel diatas Jumlah Guru dan Murid dikabupaten balangan tergambar untuk tahun 2022 jumlah guru pada tingkat SD berkurang dikarenakan ada beberapa yang mutasi dan banyak yang purna tugas sedangkan pengangkatan guru ASN pada tahun 2022 kebawah tidak ada. sehingga berpengaruh terhadap Rasio guru murid

pada tahun 2020 naik menjadi 1:9 tergambar bahwa 1 guru rata rata mengajar 9 murid dengan rasio idealnya 1 : 20.

Sama halnya pada jenjang Pendidikan Dasar, pada jenjang SMP pun mengalami hal yang sama pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah guru menjadi 275, dikarenakan ada guru yang mutasi dan banyak juga yang purna tugas, dengan capaian rasio guru murid SMP tahun 2022 adalah 1 : 8 berarti 1 guru rata rata mengajar 8 murid, dengan rasio ideal adalah 1 : 20.

Untuk perkembangan indikator Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15-44 tahun dapat dilihat pada tabel diatas capaiannya pada tahun 2022 adalah 99,64. Hal ini berarti ada sekitar 0,36% penduduk yang masih buta aksara yang disebabkan oleh faktor geografis dan ada penduduk yang sudah berumur yang kebanyakan tidak pernah mengenyam pendidikan.

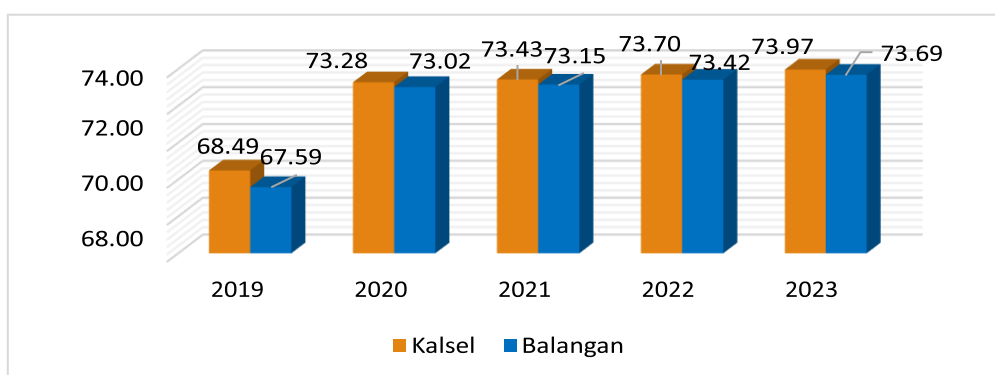
Kemudian pada tabel perkembangan indikator Angka Partisipasi Sekolah terjadi kenaikan pada jenjang APS SD/MI yang sebelumnya capaian di tahun 2021 89,11 meningkat capaiannya pada tahun 2022 sebesar 99,03 dan pada jenjang APS SMP/MTs dari capaian tahun 2021 63,32 capaian meningkat menjadi 98,15 hal ini dikarenakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang bisa dikatakan berhasil menarik minat masyarakatnya untuk selalu menempuh dan menyelesaikan pendidikan diantaranya Program Beasiswa Prestasi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS serta SMA/MA/SMK hingga pada jenjang Perguruan Tinggi, dan pelaksanaan Program Balangan Pintar yang ditujukan bagi masyarakat tergolong tidak mampu diberikan perlengkapan sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Pada capaian indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) terjadi penurunan capaian pada Guru jenjang TK/PAUD pada tahun 2022 capaiannya adalah sekitar 53,3 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 ada kebijakan penegerian TK/PAUD swasta sehingga banyak TK/PAUD swasta yang sudah berhasil berubah statusnya menjadi TK/PAUD Negeri yang menyebabkan data Guru pada TK/PAUD tersebut tercatat pada Dapodik namun kebanyakan dari Guru tersebut statusnya masih Honor.

B. Urusan Kesehatan

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai



tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

Gambar 2. 23. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024

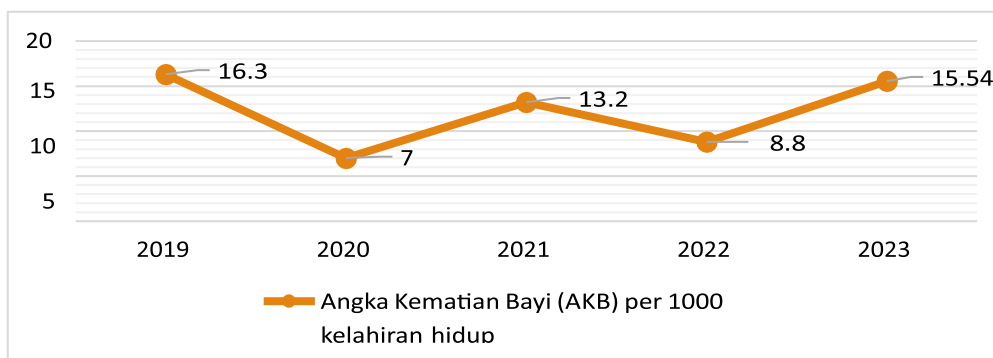
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi peningkatan namun sangat lambat. UHH tahun 2019 adalah 67,59 tahun dan terjadi peningkatan sebesar 6,1 tahun atau menjadi 73,69 tahun pada tahun 2023. Walau terjadi peningkatan kinerja UHH dari 73,42 tahun pada 2022 menjadi 73,69 tahun di 2023, namun jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,97 tahun maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Balangan berada di urutan ke 8 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan sehingga berada di urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut. Keberhasilan Kabupaten Balangan meningkatkan UHH sebesar 6,05 tahun karena dipengaruhi oleh penurunan AKB dan AKI dari tahun 2018 ke 2022 yang merupakan indikator komposit penentu UHH, dengan demikian menurunkan AKB adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan UHH. Upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan untuk meningkatkan UHH selain penurunan AKB dan AKI juga meningkatkan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar pelayanan minimal dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

2) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan data, AKB di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 7/1.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 13,2/1.000 KH dan menurun kembali ditahun 2022 menjadi 8,8/1.000 KH atau dengan total kematian bayi jika dikonversi ke absolut sebanyak 18 orang. Kematian bayi usia dibawah 29 hari pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) sebanyak 9 orang, asfiksia sebanyak 5 orang, kelainan kongenital 1 orang, 1 orang karena lainnya dan 2 orang mati pada usia diatas 29 hari. Sedangkan ditahun 2023 meningkat kembali menjadi 15,54/1.000 KH.



Gambar 2. 24. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

AKB di Kabupaten Balangan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 sehingga menjadikan Kabupaten Balangan berada di urutan ke 10 terendah Se Kalimantan Selatan dan memberikan sumbangan yang positif terhadap kinerja AKB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 8,8/1.000 KH dari rata-rata AKB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10/1.000 KH.

Tabel 2. 31. Angka Kematian Bayi Di Provinsi Kalimantan Selatan

Kode	Wilayah	Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Bayi	AKB	Peringkat
6301	Tanah Laut	5949	60	10	7
6302	Kotabaru	4118	40	10	8
6303	Banjarnegara	9537	125	13	4
6304	Barito Kuala	4274	48	11	6
6305	Tapin	2982	36	12	5
6306	Hulu Sungai Selatan	3403	57	17	3
6307	Hulu Sungai Tengah	3792	65	17	2
6308	Hulu Sungai Utara	3315	68	21	1
6309	Tabalong	3702	34	9	9
6310	Tanah Bumbu	6679	53	8	11
6311	Balangan	2038	18	8.8	10
6371	Kota Banjarmasin	10668	9	1	13
6372	Kota Banjarbaru	4214	32	8	12
TOTAL		64671	645	10	13

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, AKB di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 21/1000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong sebesar 9/1.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya diatas Tabalong.

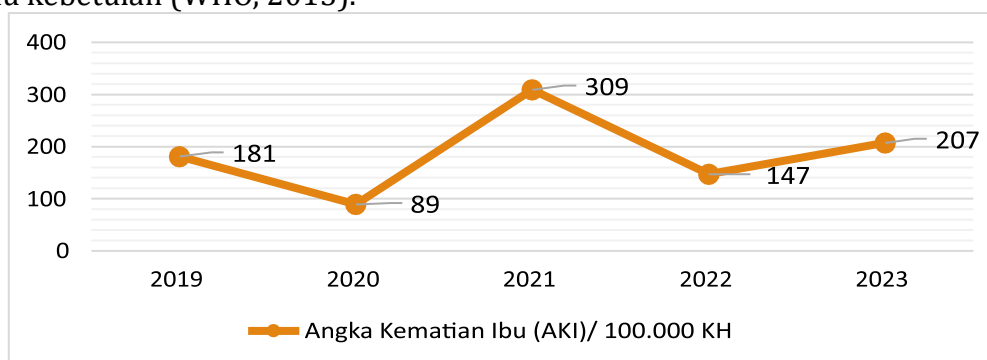
Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKB selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 95,03% pada tahun 2022. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari). Selain upaya tersebut diatas juga melaksanakan kunjungan dokter spesialis anak ke puskesmas, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas Balita, peningkatan kompetensi bidan untuk

pelayanan persalinan dengan melaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).

Walaupun terjadi penurunan AKB di Kabupaten Balangan namun masih terdapat kematian bayi yang tetap harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan optimalisasi pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kesehatan ibu dan anak sebesar 100%.

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI menurut batasan dari The Tenth Revision of International Classification of Diseases (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015).



Gambar 2. 25. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 dan LKIP 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas AKI di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 99/100.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 309/100.000 KH dan menurun kembali ditahun 2023 menjadi 207/100.000 KH atau sebanyak 3 orang. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan AKI ditahun 2021 karena pandemi COVID 19. Adapun 3 kematian ibu ditahun 2022 tersebut bertempat di RS Amuntai dan Balangan dengan rincian sebagai berikut, 2 orang di Kecamatan Lampihong karena preeklamsia berat, rupture uteri dan syock hypolemic, 1 orang di Kecamatan Aawayan karena perdarahan.

Tabel 2. 32. Angka Kematian Ibu Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kode	Wilayah	Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	AKI	Peringkat
6301	Tanah Laut	5949	3	50	13
6302	Kotabaru	4118	9	219	3
6303	Banjar	9537	19	199	4
6304	Barito Kuala	4274	3	70	12
6305	Tapin	2982	9	302	1
6306	Hulu Sungai Selatan	3403	3	88	9
6307	Hulu Sungai Tengah	3792	3	79	10
6308	Hulu Sungai Utara	3315	8	241	2
6309	Tabalong	3702	5	135	6
6310	Tanah Bumbu	6679	5	75	11
6311	Balangan	2038	3	147	5
6371	Kota Banjarmasin	10668	14	131	7

Kode	Wilayah	Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	AKI	Peringkat
6372	Kota Banjarbaru	4214	5	119	8
TOTAL		64671	89	138	13

Sumber: *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi peningkatan kinerja karena terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun 2021 namun jika dibandingkan AKI Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah rata-rata AKI Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 138/100.000 KH dan berada di urutan ke 5 tertinggi Se Kalimantan Selatan sehingga harus menjadi prioritas perhatian oleh Pemerintah Daerah Balangan. AKI di Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 241/100.000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 79/100.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah.

Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKI selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain peningkatan pelayanan ibu hamil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (AKI) yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 140 buah Poskesdes dan 149 bidan didesa, peningkatan kompetensi bidan yaitu dilaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) secara bertahap yang pelaksanaannya berkerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin, pengadaan roda dua secara bertahap untuk bidan di desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penurunan AKI. Adanya kendaraan roda dua dapat digunakan oleh bidan di desa untuk melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu dan anak yang tidak koperatif memeriksakan kesehatannya ke Poskesdes maupun Puskesmas.

Walaupun terjadi peningkatan kinerja AKI namun kematian ibu di Kabupaten Balangan selama 5 tahun masih terjadi, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi. Pada tahun 2022 ibu hamil dengan anemia sebanyak 438 orang, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 273 orang dan ibu hamil dengan komplikasi maternal sebanyak 646 orang yang tentunya jika tidak mendapatkan pelayanan yang komprehensif pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas karena kurang optimalnya skrining deteksi risiko komplikasi maternal pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, eklamsia baik pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang akhirnya dapat berakibat kematian.

Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SPOG) sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif namun masih saja ada ditemukan kematian ibu di RSUD Balangan sebanyak 2 orang hal ini kemungkinan dipengaruhi kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan berencana pada ibu yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang komprehensif.

4) Prevalensi Stunting

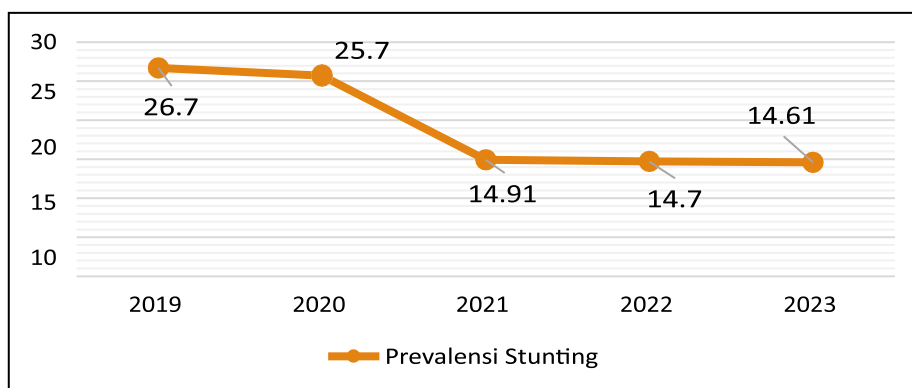
Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan Datang. Stunting adalah masalah gizi kronis pada Balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang

menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif.

Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh pemberian makanan pendamping asi yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

Gambar 2. 26. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023



Berdasarkan tabel diatas dari data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar 12,09% atau menjadi 14,61% ditahun 2023 dari 26,7% ditahun 2019.

Tabel 2. 33. Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

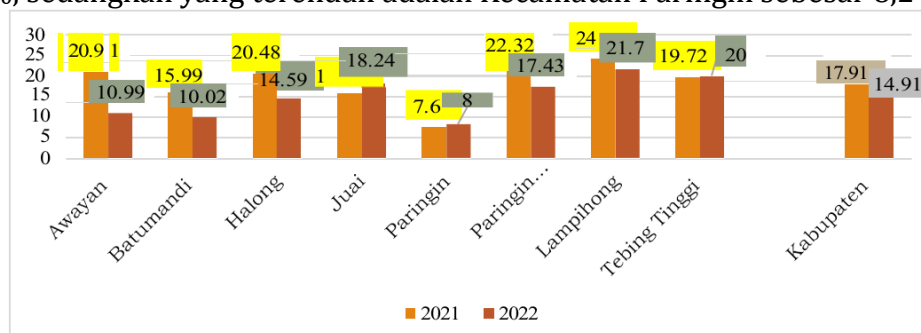
NO	KABUPATEN	PREVALENSI STUNTING
1.	Tanah Laut	5,3%
2.	Kota Baru	7,5%
3.	Banjar	17,1%
4.	Barito Kuala	12,5%
5.	Tapin	11,3%
6.	Hulu Sungai Selatan	4,4%
7.	Hulu Sungai Tengah	10,2%
8.	Hulu Sungai Utara	19,4%
9.	Tabalong	8,9%
10.	Tanah Bumbu	5%
11.	Balangan	14,7%
12.	Banjarmasin	2,9%
13.	Banjar Baru	13,2%
Provinsi Kalimantan Selatan		9,1%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (data e-PPGBM) tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada diatas prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9,1% dan berada di urutan ke 3 tertinggi Se-Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar.

Prevalensi stunting di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 10,2% maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan gambar di bawah, dari Elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tarikan bulan september 2022 prevalensi stunting tingkat kecamatan yang diatas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Kecamatan Juai, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Halong dan yang tertinggi adalah Kecamatan Lampihong sebesar 21,7%, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Paringin sebesar 8,24%.



Gambar 2. 27. Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 (E-PPGBM).

Penurunan prevalensi stunting terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Awayan yaitu sebesar 9,92% dan penurunan terkecil di wilayah Kecamatan Lampihong yaitu hanya sebesar 2,49%. Untuk tren status terdapat 3 (tiga) status menjadi naik yaitu wilayah Kecamatan Juai, Paringin dan Tebing Tinggi dengan status naik tertinggi di Kecamatan Juai sebesar 2,55%. sedangkan tren yang terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Awayan, Batumandi, Halong Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun status penurunan terbesar sebesar 9,92% di Kecamatan Awayan.

5) Indeks Keluarga Sehat

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas akan berjalan dengan baik, bila dilaksanakan langkah- langkah persiapan yang meliputi sosialisasi, pengorganisasian, pembiayaan dan persiapan pendataan. Berdasarkan Permenkes Nomor 39 tahun 2016 Kriteria Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai berikut : Keluarga sehat dengan nilai > 0,800, keluarga pra sehat dengan nilai 0,500 - 0,800, keluarga tidak sehat dengan nilai < 0,500.

Tabel 2. 34. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Balangan Tahun 2018 - 2022

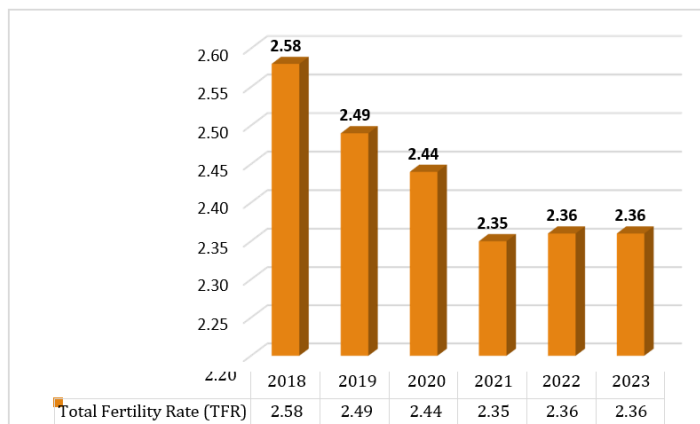
No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	IKS	0,18	0,24	0,3	0,32	0,34

Sumber: Laporan Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

Dari 12 indikator IKS, terdapat 5 indikator keluarga sehat yang masih rendah di Kabuapten Balangan sehingga mempengaruhi IKS Kabupaten Balangan. 5 indikator yang masih rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah indikator keluarga mengikuti program KB (49 %), penderita TB paru yang berobat sesuai standar 43,62%, penderita hipertensi yang berobat teratur 24,41%, penderita gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan 13,93%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 55,90%.

6) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang maka harus menurunkan TFR secara bertahap. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk, diperoleh data 6 tahun terakhir sebagai berikut:



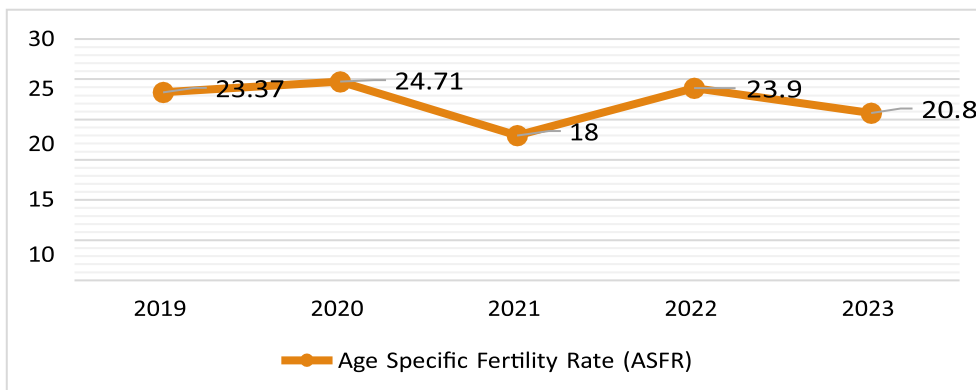
Gambar 2. 28. TFR 2018-2023

Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik TFR diatas selama 6 tahun TFR terjadi penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 namun terjadi peningkatan ditahun 2022 dan 2023. Fluktuatifnya TFR menggambarkan pertumbuhan penduduk yang belum stabil. Naiknya TFR ditahun 2022 dan 2023 salah satunya dipengaruhi karena menurunnya MCPR di Kabupaten Balangan pada tahun 2022. Cakupan Pelayanan KB (MCPR) atau Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Seiring dengan menurunnya angka MCPR pada tahun 2022, angka TFR juga mengalami peningkatan. Walau terlihat tidak signifikan secara angka, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang akan menentukan pengetahuan serta pemahaman terhadap yang memberikan KIE (di tingkat lini lapangan/Kader KB) dan yang diberikan KIE dalam hal ini adalah PUS (Pasangan Usia Subur) khususnya tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan maupun mengakhiri proses reproduksi. Selain itu faktor ekonomi merupakan hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan jumlah anak yang didahului oleh perencanaan keluarga sehingga sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis juga mempengaruhi karena wilayah yang sulit seperti pegunungan sehingga akses ke pelayanan terbatas. Jumlah tenaga bidan yang belum memperoleh pelatihan tentang pelayanan KB modern lebih banyak jika dibandingkan dengan bidan yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pelayanan KB, sehingga tenaga pemberi pelayanan KB khususnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang sangat terbatas.

7) *Age Specific Fertility Rate (ASFR)*

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan data, ASFR usia 15-19 tahun di Kabupaten Balangan ASFR selama 5 tahun bersifat fluktuatif. ASFR dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan namun ditahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 18%. Terjadinya peningkatan ASFR tahun 2022 di Kabupaten Balangan menjadi 23,9% tentu karena dipengaruhi



terjadinya peningkatan pernikahan usia anak. Selanjutnya di tahun 2023 menurun kembali menjadi 20,8%. Adapun perkembangan ASFR di Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 2. 29. Age Specific Fertility Rate (ASFR) di Kabupaten Balangan 2019-2023

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023

8) Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Tabel 2. 35. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	25,5	20,5	19,5	29,5	27,5
2	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	11,6	7,6	9,8	9,8	9,7
3	Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk	3,9	5,3	6	8,3	10,4
4	Rasio apoteker per 100.000 penduduk	6,2	16,7	15	17,4	20,1
5	Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk	34,7	37,3	19,5	22,7	29
6	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	237,8	241,1	182,3	189,1	217,1
7	Rasio bidan per 100.000 penduduk	221,6	210	188,3	184,6	232,7
8	Rasio nutrisisionis per 100.000 penduduk	20,8	22,8	21,8	19,7	23,8
9	Rasio sanitarian per 100.000 penduduk	17	27,4	26,3	22,7	26
10	Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk	19,3	27,4	27	18,6	26,8
11	Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk	13,1	13,7	11,2	11,9	12,6

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan tabel diatas untuk rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Balangan selama 5 tahun bersipat fluktuatif dan masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang mana pada tahun 2021 ratio ketersediaan dokter di Kabupaten Balangan baik yang ada di RS maupun puskesmas sebesar 29,7/100.000 penduduk, dengan jumlah dokter sebanyak 40 orang, sedangkan pada tahun 2022 ratio ketersediaan dokter sebesar 27,5/100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang. Terjadi penurunan ratio ditahun 2022 disebabkan karena adanya 3 tenaga dokter umum yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak memperpanjang kontraknya di Kabupaten Balangan. Adapun ketidakidealan rasio tenaga dokter di Kabupaten Balangan didominasi kekurangan dokter umum di RSUD Balangan. Ketidak idealan tersebut tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang kesehatan yang seharusnya dilayani dokter dan akan mempengaruhi akreditasi khususnya RS.

9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Terkait pemenuhan SPM tersebut maka tidak hanya ketersediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan standar baik secara kuantitas dan kualitas akan tetapi yang tidak kalah pentingnya juga kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan yang representatif agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Tabel 2. 36. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,78	0,79	0,75	0,7	0,7
2	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	9	9,48	9,08	8,9	8,9
3	Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk	16	16,59	14,38	13,4	13,4

Sumber: *Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023.*

Berdasarkan tabel diatas untuk ketersediaan rumah sakit sudah sesuai secara kuantitas, ketersediaan 1 buah puskesmas rawat inap, 11 buah puskesmas non rawat inap di 8 kecamatan dengan rasio 1 : 11.209 jumlah penduduk juga sudah sesuai standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran Hak akan Kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas dengan kecamatan adalah 1 : 2 atau 1 : 16.000 jumlah penduduk.

Ketersediaan rumah sakit secara kuantitas sudah terpenuhi namun perlu pengembangan seiring dengan tuntutan peningkatan akreditasi rumah sakit dan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke RSUD Balangan, sedangkan rasio ketersediaan puskesmas sudah sesuai standar namun hampir semua bangunan puskesmas saat ini adalah bangunan lama yang penataan tata grahanya belum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang puskesmas yang telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas, sehingga tata graha di dalamnya masih banyak yang tidak sesuai, contohnya ruangan pelayanan yang masih terlalu sempit, belum ada pemisahan ruangan infeksius dengan non infeksius dikarenakan keterbatasan ruangan, dan lain sebagainya. Adapun puskesmas yang sudah dilakukan penyesuaian adalah Puskesmas Lampihong, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Tanah Habang dan Puskesmas Paringin. Sementara 8 Puskesmas lainnya juga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sesuai prototipe puskesmas yang sesuai standar. Selain itu 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Pirsus perlu dilakukan relokasi mengingat lokasi puskesmas saat ini adalah Daerah yang rawan banjir serta keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan puskesmas.

Puskesmas pembantu sebagai unit layanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan masih belum sesuai dengan standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran hak akan kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas pembantu 1 : 1.500 penduduk, sedangkan ketersediaan puskesmas pembantu di Kabupaten Balangan 1 : 7.473 penduduk.

Untuk ketersediaan poskesdes belum terpenuhi untuk 1 desa 1 buah poskesdes, yang mana pada saat ini poskesdes hanya berjumlah 138 buah dari 154 desa di Kabupaten Balangan. Masih ada 16 desa yang belum memiliki poskesdes. Hal ini tentu berdampak pada pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga berdampak masih adanya kematian bayi dan kematian ibu serta lambatnya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022. Selain itu

sebagian besar poskesdes kondisinya juga memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan perluasan ruangan pelayanan agar mampu menampung persalinan yang dibantu oleh 6 tangan (3 orang bidan).

10) Akreditasi Puskesmas

Puskesmas yang sudah terakreditasi di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 adalah 12 puskesmas dari 12 yang ada. 12 puskesmas terakreditasi ini, sebanyak 4 kategori Paripurna ((Puskesmas Tanah Habang, Puskesmas Juai, Puskesmas Paringin Selatan dan Puskesmas Paringin), 7 kategori Utama (Puskesmas Halong, Puskesmas Pirsus, Puskesmas Uren, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Lampihong, Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Awayan) dan sisanya kategori Madya (Puskesmas Lok Batu).

Tabel 2. 37. Akreditasi Puskesmas Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Puskesmas	12
2	Puskesmas Terakreditasi	12
3	Paripurna	4
4	Utama	7
5	Madya	1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

11) Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan

BoR (*Bed Occupancy Rate*) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BOR bertujuan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi penggunaan tempat tidur di rumah sakit yang digunakan untuk pelayanan. BoR di RSUD Balangan selama 5 tahun bersifat fluktuatif dan masih rendah karena dibawah angka 60%. Rendahnya BOR di RSUD Balangan karena tidak banyaknya pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Balangan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih belum lengkap sehingga cenderung berobat ke RS yang lain atau dirujuk ke RS lainnya. Selain itu kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian BOR RSUD Balangan dimana adanya kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit.

Tabel 2. 38. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	BOR	44,9	57,5	57,5	38,2	44,1
2	AVLOS	3,2	3,1	3,1	3,9	3,2
3	TOI	3,8	2,3	2,3	6,4	4,1
4	BTO	52,6	66,1	66,1	33,1	49,3
5	NDR	11,2	12,8	12,8	22,6	13,2
6	GDR	20,5	22,8	23,4	48,4	26,5

Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

Berdasarkan data rekam medik jumlah kunjungan pasien RSUD Balangan tahun selama 5 tahun bersifat fluktuatif. Jumlah kunjungan pasien pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah kunjungan yakni berjumlah 42.761 kunjungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 dikarenakan pasien takut berobat ke rumah sakit/takut diCOVIDkan, jumlah kunjungan pasien tahun 2020 adalah 29.172 dan tahun 2021 berjumlah 29.021 kunjungan, kemudian pada tahun 2022 kunjungan pasien kembali meningkat dikarenakan status pandemi COVID 19 sudah dicabut sehingga menyebabkan kunjungan pasien menjadi normal kembali bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 2. 39. Data Kunjungan Pasien Tahun 2018-2022

NO	DATA KUNJUNGAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rawat Inap	7.033	8.365	5.051	4.795	6.249
2	Rawat Jalan	26.386	30.663	20.113	21.518	35.656
3	IGD	3.270	3.733	4.008	2.708	7.552
	JUMLAH	36.689	42.761	29.172	29.021	49.457

Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

12) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas 12 pelayanan kesehatan. Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 40. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	68	70	73,2	79,18	81,67	86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	74,88	76,43	80,11	88,29	91,36	95,96
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	79,3	81,73	85,26	92,76	95,03	97,73
4	Pelayanan Kesehatan Balita	51	61,72	95,13	97,34	99,45	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	85	96,03	15,01	66,99	98,36	98,62
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	15	38	12	15,19	51	63,24
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	41,3	69,74	93,6	94,34	98,73	99,97
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	75	151	29,7	26,3	79,49	92,54
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	93	120,28	49	29,33	87,55	92,93
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	125	173	188,77	132,62	/90
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	38	17	17,68	36,72	47
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100	87	88	92,43	99,45

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dari 12 indikator pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan hanya 1 yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren

panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu.

Sampai dengan tahun 2022, panjang jalan Kabupaten Balangan adalah 672,253 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 359.467 km atau 53,47% yang kondisinya mantap, sedangkan 26.289 km atau 3,91% kondisinya rusak ringan dan 286.497 km atau 42,62% dalam kondisi rusak berat. Salah satu penyebab terjadinya penurunan karena dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati juga diakibatkan adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu agregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik dan juga diakibatkan karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. Untuk itu pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala guna menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada Tahun 2021 sebesar 0,20 dan meningkat menjadi 0,34 di tahun 2022. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 23,43% meningkat menjadi 30,43% di tahun 2022. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan adapun Daerah irigasi yang dilakukan ada pada DI Marias, DI Baruh Panyambaran, DI Bungur Rawa, DIR Lajar, dan DIR Matang Hanau. Pada Tahun 2022 kondisi luas jaringan Daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 1.897 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan Daerah sebesar 6.234 ha sehingga diperoleh perhitungan persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaan sebesar 30,43%. Untuk indikator Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun pada tahun 2022 sebesar 13,68%. Pada tahun 2022 panjang tebing sungai yang ditangani telah berjumlah 16.497,05 meter sedangkan total panjang tebing sungai yang rawan longsor sebesar 120.554 meter sehingga di peroleh perhitungan persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 13,68%

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2023, sebanyak 87,76% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, naik dari 84,05% di tahun 2022, kenaikan ini dikarenakan pemerintah Daerah memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk standar hidup layak, namun yang menjadi kendala adalah masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di perdesaan yang belum dapat mengakses air bersih karena ketidakmampuan dalam membayar biaya per bulannya. Hal ini menjadi permasalahan disamping masih tingginya idle capacity PDAM Balangan (57,71%) Capaian ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas, sedangkan untuk akses air minum aman menjadi pikir bersama untuk kabupaten Balangan karena akses air minum aman ini berkaitan dengan kualitas, karena aman ini identik dengan akses perpipaan atau PDAM yang masih rendah capaiannya. Sementara untuk akses sanitasi terjadi peningkatan dimana pada tahun 2021 92,61 % meningkat menjadi 98,85% di tahun 2022. Peningkatan ini mewakili penggambaran semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan perlunya akses sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini

masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,59%, akses layak sebesar 10,84% dan akses tidak layak sebesar 88,01%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 1,15% atau 508 KK. Untuk sanitasi aman di Kabupaten Balangan masih jauh dikatakan kategorikan sanitasi aman karena masyarakat Balangan belum sepenuhnya melakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Data yang tertera di atas adalah update data inventarisasi air minum dan sanitasi Desember TA 2022. Untuk data update tahun 2023 belum dilaksanakan. Data update akan dilakukan di triwulan 1 (paling awal dimulai bulan Maret 2023 berkolaborasi dengan pihak konsultan dan sanitarian dari Dinas Kesehatan) untuk pendataan ke lapangan meliputi Pemetaan Data Esensial Rumah Tangga yg Terlayani Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Air Limbah di Kab Balangan Serta Pemetaan Esensial Rumah Tangga Yang Masih BABS di Kab. Balangan, agar mendapatkan data terupdate yang lebih akurat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 tatanan PBHS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadaran tahanan tentang perilaku hidup bersih sehat yaitu (1) PHBS di Rumah tangga; (2) PHBS di Sekolah; (3) PHBS di Tempat kerja; (4) PHBS di Sarana kesehatan; (5) PHBS di Tempat umum. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. (1) Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; (2) Pemberian ASI eksklusif; (3) Menimbang bayi dan balita secara berkala; (4) Cuci tangan dengan sabun dan air bersih; (5) Menggunakan air bersih; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik nyamuk; (8) Konsumsi buah dan sayur; (9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari; (10) Tidak merokok di dalam rumah.

Pada tahun 2021 persentase keluarga yang melaksanakan PHBS adalah pada tahun 2021 sebesar 43%. Permasalahan yang dihadapi adalah perubahan perilaku tidak serta merta dapat berubah dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama karena merubah kebiasaan tidak dapat dilakukan dengan sekali sosialisasi/edukasi/kegiatan Ada beberapa kegiatan yang mendukung pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua puskesmas dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, disebabkan ada 2 (dua) puskesmas yang tidak memiliki tenaga promosi kesehatan, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana di wilayah puskesmas tersebut. Refocusing anggaran juga menjadi salah satu permasalahan yang ada.

Tabel 2. 41. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Kabupaten Balangan	672.253	672.253	672.253	672.253	672.253	567.376
2	Persentase jalan dalam kondisi baik	33,68	37,88	41,67	20,19	34,19	50,47

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,1893	0,1933	0,19	0,19	0,20	
4	Kondisi Jalan (km)						
	a. Baik	226,418	254,634	280,114	135,760	229,839	286,344
	b. Sedang	44,608	44,608	44,608	302,860	129,628	58.079
	c. Rusak Ringan	74,390	74,390	74,390	89,630	26,289	16,89
	d. Rusak Berat	326,837	298,621	273,141	144,003	286,497	206.063
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	40,32	44,51	48,30	65,24	53,47	60,70
6	Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik	-	-	19,10	23,43	30,43	33,28
7	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun				12,35	13,68	19,98
8	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	94,76	95,45	80,59	81,72	84,05	87,76
9	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	79.41	80.45	95,09	92,61	98,85	
10	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir			11,29	12,35	13,68	19,98
11	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			89,27	89,52	90,73	92,34

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2022-2023

Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH public adalah sebesar 529,978 Ha.

Sampai dengan tahun 2022, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 3,91%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksan akan aktivitas social serta ekonomi. Selain sebagai tempat

beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global. Adapun data RTH yang ada di Kabupaten Balangan seperti RTH Citra Permai, RTH Harapan Baru, RTH Tebing Tinggi, RTH Juai, RTH Pondok Indah, RTH Lapangan Bola Martasura, RTH Taman Sanggam, RTH Batumandi, RTH taman Hijau dan RTH kompleks perkantoran Pemkab Balangan.

Indikator Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan ditahun 2022 sebesar 85%, IMB (Izin mendirikan bangunan) di ubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan Gedung atau perwakilannya. Sehingga Dinas PUPRPERKIM akan menggunakan persentase PBG yang diterbitkan dengan menggunakan rumus jumlah PBG yang diterbitkan di bagi dengan jumlah rekomendasi PBG yang dikeluarkan di kali 100% sehingga capaian untuk indicator itu sampai tahun 2022 sebesar 56% hal ini karena pemohon banyak putus di Tengah jalan dalam pengurusan administrasinya atau tidak bisa melengkapi persyaratannya.

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kab. Balangan No. 24 tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%. Metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya penataan ruang sehingga terkendalinya pemanfaatan ruang oleh Masyarakat dengan kebijakan meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 42. Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.0366	0.03912	0.039112	0.039112	0.0392
2	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
3	Persentase PBG yang diterbitkan	-	-		56%	56%
4	Persentase ketaatan RTRW	94%	96 %	96 %	96%	96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2023 sebesar 95,02%, angka ini bertambah dari tahun 2022 yang hanya 93,91%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Tabel 2. 43. Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	85,24	89,00	90,27	93,75	93,91	95,02
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	82,45	84,50	85,89	92,68	93,74	
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	63.64	72.73	74.75	86,63	86,90	
4	Jumlah Rumah tidak layak huni	7.500	7.000	6.502	2.522	2.290	2.012

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2022 sebesar 93,91%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2022 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2022 luasan Kawasan kumuh di targetkan sebesar 2,1 ha atau sebesar 78,49% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama ($35,30 + 12,35 = 47,65$ ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2022 sebesar $35,30 + 2,1$ ha = 37,40 ha atau sebesar 78,49%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali.

Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 93,74% di tahun 2022 yang meningkat capaiannya dibandingkan di tahun 2021 sebesar 92,68% dimana capaian tersebut di dapat dari jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU ditahun 2022 sebesar 86,90% yang meningkat di bandingkan tahun 2021 sebesar 86,63% dimana capaian tersebut didapat dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu dibagi dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator jumlah rumah tidak layak huni menurun signifikan untuk setiap tahunnya karena selain didukung oleh anggaran APBD II juga didukung oleh anggaran APBD I dan DAK sehingga untuk tahun 2023 jumlah rumah tidak layak huni yang tersisa di Kabupaten Balangan sebanyak 2.012 unit.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 2355 Orang yang tersebar di 157 Desa dan Kelurahan dengan Jumlah 15 Orang setiap Desa dan Kelurahan di tahun 2022 Jumlah Anggota Satlinmas menurun menjadi 2338 Orang terjadi penurunan kuantitas sebanyak 17 Orang dikarenakan jumlah anggota satlinmas desa dan kelurahan menyesuaikan dengan luas wilayah desa dan kelurahan serta adanya desa yang sudah tidak aktif akibat perluasan tambang di Kabupaten Balangan. Indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2020 sebanyak 29 kasus Pengaduan yang masuk dan 29 kasus Pengaduan yang tertangani dengan Capaian 100% yang artinya semua kasus pelanggaran K3 terselesaikan dengan baik dan tuntas. Selanjutnya, di tahun 2022 Angka Pelanggaran K3 menurun menjadi 22 Kasus Pelanggaran, Angka pelanggaran menurun sebanyak 7 Kasus dengan capaian peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 124,14%, artinya semakin menurun angka pelanggaran K3 semakin meningkat ketenteraman dan ketertiban umum di kabupaten Balangan, dengan tingkat penyelesaian K3 100% dari 22 Kasus Pengaduan yang masuk dan 22 Kasus yang tertangani artinya semua pengaduan yang masuk tertangani dengan tuntas.

Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait Persentase penegakan PERDA di kabupaten Balangan terdapat 24 Perda yang di kawal dan di tegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, tahun 2020 terdapat 24 Perda dan yang di Tegakkan di wilayah hukum kabupaten Balangan dengan capaian 100% dan Pada Tahun 2022 Terdapat 24 Perda yang di Tegakkan dengan Capaian sebesar 100%. Selanjutnya, untuk indikator ketenteraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2021 terdapat 23 kasus yang masuk dan 23 kasus yang tertangani dengan persentase 100%. Selanjutnya, di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak satu kasus menjadi 22 Kasus Pelanggaran yang masuk dan yang 22 Kasus Pelanggaran yang tertangani terdiri dari pelanggaran PP No 10 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sebanyak 15 Kasus yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Paringin Selatan Desa Lingsir 4 Kasus, Kecamatan Paringin Desa Sungai Ketapi 5 kasus, Kelurahan Paringin Kota 1 Kasus Desa Dahai 2 Kasus Kecamatan Batu Mandi Desa Mampari sebanyak 3 kasus dan Pelanggaran Perda No 5 Tahun 2066 Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 kasus yang tersebar pada 2 Kecamatan Yaitu kecamatan Paringin Desa sungai ketapi 3 Kasus Desa Dahai 1 Kasus dan Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir sebanyak 3 Kasus. Penurunan Angka pelanggran K3 tidak terlepas dari Patroli pengamanan wilayah secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pihak jajaran Satpol PP Kabupaten Balangan dan juga Sosialisasi tentang Perda dan Perkada pada Daerah Daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 2. 44. Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2.355	2.355	2.355	2.355	2.338	2.355
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	7 (100%)	32 (100)	29 (100)	23 (100)	22 (100%)	20 (100%)
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	78 Desa	189 Desa	61 Desa	10 Desa	20 Desa	
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	
5	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2023

Indikator ketenteraman dan ketertiban umum selain terkait disiplin Perda maupun perlindungan masyarakat dalam ranah ketaatan ketertiban umum, terkait juga dengan kebencanaan. Tahun 2021 untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terdapat 29 kejadian. Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian, dan 2019 160 kejadian. Perkembangan pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat angka penurunan kejadian, hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan membakar lahan di tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali terdapat peningkatan sejumlah 10 desa, kejadian bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2022 didominasi oleh faktor human error. Respon Time Rate selama 15 menit dapat dijangkau didukung beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, lokasi yang mudah dijangkau, dan adanya akses pendukung menuju tempat kejadian. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) manajemen pada wilayah kebakaran pada tahun 2018 hingga 2022 selama 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi bencana kebakaran. Pada tahun 2022 waktu tanggap juga masih dapat dipenuhi selama 15 menit dikarenakan masih terjangkaunya lokasi kejadian dengan basecamp Damkar.

Selanjutnya, urusan pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik. Untuk mencapai tujuan terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam Masyarakat

ditargetkan tidak ada konflik sosial bernuansa SARA . Pada tahun 2018 -2023 tidak ada konflik yang terjadi walaupun potensi konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bisa muncul akan tetapi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan kerjasama semua sektor dan pihak.

Tabel 2. 45. Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	-	-	-	100%	100%	100
3	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	-	-	-	42	44	
4	Persentase Ormas yang Aktif	-	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase Parpol yang Aktif	-	-	-	81%	100%	100%
6	Tingkat Partisipasi politik masyarakat	-	-	-	1,2%	2,9%	7,8%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, 2023

Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk mempertahankan angka konflik sosial bernuansa SARA dalam posisi 0 (nol) konflik, dengan menindaklanjuti dan menyelesaikan semua potensi konflik yang muncul dan melakukan pemetaan terhadap Daerah rawan konflik sebanyak 8 (delapan) Kecamatan dengan capaian 100%. Selain itu juga dengan meningkatkan rasio tempat ibadah yaitu untuk tahun 2021 dan 2022 dimana ada 42 dan 44 tempat ibadah untuk 10.000 penduduk, dengan terus bertambahnya tempat ibadah yang ada di Kabupaten Balangan diharapkan akan meningkatkan kerukunan umat beragama sehingga potensi konflik yang muncul bisa berkurang, selain itu juga akan meningkatkan peran dan fungsi Ormas dan Parpol untuk mendukung program pemerintah.

Untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Balangan masih rendah, dikarenakan masih rendahnya Sosialisasi tentang Politik dan Pemerintahan Umum oleh Kesbangpol Kabupaten Balangan terlihat dari capaian kinerja pada Tahun 2021 dan 2022. Sehingga diperlukan terobosan dan Inovasi program dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik Masyarakat dan pembinaan serta pengawasan Ormas.

F. Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan untuk di Kabupaten Balangan hanya menangani 9 jenis PPKS yang totalnya pada 2023 berjumlah 60.942 orang. Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan yang terdiri dari Anak Terlantar 59 orang, Anak Berlawanan dengan Hukum 8 orang, Lanjut Usia 3.701 orang, Penyandang Disabilitas 1.129 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 orang, Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 62 orang, Fakir miskin 54.289 orang dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 Orang. Untuk dapat melihat secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46. PPKS Yang Tertangani Tahun 2023

No	PPKS	Jumlah PPKS (orang)	Jumlah PPKS yang Tertangani (orang)
1	Anak Terlantar	59	33
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	8	8
3	Lanjut Usia	3.701	284
4	Penyandang Disabilitas	1,129	39
5	Korban Bencana Alam	21	21
6	Korban Bencana Sosial	37	37
7	Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi	62	52

No	PPKS	Jumlah PPKS (orang)	Jumlah PPKS yang Tertangani (orang)
8	Fakir Miskin	54.289	35.578
9	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.636	150
	Jumlah	60.942	36.202

Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat diperoleh informasi dari 9 Jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan dengan Jumlah PPKS per tahun 2023 adalah 60.942 orang dan Jumlah PPKS yang ditangani per tahun 2022 berjumlah 36.202 orang. Pencapaian pelayanan terhadap Persentase PPKS yang Tertangani pada Dinas Sosial, P3A, PMD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar 59,40% dari target 70,95%. Hal ini sudah mencakup 36.202 Orang PPKS atau 59.40% dari keseluruhan sembilan jumlah PPKS yang ada dengan rincian 33 orang Anak Terlantar, 8 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lanjut Usia 284 orang, Penyandang Disabilitas 39 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 Orang, dan Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi 52 orang. PPKS yang semua terlayani hanya korban bencana alam, korban bencana social, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun masih belum bisa mencakup pada pelayanan seluruh 9 jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan, terdapat penurunan capaian kinerja dari 68,72% menjadi 59,40% atau kenaikannya sebesar 9,32%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pelayanan PPKS diantaranya adanya kemudahan melalui upaya Inovasi aplikasi “Layar si Balang”. Inovasi tersebut memudahkan pelaporan dan keterbukaan bagi masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan atau ingin mengajukan pendaftaran DTKS dan berdampak pada berfungsinya pelayanan yang optimal. Selain adanya optimalisasi pelayanan yang hadir karena Inovasi, hal yang bersifat pelayanan rutin seperti pemberian bantuan alat bantu, sembako, dan pelayanan lainnya terhadap PPKS dapat berjalan optimal didorong adanya keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Sosial dalam kuota tambahan pemberian alat bantu untuk disabilitas dan lansia dan kemudahan akses kepada PPKS pemerlu panti rehabilitasi sosial.

Tabel 2. 47. Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PPKS yang tertangani	58,89%	65,84%	40,92%	54,91%	68,72%	59,40%
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah PPKS (Jiwa)	18,458	18,286	47,523	96.059	68.334	60.942
5	Jumlah Penerima Bantuan (PKH & BPNT)	9,775	9,694	9,818	10.790	10.356	11.984

Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023

Mengacu pada data yang disajikan pada tabel diatas terkait Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan Jumlah PPKS terbanyak pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah PPKS mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satu jenis PPKS yaitu Korban Bencana Alam pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari segi jumlah, penyebabnya dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Balangan mengalami peristiwa bencana alam yang besar dan berdampak luas.

Selain itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 juga sangat dibutuhkan kemudahan dalam mengakses data dan kriteria

penerima bantuan sosial sesuai dengan karakteristik di lingkup Kabupaten Balangan. Ketika pemerintah Daerah telah memiliki secara mandiri data masyarakat miskin tersebut, maka SKPD yang berkaitan maupun pihak pemanfaat lainnya akan mudah melakukan analisis untuk penentuan kebijakan dan perencanaan pada pengelolaan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan data tersebut masih terhitung panjang, perlunya sumber daya manusia yang mumpuni terkait data dan koordinasi yang baik harus segera dipersiapkan dengan menyusun timeline target pencapaian di masing-masing kegiatan yang mendukung pada Bidang Sosial. Koordinasi dan apabila diperlukan terjalinnya kerjasama dengan SKPD yang bersinggungan maupun dengan eksternal yang mendukung keberlangsungan database kemiskinan Daerah.

Selanjutnya penyebab belum optimalnya jangkauan PPKS juga dikarenakan lokasi penjangkauan yang tidak mudah untuk dijangkau dikarenakan kondisi topografi beberapa wilayah di Kabupaten Balangan yang cukup sulit untuk dijangkau. Meskipun capaian cakupan pelayanan PPKS pada Bidang Sosial sudah menunjukkan realisasi yang positif, masih diperlukan kerja keras dari Bidang Sosial terkait pengelolaan data dan pemenuhan standar. Pemenuhan cakupan SPM juga masih belum optimal, Kabupaten Balangan belum tersedianya rumah singgah atau shelter untuk menaungi PPKS di luar panti yang nantinya dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, makanan, dan medis kejiwaannya selama maksimal tujuh hari sesuai standar yang ditetapkan. Karena belum terpenuhinya rumah singgah lingkup Kabupaten Balangan, beberapa pelayanan yang bersifat luar panti masih belum bisa optimal. Jenis PPKS yang mendapatkan layanan rumah singgah adalah pelayanan ODGJ setelah dilaksanakan perawatan di rumah sakit, anak dan lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti.

Tabel 2. 48. Rekapitulasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2022

NO	PSKS	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat	45
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	38
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	8
5	Karang Taruna	2.431
6	Satuan Bhakti Pekerja Sosial	1
7	Keluarga Pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	10
10	Penyuluh Sosial	4
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	8
12	Dunia Usaha	6
JUMLAH		2.551

Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023

2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49. Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	4	4	9	7	3
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	4	4	4	5	2

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Besaran Pencari Kerja Terdaftar	2136	3001	705	2331	2137
5	Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar	-	-	696	1006	259
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1,690	2,989	453	164	770
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	3,005	2,931	5,898	2931	2931
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	15	18	7	8	9
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	592	544	192	192	224
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	300	60	128	160	48
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	-	350	32	-	48
12	Besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor Tambang dan penggalian	-	-	-	-	4675

Sumber: DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan, 2022

Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2022 berjumlah 3 kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut : 1 Kasus dari PT. Kerabat Putera Balangan, 2 Kasus dari PT. SIS Site Sera. Besaran pencari kerja terdaftar tidak sebanding dengan besaran kesempatan kerja/ lowongan kerja terdaftar di sektor formal setiap tahunnya terlihat juga dari besaran data penempatan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, dari segi besaran pelatihan yang dilaksanakan masih lebih fokus untuk pemenuhan kesempatan kerja Formal/Industri, sementara pelatihan yang mendukung penyerapan Tenaga Kerja sektor Non Formal yang potensi lebih besar belum optimal.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 1 kasus. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada www.wajiblapor.kemnaker.go.id terdapat 2.931 orang karyawan perusahaan yang, didaftarkan oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 244 orang, dan tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kemasyarakatan berjumlah 58 orang. Serapann Tenaga Kerja pada Sektor Pertambangan dan Penggalian masih jauh kalah disbanding besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor lainnya seperti Non Formal,, padahal sektor Pertambangan adalah penyumbang terbesar terhadap PDRb kabupaten/ pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Tabel 2. 50. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Tahun 2022

Sektor	Jumlah
A. Pertanian. Perkebunan. Kehutanan. Perburuan & Perikanan	31.174
B. Pertambangan dan Penggalian	4.675
C. Industri Pengolahan	2.307
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	463
F. Konstruksi	2.752
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8.255
H. Transportasi dan Pergudangan	759
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.434
J. Informasi dan Komunikasi	334

Sektor	Jumlah
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	253
L. Real Estate	75
M,N. Jasa Perusahaan	1.933
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.021
P. Jasa Pendidikan	4.986
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.350
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.166
Kosong / Diluar range	174
Total	70.111

Sumber: DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan, 2022

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut adalah keterlibatan dalam upaya Kabupaten dalam Kota Layak Anak, yang dimana Kabupaten Balangan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya tingkat pratama menjadi tingkat madya di tahun 2022 bulan Agustus lalu. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan muara sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Evaluasi KLA terdiri dari a. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600), b. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700), c. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800) d. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900) dan KLA (nilai 901-1000). Guna mencapai kategori nindya, pemerintah Daerah perlu melakukan sinergi dengan menggandeng perangkat Daerah, kelompok media, dan dunia usaha.

Tabel 2. 51. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018–2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80,8%	80,2%	94,88%	94,92%	80,43%
2	Pekerja Perempuan dilembaga pemerintah	-	-	-	1477	1521
3	Jumlah pekerja Perempuan (SWASTA+PEMERINTAH)	-	-	-	1556	1891
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	16%	16%	16%	16%
5	Jumlah kursi DPRD perempuan	3	4	4	4	4
6	Total kursi anggota dewan	25	25	25	25	25
7	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	19,1%	19,8%	5,12%	5,08%	19,57
8	Rasio KDRT	0,09%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
9	Data Kekerasan Anak	13 Anak	17 Anak	16 Anak	14 Anak	13 Anak
10	Partisipasi angkatan kerja perempuan	68,33%	57,12%	44,85%	65,55%	61,66%
11	Jumlah KK Perempuan	8882 KK	8982 KK	9082 KK	9358 KK	10061 KK
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					
13	Jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	13	14	16	21	19
14	Jumlah perempuan dan anak yang dilayani	13	14	16	21	19
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg harusnya mendapatkan pelayanan di puskesmas/rs	5	9	9	11	9
17	Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg mendapatkan pelayanan di puskesmas/RS	5	9	9	11	9
18	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan rehabsos	8	14	16	21	19
20	Jumlah korban kekerasan yg membutuhkan layanan rehabsos	8	14	16	21	19
21	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah perkara yg diputuskan dipengadilan yg berkaitan dg kekerasan thd anak dan perempuan	6	7	9	8	10
23	Jumlah perkara perempuan dan anak yang disidangkan	6	7	9	8	10
24	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum	6	9	8	10	8
26	Jumlah korban yang membutuhkan anggaran hukum	6	9	8	10	8
27	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
28	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan disatukan kembali ke keluarga/keluarga pengganti	1	1	1	1	0
29	Jumlah korban yg membutuhkan reintegrasi sosial	1	1	1	1	0

Sumber: *Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022*

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022, didapatkan informasi Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% ditahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2023, hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dari segi Jumlah Pekerja Perempuan dalam bidang swasta dan pemerintahan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan terkhusus Pekerja Perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan sehingga setelah dilakukan perhitungan persentase capaiannya lebih rendah dari pada hasil capaian tahun 2021.

Selanjutnya dalam perkembangannya adanya dinamika positif yang terjadi dari partisipasi perempuan dilembaga swasta, jika melihat data pada tabel diatas partisipasi perempuan mengalami peningkatan dari segi jumlah hal tersebut dapat dilihat pada data terakhir pada tahun 2022 dengan capaian 19,57% dimana mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan 5,08%. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa pada era sekarang dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan yang mulai memperhatikan keterwakilan perempuan dalam lembaga swasta dan para perempuan yang aktif untuk mau terlibat di dalam lembaga swasta dengan jumlah perempuan dilembaga swasta adalah 414 orang.

Indikator lainnya yang tidak kalah penting dan ini juga yang masih sangat menjadi perhatian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data yang ada dalam hal ini Data Kekerasan Anak dari tahun ke tahun mengalami trend naik turun namun dari jumlahnya tidak signifikan. Data kekerasan anak yang diperoleh berdasarkan laporan yang masuk pada tahun 2022 ada 13 anak yang mengalami kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi adalah para anak-anak tersebut mengalami pelecehan seksual. Beberapa hal yang dapat dijadikan faktor terjadinya kasus kekerasan tersebut baik dari segi sektor ekonomi , sosial serta segala kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi dan mobilisasi yang begitu cepat yang tanpa kita sadari menjadi fakto-faktor lainnya sehingga kasus kekerasan masih berlangsung.

Mengacu pada indikator yang lainnya dalam hal ini cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dari data yang diperoleh terkait jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 21 ke 19 yang melakukan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan data masih adanya laporan pengaduan terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak menjadi bukti bahwa masih sering terjadinya tindak kekerasan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan keterbukaan yang ada terkait tindak kekerasan yang terjadi dalam hal ini jika adanya peristiwa tersebut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mempertanggung jawabkan dan diberikan sanksi yang patas atas perbuatan tersebut. Jenis-jenis laporan pengaduan yang dilaporkan kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak 7 kasus dari 9 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari 7 kasus kekerasan terhadap perempuan. Saat ini yang perlu menjadi perhatian penting ketika adanya laporan pengaduan yang masuk dalam hal

ini pihak berwajib Kepolisian akan berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan terkait adanya kasus kekerasan perempuan dan anak, namun adanya keterbatasan yang kami memiliki dikarenakan sampai saat ini di Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga konselor dan psikolog klinis yang dapat membantu dalam memberikan pendampingan secara klinis terkait peristiwa tindakan kekerasan yang dialami.

Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2022 sebanyak 9 korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak pada tahun 2022 berjumlah 19 korban yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar.

Selanjutnya terkait Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari Jumlah perkara yang diputuskan dipengadilan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara dan telah disidangkan. Hal lain yang berkaitan dengan tersebut berkaitan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dimana jumlah korban mendapatkan layanan hukum pada tahun 2022 adalah 8 korban dan sisa korbannya diselesaikan secara kekeluargaan/ damai. Pendampingan telah diberikan dalam memberikan dukungan terhadap korban kekerasan tersebut namun yang masih perlu menjadi perhatian belum tersedianya tenaga ahli bidang hukum (paragel) dan Advokat yang bisa membantu pendampingan dalam proses bantuan hukum yang terjadi.

Cakupan reintegrasi sosial sebanyak 1 korban, dengan mencari orang tua/keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, upaya telah dilakukan terhadap para korban kekerasan perempuan dan anak dimana adanya MOU yang dilakukan dengan Kabupaten tetangga terkait Tenaga Konselor dan Psikolog Klinis dalam memberikan layanan pendampingan dalam hal klinis.

Tabel 2. 52. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	4,8%	7,25%	12,35%	18,01%	28,65%
2	Persentase Perkawinan Usia Anak	0,7%	1%	1,48%	1,01%	0,64%

Sumber: Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Jika melihat data yang telah disajikan diatas Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD setiap tahunnya capaiannya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 persentase berada pada 18,01% dan tahun 2022 28,65%. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Saat ini yang menjadi permasalahan yakni kurangnya pemahaman dalam mengenai Konsep Responsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).

Perkawinan Usia Anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk

mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara. Jika melihat capaian pada tahun 2021 Persentase perkawinan usia anak berada pada 1,01% dan pada tahun 2022 0,64%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi persentase mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Dari segi perlindungan perempuan dan anak telah melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan usia anak sebagai bentuk upaya agar masyarakat dapat mengetahui dampak-dampak yang timbul dari pernikahan usia anak yang terjadi. Per tahun 2022 terdapat 12 dispensasi nikah yang masuk melalui Kementerian Agama Kabupaten Balangan.

Saat ini permasalahan usia anak menjadi perhatian penting dikarenakan masih kuatnya ideologi, serta tradisi dan budaya setempat, strategi kemiskinan dan keberlangsungan hidup ekonomi, kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga yang terkadang tidak selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat dan Daerah bahwa pernikahan usia anak itu harus dicegah. Pencatatan dispensasi nikah masih terkendala pada belum selarasnya pendataan, baik dari Kemenag Kabupaten Balangan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa factor yang mempengaruhi, masih belum tersedianya pendataan dispensasi nikah terhadap pengajuan yang berasal dari selain agama islam, terbenturnya aturan pada pencatatan sipil dari segi usia sehingga belum bisa memiliki akta nikah maupun dokumen sejenis yang dapat mengakomodir. Kemudian belum selarasnya indikator yang melatar belakangi pada pencatatan ini. Sehingga kedepannya masih diperlukan koordinasi dan diskusi lebih jauh untuk mencapai keselarasan dan kesepakatan sehingga kedepannya dapat memudahkan analisis kebijakan dan perencanaan pencegahan terhadap perkawinan anak usia dini yang ada di Kabupaten Balangan.

C. Urusan Pangan

Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi akses, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas.

Beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang menggambarkan kondisi pangan di Kabupaten Balangan disajikan pada tabel di bawah. Indikator skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan meningkat, yang juga diikuti dengan meningkatnya skor PPH ketersediaan.

Tabel 2. 53. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Skor PPH Konsumsi	83,2	86,0	87,2	86,5	89,1	89,60
2	Skor PPH Ketersediaan	85,14	85,18	83,48	83,22	85,06	85,78
3	Perkembangan Desa Rentan Pangan	45	35	29	23	18	17
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	4,05	3,35	3,45	2,96	4,65	6,04

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dan BPS RI, 2023

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Data pada tabel di atas menunjukkan Prevalensi

Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Balangan meningkat signifikan dari tahun 2021 ke 2023. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi. Tabel 2.58

Tabel 2. 54. Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022

Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)					Kebutuhan Tahun (Ton)				Surplus/ Defisit (Ton)			
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Beras	117.345	96.558	103.633	100.088	74,741	13.980	14.450	14.643	14.740	103.365	82.108	88.990	85
Gula Pasir*	1.238	1.253	1.248	1.256	1,401	1.176	1.216	1.232	1.240	62	37	16	
Minyak goreng*	1.256	1.255	1.315	1.273	1272	1.202	1.242	1.259	1.267	54	13	56	
Kacang Merah*	452	453	471	460	663	417	431	437	440	35	22	34	
Cabe merah/rawit	14.321	15.125	15.432	14.752	798	13.980	14.450	14.643	14.740	341	675	789	
Daging Sapi	276	207	248	225	5,232	228	236	239	240	48	(29)	9	(
Daging Ayam	1.121	1.088	1.410	1.785	76,983	903	934	946	952	218	154	464	8
Telur Ayam Ras	1.032	1.268	1.281	1.189	83,202	898	929	941	947	134	339	340	2
Kacang Gung	54.068	94.683	16.374	38.660	16,815	162,87	194,25	896,33	159	53.905,13	94.488,75	15.477,67	38
Kacang Kedelai	7.809,45	325,54	306,70	-	61	712,25	712,25	479	321	7.097,2	(386,71)	(172,3)	(3
Kacang Hijau	33,48	37,30	93	-	-	369,76	12,75		40	(336,28)	24,55		(
Kacang Tanah	392,11	293,90	199,07	41,02	-	497,26	129,5		212	(105,15)	164,4		(17
Ubi Kayu	3.403	5.963	2.396	490	478	513,68	1.359,75		373	2.889,32	4.603,25		1
Ubi Jalar	915	915	275	-	-	63,75	777		185	851,25	138		(1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2023

Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2018-2021 cukup baik namun di tahun 2022 ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah daging ayam dan telur ayam ras. Komoditi yang mengalami defisit terbesar yaitu cabe merah/rawit. Untuk komoditi Daging Sapi yang pada tahun 2019 mengalami kekurangan di tahun 2022 sudah meningkat signifikan dan mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan.

Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan-bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu, disebabkan waktu tanam yang masih tergantung air hujan/musim. Hal tersebut dikarenakan sistem tata kelola air yang belum optimal. Akibatnya ada waktu waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam atau musim tanam, yang bersamaan. Sehingga menyebabkan menurunnya jumlah produksi pertanian. Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian, dari hasil produksi pertanian di Kab Balangan - di luar dari konsumsi keluarga- selebihnya di jual petani ke distributor luar kab sehingga aliran rantai distribusi pertanian menjadi panjang, juga masih rendahnya tingkat harga yang diterima petani, harga di tingkat petani selalu turun di puncak-puncak panen, dan besarnya biaya transportasi dan akomodasi.

Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan, karena selama pola pertanian masih menggunakan bahan kimia, berupa pupuk, herbisida, pestisida, fungisida, zat pengatur tumbuh, dll sehingga mempengaruhi hasil yang di panen mengandung residu zat kimia, dr pengujian PSAT menunjukkan adanya residu zat kimia terhadap bahan asal tumbuhan.

D. Urusan Bidang Pertanahan

Selama lima tahun terakhir, kinerja pemerintah di bidang pertanahan cukup baik yang ditunjukkan dengan capaian beberapa indikator. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

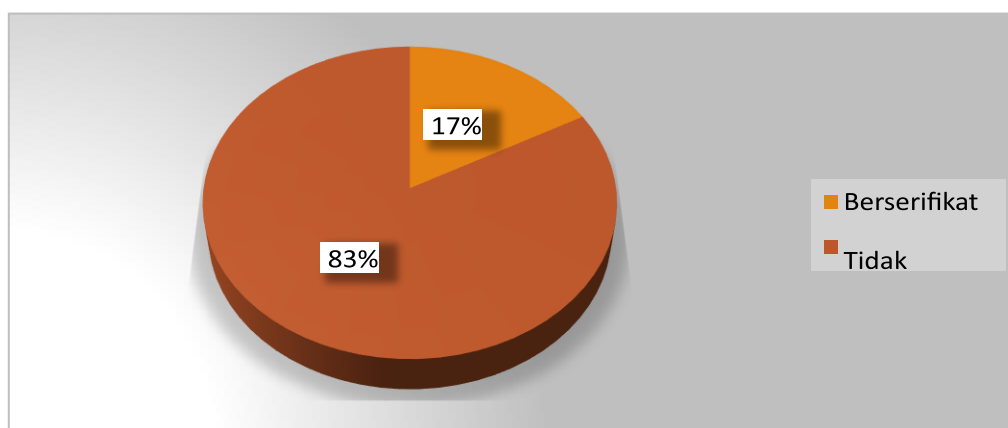
Tabel 2. 55. Capaian Kinerja Pertanahan 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
----	-----------	------	------	------	------	------

1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	7,51%	7,84%	9,39%	10,69%	17,00%
2	Status tanah tidak bermasalah	48	34	19	32	38
3	Status tanah bermasalah	2	4	2	1	3

Sumber: Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023

Pada Tahun 2022, dari keseluruhan asset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang sebanyak 1.544 persil, baru terdapat 160 persil yang bersertifikat dan 102 persil tanah yang diproses untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan.



Gambar 2. 30. Sertifikasi Tanah Pemda Tahun 2022

Sumber: Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023

Hingga Tahun 2022, dari 183 persil aset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang dilakukan inventarisasi oleh Bidang Pertanahan, terdapat 12 persil tanah yang dikategorikan bermasalah. Bermasalah dalam konteks ini adalah persil tanah tersebut diklaim sebagai tanah milik oleh masyarakat dan tidak dihibahkan sebelumnya kepada Pemerintah Daerah.

2.5 Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan Daerah merujuk pada komoditas atau barang yang dihasilkan oleh suatu Daerah yang memiliki potensi tinggi dan nilai ekonomis signifikan. Produk-produk ini biasanya merupakan hasil dari keunggulan sumber daya alam, keahlian lokal, atau kekayaan budaya yang dapat dipasarkan baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. PUD dimiliki oleh suatu wilayah, dengan nilai ekonomi yang tinggi dan kemampuan bersaing, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Produk ini dihasilkan berdasarkan kelayakan teknis seperti ketersediaan bahan baku dan pasar, serta memanfaatkan talenta lokal dan dukungan kelembagaan, termasuk teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi sosial budaya. Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk membangun dialog dan kemitraan di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, guna memperkenalkan potensi Daerah yang belum terekspos.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi Daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/Daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi Daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan Daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan Daerah menggambarkan kemampuan Daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi Daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa

suatu Daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi Daerah. Esensi atas penciptaan produk-produk unggulan di Daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di Daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap Daerah lain, termasuk juga Daerah perbatasan (Asmara, 2004).

Dasar penentuan sektor basis dan/atau unggulan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada level sektor/lapangan usaha. Dengan demikian, hasil analisis sektor yang terpilih adalah bersifat indikatif karena tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan dari subsektor yang ada masing-masing sektor. Analisis Symmetric Location Quotient(SymLQ) secara prinsip sama dengan Location Quotient (LQ), yaitu untuk menganalisis sektor unggulan dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan. Analisis SymLQ ini digunakan karena penggunaan metode LQ selama ini menghasilkan nilai indeks yang tidak simetris, jika dilakukan analisis lebih lanjut maka cenderung tidak memenuhi uji normalitas. SymLQ merupakan modifikasi sederhana dari rumus Location Quotient (LQ) dengan membuat indeks LQ simetrik di sekitar angka nol berdasarkan rumus Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) yang dikembangkan oleh Dalum dkk. pada tahun 1998. SymLQ akan lebih memudahkan dalam melakukan mapping sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena dibuat dalam skala -1 s.d. 1 ($-1 \leq \text{SymLQ}_{ij} \leq 1$), sehingga simetris. Jika nilai SymLQ > 0 (positif), maka sektor tersebut merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif, demikian sebaliknya jika sektor tersebut:

$$LQ = \frac{PDRB_i^R / PDRB^R}{PDRB_i^N / PDRB^N}$$

Keterangan:

$PDRB^R$ = Total PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari)

$PDRB_i^R$ = PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari) sektor i

$PDRB^N$ = Total PDRB Provinsi (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari)

$PDRB_i^N$ = PDRB Provinsi sektor I (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari)

Kabupaten Balangan, yang terletak di Kalimantan Selatan, memiliki berbagai produk unggulan Daerah yang mencerminkan kekayaan alam serta potensi ekonomi lokal. Produk-produk ini berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga kerajinan tangan, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa produk unggulan Daerah Kabupaten Balangan:

Tabel 2. 56. PDRB Kabupaten Balangan

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.027,02	Rp1.030,66	Rp1.071,80
Pertambangan dan Penggalian	Rp6.379,57	Rp6.774,16	Rp7.019,43
Industri Pengolahan	Rp146,76	Rp153,47	Rp158,90
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp2,65	Rp2,85	Rp3,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp21,38	Rp22,03	Rp22,68
Konstruksi	Rp342,18	Rp356,72	Rp382,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp412,95	Rp435,79	Rp464,84
Transportasi dan Pergudangan	Rp147,55	Rp156,52	Rp166,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp27,64	Rp29,15	Rp31,80
Informasi dan Komunikasi	Rp128,69	Rp135,69	Rp143,44

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp25,86	Rp26,27	Rp27,95
Real Estate	Rp86,25	Rp89,43	Rp94,38
Jasa Perusahaan	Rp5,51	Rp5,91	Rp6,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp332,17	Rp341,82	Rp360,56
Jasa Pendidikan	Rp271,28	Rp286,14	Rp299,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp78,70	Rp83,75	Rp88,88
Jasa lainnya	Rp41,69	Rp44,30	Rp47,04
PDRB	Rp9.477,83	Rp9.974,65	Rp10.390,60
PDRB Tanpa Migas			

Tabel di atas menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di suatu Daerah untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, dalam satuan miliar rupiah. Terdapat berbagai sektor ekonomi yang tercantum, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menunjukkan nilai PDRB sebesar Rp 1.027,02 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp 6.379,57 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023.

Industri Pengolahan mengalami kenaikan dari Rp 146,76 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 168,90 miliar di tahun 2023. Sektor Konstruksi mencatatkan nilai PDRB Rp 342,18 miliar pada tahun 2021, dengan sedikit peningkatan menjadi Rp 362,85 miliar pada tahun 2023. Selain itu, total PDRB di Daerah tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dari Rp 9.477,83 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 10.300,60 miliar pada tahun 2023. Tabel ini mencerminkan kinerja ekonomi yang semakin baik di berbagai sektor, menandakan adanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam periode tersebut.

Tabel 2. 57. PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp18.614,34	Rp18.911,08	Rp19.510,14
Pertambangan dan Penggalian	Rp33.226,73	Rp35.078,57	Rp36.171,09
Industri Pengolahan	Rp17.277,92	Rp17.850,34	Rp18.387,03
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp171,40	Rp184,86	Rp199,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp601,69	Rp630,96	Rp660,54
Konstruksi	Rp10.364,04	Rp10.791,13	Rp11.469,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp12.320,82	Rp13.202,32	Rp14.017,15
Transportasi dan Pergudangan	Rp7.919,63	Rp9.304,10	Rp10.344,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp2.705,83	Rp2.966,30	Rp3.241,51
Informasi dan Komunikasi	Rp5.908,86	Rp6.319,21	Rp6.734,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp4.367,68	Rp4.384,93	Rp4.762,90
Real Estate	Rp3.318,73	Rp3.513,45	Rp3.735,36
Jasa Perusahaan	Rp835,41	Rp898,30	Rp966,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp7.144,27	Rp7.182,47	Rp7.391,99
Jasa Pendidikan	Rp6.211,32	Rp6.429,09	Rp6.656,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp2.893,56	Rp3.047,17	Rp3.220,53
Jasa lainnya	Rp1.542,36	Rp1.646,94	Rp1.761,26

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
PDRB	Rp135.424,59	Rp142.341,22	Rp149.230,96
PDRB Tanpa Migas			

Tabel 2. 58. Tabel LQ Tambang Kabupaten Balangan

SEKTOR PDRB	PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.030,66	Rp1.071,80	Rp18.911,08	Rp19.510,14	0,78899032	Sektor Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	Rp6.774,16	Rp7.019,43	Rp35.078,57	Rp36.171,09	2,78713855	Sektor Basis
Industri Pengolahan	Rp153,47	Rp158,90	Rp17.850,34	Rp18.387,03	0,12411681	Sektor Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp2,85	Rp3,09	Rp184,86	Rp199,86	0,22205006	Sektor Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp22,03	Rp22,68	Rp630,96	Rp660,54	0,49313092	Sektor Non Basis
Konstruksi	Rp356,72	Rp382,85	Rp10.791,13	Rp11.469,97	0,47938526	Sektor Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp435,79	Rp464,84	Rp13.202,32	Rp14.017,15	0,47627971	Sektor Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	Rp156,52	Rp166,70	Rp9.304,10	Rp10.344,24	0,231449	Sektor Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp29,15	Rp31,80	Rp2.966,30	Rp3.241,51	0,1408958	Sektor Non Basis
Informasi dan Komunikasi	Rp135,69	Rp143,44	Rp6.319,21	Rp6.734,37	0,30590855	Sektor Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp26,27	Rp27,95	Rp4.384,93	Rp4.762,90	0,0842808	Sektor Non Basis
Real Estate	Rp89,43	Rp94,38	Rp3.513,45	Rp3.735,36	0,36288233	Sektor Non Basis
Jasa Perusahaan	Rp5,91	Rp6,41	Rp898,30	Rp966,41	0,09526095	Sektor Non Basis

SEKTOR PDRB	PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp341,82	Rp360,56	Rp7.182,47	Rp7.391,99	0,70054249	Sektor Non Basis
Jasa Pendidikan	Rp286,14	Rp299,85	Rp6.429,09	Rp6.656,62	0,64694684	Sektor Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp83,75	Rp88,88	Rp3.047,17	Rp3.220,53	0,39636473	Sektor Non Basis
Jasa lainnya	Rp44,30	Rp47,04	Rp1.646,94	Rp1.761,26	0,38358547	Sektor Non Basis
PDRB	Rp9.974,65	Rp10.390,60	Rp142.341,22	Rp149.230,96	1	
PDRB Tanpa Migas						

Tabel di atas membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2022 dan 2023, dengan data yang disajikan dalam satuan miliar rupiah, di mana setiap sektor PDRB dari kedua Daerah tersebut dicantumkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi yang berbeda; misalnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan memiliki nilai PDRB sebesar Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022, yang meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sementara pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Kabupaten Balangan mencatatkan PDRB sebesar Rp 6.774,16 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi pada sektor yang sama, yakni Rp 35.078,57 miliar pada tahun 2022 dan Rp 36.171,09 miliar pada tahun 2023, yang menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor basis yang penting bagi perekonomian Kabupaten Balangan dengan koefisien basis mencapai 2,78713856, sementara sektor lainnya dalam tabel sebagian besar dikategorikan sebagai sektor non-basis, dengan nilai PDRB di sektor Industri Pengolahan yang meningkat dari Rp 153,47 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 158,90 miliar pada tahun 2023, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menunjukkan peningkatan dari Rp 2,85 miliar menjadi Rp 3,09 miliar dalam periode yang sama, di mana semua informasi ini dapat memberikan wawasan penting bagi perencanaan dan pengembangan ekonomi Daerah dengan melihat potensi pertumbuhan di masing-masing sektor.

Tabel 2. 59. Tabel LQ Tanpa Tambang Kabupaten Balangan

SEKTOR PDRB	PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.030,66	Rp1.071,80	Rp18.911,08	Rp19.510,14	1,84238842	Sektor Basis
Industri Pengolahan	Rp153,47	Rp158,90	Rp17.850,34	Rp18.387,03	0,289827867	Sektor Non Basis

SEKTOR PDRB	PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp2,85	Rp3,09	Rp184,86	Rp199,86	0,518513926	Sektor Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp22,03	Rp22,68	Rp630,96	Rp660,54	1,151520719	Sektor Basis
Konstruksi	Rp356,72	Rp382,85	Rp10.791,13	Rp11.469,97	1,119422928	Sektor Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp435,79	Rp464,84	Rp13.202,32	Rp14.017,15	1,112171085	Sektor Basis
Transportasi dan Pergudangan	Rp156,52	Rp166,70	Rp9.304,10	Rp10.344,24	0,540461597	Sektor Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp29,15	Rp31,80	Rp2.966,30	Rp3.241,51	0,329008852	Sektor Non Basis
Informasi dan Komunikasi	Rp135,69	Rp143,44	Rp6.319,21	Rp6.734,37	0,714333687	Sektor Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp26,27	Rp27,95	Rp4.384,93	Rp4.762,90	0,196805929	Sektor Non Basis
Real Estate	Rp89,43	Rp94,38	Rp3.513,45	Rp3.735,36	0,847374396	Sektor Non Basis
Jasa Perusahaan	Rp5,91	Rp6,41	Rp898,30	Rp966,41	0,222445919	Sektor Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp341,82	Rp360,56	Rp7.182,47	Rp7.391,99	1,635851975	Sektor Basis
Jasa Pendidikan	Rp286,14	Rp299,85	Rp6.429,09	Rp6.656,62	1,510699606	Sektor Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp83,75	Rp88,88	Rp3.047,17	Rp3.220,53	0,925559889	Sektor Non Basis
Jasa lainnya	Rp44,30	Rp47,04	Rp1.646,94	Rp1.761,26	0,895718758	Sektor Non Basis
PDRB Tanpa Tambang	Rp3.200,49	Rp3.371,17	Rp107.262,65	Rp113.059,87	1	
PDRB Tanpa Tambang dan Migas						

Tabel 2. 60. Tabel *Shift Share* Kabupaten Balangan

SEKTOR PDRB	PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Shift Share			
	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)	PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi	PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan	DS (Differential Shift) / Daya Saing	SS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.030,66	Rp1.071,80	Rp18.911,08	Rp19.510,14	Rp55,70	-Rp23,06	Rp8,49	Rp41,14
Industri Pengolahan	Rp153,47	Rp158,90	Rp17.850,34	Rp18.387,03	Rp8,29	-Rp3,68	Rp0,82	Rp5,43
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp2,85	Rp3,09	Rp184,86	Rp199,86	Rp0,15	Rp0,08	Rp0,01	Rp0,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp22,03	Rp22,68	Rp630,96	Rp660,54	Rp1,19	-Rp0,16	-Rp0,38	Rp0,65
Konstruksi	Rp356,72	Rp382,85	Rp10.791,13	Rp11.469,97	Rp19,28	Rp3,16	Rp3,69	Rp26,13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp435,79	Rp464,84	Rp13.202,32	Rp14.017,15	Rp23,55	Rp3,34	Rp2,15	Rp29,05
Transportasi dan Pergudangan	Rp156,52	Rp166,70	Rp9.304,10	Rp10.344,24	Rp8,46	Rp9,04	-Rp7,32	Rp10,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp29,15	Rp31,80	Rp2.966,30	Rp3.241,51	Rp1,58	Rp1,13	-Rp0,05	Rp2,65
Informasi dan Komunikasi	Rp135,69	Rp143,44	Rp6.319,21	Rp6.734,37	Rp7,33	Rp1,58	-Rp1,16	Rp7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp26,27	Rp27,95	Rp4.384,93	Rp4.762,90	Rp1,42	Rp0,84	-Rp0,58	Rp1,68
Real Estate	Rp89,43	Rp94,38	Rp3.513,45	Rp3.735,36	Rp4,83	Rp0,81	-Rp0,70	Rp4,95
Jasa Perusahaan	Rp5,91	Rp6,41	Rp898,30	Rp966,41	Rp0,32	Rp0,13	Rp0,05	Rp0,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp341,82	Rp360,56	Rp7.182,47	Rp7.391,99	Rp18,47	-Rp8,50	Rp8,77	Rp18,74

Tabel sektor non tambah dapat dilihat pada tabel 2.7. Pada tabel di atas menampilkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan data harga konstan 2010 dalam satuan miliar rupiah, untuk tahun 2022 dan 2023. Selain itu, tabel ini juga menyertakan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non-basis di Kabupaten Balangan.

Tabel di atas menggambarkan analisis ekonomi Kabupaten Balangan dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut. Tabel ini juga membandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperlihatkan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor termasuk dalam kategori sektor basis atau sektor non-basis di Kabupaten Balangan. Sektor basis adalah sektor yang kontribusinya lebih besar di suatu Daerah dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di wilayah yang lebih luas (dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan). Sebaliknya, sektor non-basis adalah sektor yang kontribusinya di Daerah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas.

Pada tahun 2022 dan 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan menunjukkan peran penting dalam perekonomian Daerah ini. Dengan PDRB mencapai Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kabupaten. Nilai Location Quotient (LQ) sebesar 1,84238842 mengindikasikan bahwa sektor ini termasuk sektor basis, yang artinya kontribusinya di Balangan jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Selain sektor pertanian, sektor Konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang Rp 356,72 miliar terhadap PDRB Balangan, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 382,85 miliar. Nilai LQ 1,119422928 menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor basis, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur sangat penting di Daerah ini. Menariknya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga merupakan sektor yang kuat di Kabupaten Balangan. Dengan kontribusi sebesar Rp 334,62 miliar pada tahun 2022 dan Rp 360,56 miliar pada tahun 2023, sektor ini mendapatkan nilai LQ sebesar 1,635851975, menjadikannya sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan lokal memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi.

Selain itu, sektor Jasa Pendidikan juga memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Dengan PDRB Rp 286,14 miliar pada 2022 dan Rp 299,85 miliar pada 2023, sektor ini terus berkembang dengan nilai LQ 1,510699606, yang berarti sektor pendidikan juga menjadi sektor basis di Balangan. Namun, tidak semua sektor di Kabupaten Balangan adalah sektor basis. Beberapa sektor seperti Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas termasuk dalam kategori sektor non-basis. Sebagai contoh, sektor industri pengolahan hanya memiliki nilai LQ 0,289827867, yang menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi andalan utama dalam perekonomian Balangan, meskipun sektor ini sangat penting di tingkat provinsi. Selain itu, sektor-sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi juga tergolong sebagai sektor non-basis, meskipun sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut di masa depan.

Tabel 2. 62. Tabel Perbandingan

Sektor	LQ Tanpa Tambang	SS	TK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			
Pertambangan dan Penggalian			
Industri Pengolahan			
Pengadaan Listrik dan Gas			
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			
Konstruksi			
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
Transportasi dan Pergudangan			
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			
Informasi dan Komunikasi			
Jasa Keuangan dan Asuransi			
Real Estate			
Jasa Perusahaan			
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
Jasa Pendidikan			
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
Jasa lainnya			
PDRB			
PDRB Tanpa Migas			

Keterangan :		
Subsektor Prima	Kuadran I	
Subsektor Berkembang	Kuadran II	
Subsektor Potensial	Kuadran III	

Warna kuning di beberapa sel, seperti di sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya, menunjukkan sektor-sektor dengan LQ yang signifikan. Artinya, sektor-sektor ini memiliki spesialisasi yang kuat dalam ekonomi lokal tanpa memperhitungkan sektor tambang. LQ (Location Quotient) adalah ukuran spesialisasi sektor ekonomi suatu wilayah dibandingkan dengan standar nasional atau regional. Kolom ini menggambarkan seberapa besar kontribusi suatu sektor tanpa memperhitungkan tambang.

Tabel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi ekonomi Daerah dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling dominan dan sektor mana yang masih membutuhkan dorongan. Penggunaan tiga indikator utama (LQ Tanpa Tambang, SS, dan TK) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran sektor-sektor dalam ekonomi:

- 1) Sektor Pertanian dan Perdagangan terlihat kuat dalam hal tenaga kerja dan LQ, menunjukkan bahwa mereka adalah sektor utama dalam ekonomi wilayah ini.

- 2) Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah memiliki kekuatan struktural dan juga potensi besar untuk berkembang lebih lanjut.
- 3) Sektor Pertambangan, meskipun penting, tampaknya menghadapi tantangan dalam hal kontribusi terhadap tenaga kerja.

Gambar ini secara keseluruhan menunjukkan analisis ekonomi yang fokus pada diversifikasi sektor tanpa memperhitungkan pertambangan, serta bagaimana sektor-sektor non-tambang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterangan mengenai kuadran memberikan wawasan tentang sektor mana yang harus difokuskan untuk investasi dan dukungan tambahan.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pembangunan Daerah adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup suatu wilayah atau Daerah secara menyeluruh. Tujuan utama dari pembangunan Daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur fisik dan sosial, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan Daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pembangunan Daerah juga mencakup pengembangan sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain aspek fisik dan ekonomi, pembangunan Daerah juga melibatkan peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebudayaan, dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Tujuan pembangunan guna untuk meningkatkan sektor bidang di setiap Daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia dengan kata lain pembangunan menjadi cara untuk dapat menghasilkan Inovasi-Inovasi yang baik bagi negara Indonesia. Manfaat dalam pembangunan Inovasi desa untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan SDM dan mutu Daerah agar dapat menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan

Pembangunan Daerah juga melibatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan perlindungan alam, konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem. Dalam rangka mencapai pembangunan Daerah yang sukses, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat penting. Dengan pendekatan partisipatif dan holistik, pembangunan Daerah dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi penduduk di suatu wilayah.

Pembangunan Daerah dan Inovasi saling terkait erat, di mana Inovasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan Daerah, dan sebaliknya, pembangunan Daerah yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya Inovasi. Peran Riset dan Inovasi sangat penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Riset dan Inovasi memiliki potensi untuk menghasilkan solusi baru, teknologi yang lebih efisien, dan produk atau layanan yang inovatif. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pengetahuan dan meningkatkan daya saing Daerah. Melalui Riset, Daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan Daerah untuk memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis yang diperoleh melalui Riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti.

3.1. Tantangan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya.

3.1.1. Pengembangan Infrastruktur Belum Optimal dan Merata

Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan indikator indeks infrastruktur wilayah dan indeks kualitas lingkungan hidup dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan infrastruktur saat ini masih harus dimaksimalkan perannya sehingga bisa optimal dan merata guna mendukung pertumbuhan dan penggerak perekonomian Daerah. Kondisi saat ini terkait infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan diantaranya persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi hanya 53,47%. Selanjutnya meskipun terjadi kenaikan persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%, tidak adanya penambahan persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C, Dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 masih sama yaitu hanya sebesar 58 persen,

Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 42,84 persen, Jumlah Titik Parkir di Kabupaten Balangan masih minim yaitu masih sebanyak 14 titik, masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik yaitu hanya sebesar 33,28% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R yaitu hanya sebesar 22,04% di tahun 2022 dan tidak adanya penambahan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya sebesar 3,91%.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan lingkungan yang mampu diwariskan dan berkelanjutan untuk masa depan. Berdasarkan pengukuran pada kualitas lingkungan hidup di Balangan pada tiga aspek air, udara dan lahan hanya kualitas udara yang memiliki kategori sangat baik sementara air dan lahan pada kategori sedang. Permasalahan yang perlu diatasi yaitu kualitas air dimana parameter Fecal Coli masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai serta kualitas lahan yang masih dikategori sedang karena belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau.

3.1.2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Balangan serta Perekonomian masih Didominasi oleh Sektor Pertambangan

Peningkatan Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran terbuka dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menurunnya angka pengangguran terbuka.

Berdasarkan data grafik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis hingga -2,47 persen, dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 3,16 persen, lalu pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 5,24 persen di tahun 2022, namun pada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,17 persen atau turun sebesar 1,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,84 persen.

Dalam pelaksanaannya sendiri pertumbuhan ekonomi Balangan masih sangat ditopang oleh Pertambangan khususnya batu bara. Terdapat kecenderungan meningkatnya peranan komoditas pertambangan, data tahun 2019 menunjukkan kontribusi 60,58 persen naik menjadi 73,73 persen pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 13,15 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi strukturekonomi ke sektor lain seperti Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian Daerah untuk kedepannya.

Kondisi saat ini terkait perekonomian non pertambangan yang perlu terus dibenahi diantaranya persentase kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 persentasenya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun menjadi hanya 7,68 persen pada tahun 2023 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 12,23 persen, persentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga demikian, meskipun pada tahun 2023 persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 5,97 persen, begitu pula dengan persentase kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 0,38 persen.

3.1.3. Masih adanya Pengangguran dan Kemiskinan

Upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Balangan masih perlu kerja keras dan upaya lebih besar lagi meskipun Tingkat Pengangguran di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 2,28 persen. Permasalahan lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 76,50. Berbagai upaya untuk terus menekan angka pengangguran dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Balangan melalui serangkaian pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan industri.

Masalah lain yang erat kaitannya dengan pengangguran yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada pada 5,22 persen, berarti turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,83 persen. Walaupun menunjukkan penurunan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Balangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan di Balangan berada pada urutan 4 tertinggi setelah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong.

Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap terus melakukan upaya Inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah program prioritas diantaranya dengan melakukan penambahan lapangan kerja, mengadakan pelatihan kerja, serta mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Balangan.

3.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah di Regional Kalimantan Selatan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan sebuah wilayah. Oleh sebab itu, sejak dahulu pembangunan SDM selalu menjadi prioritas dan menjadi tolok ukur kemajuan Daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM sebuah Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator IPM di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Kondisi terkini tahun 2023 menunjukkan IPM Kabupaten Balangan mencapai 72,97, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,20 di tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan masih berada pada urutan 5 terendah. Dengan kemampuan ekonomi dan keuangan Daerah semestinya pembangunan SDM di Kabupaten Balangan dapat lebih ditingkatkan.

Berbicara mengenai IPM, maka tidak lengkap bila tidak melihat sampai ke komponen pembentuknya yakni kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah serta usia harapan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk kualitas pendidikan jika dilihat pada IPM secara umum

kualitas pembangunan manusia di Balangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Kalsel Balangan masih berada di urutan ke-9 dan perlu upaya yang lebih optimal untuk sejajar dengan Daerah lainnya. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah capaiannya 8,03 naik sekitar 0,18 dari tahun 2022 sedangkan harapan lama sekolah capaiannya 12,82 naik sekitar 0,21 dari tahun 2022.

Selanjutnya, untuk kualitas kesehatan masyarakat Balangan dalam rangka mewujudkan peningkatan usia harapan hidup secara umum sudah menunjukkan taraf kesehatan yang baik, dimana untuk UHH pada tahun 2023 sebesar 73,69 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 73,42. Hal-hal yang perlu terus ditingkatkan diantaranya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan serta edukasi khususnya terhadap penanganan dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi stunting yang lebih massif serta penurunan angka kelahiran remaja yang masih tinggi di Balangan.

Komponen IPM yang menggambarkan kondisi standar hidup layak masyarakat yaitu Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun sebagai akibat pandemi COVID-19. Data menunjukkan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan tahun 2023 mencapai 11.888,00 Ribu Rupiah/Orang/Tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Balangan berada pada posisi 3 terendah setelah Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Balangan memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Kalimantan Selatan

3.1.5. Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal

Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dibenahi baik dari kualitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pelayanan publik. Kondisi saat ini menunjukkan berdasarkan indikator penyusunannya hal yang harus dioptimalkan diantaranya nilai SAKIP Pemerintah Balangan pada tahun 2023 yang masih berada di angka 70,17 dengan kategori BB yang didorong pada poin perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan juga masih belum optimal yaitu masih berada pada angka 70,01 di tahun 2023. Begitu pula dengan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan dimana pada tahun 2023 masih berada pada angka 85,07.

3.1.6. Perwujudan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama yang Harmonis dan Kondusif Belum Optimal

Mewujudkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif diukur dengan angka kemiskinan, angka konflik sosial bernuansa SARA, indeks ketentraman dan ketertiban umum, persentase pengembangan seni dan budaya, serta indeks desa membangun dengan dua tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dan meningkatnya nilai indeks desa membangun. Kondisi saat ini menunjukkan berdasarkan untuk tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif menunjukkan masih perlu kerja keras di

berbagai lini diantaranya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang berada pada angka 5,22 poin salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi Daerah yang masih rapuh dan ditopang pertumbuhan sehingga saat terjadi wabah pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan masih cukup tinggi.

Permasalahan lainnya yaitu menurunnya angka PPKS yang tertangani dari yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023, masihtingginya Indeks Resiko Bencana Banjir dimana pada tahun 2022 sebesar 26,35 atau risiko tinggi, dan Masih tingginya Resiko bencana tanah longsor atau tanah amblas di Kabupaten Balangan dengan skor Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor pada tahun 2022 sebesar 18,17 atau resiko tinggi. Selanjutnya untuk nilai indeks desa membangun dimana indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2023 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,7527 dengan kategori maju atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 hingga tahun 2021 yang masih status berkembang. Meskipun terjadi peningkatan tentu masih perlu lebih dioptimalkan lagi kedepannya agar indeks desa membangun semakin meningkat.

Tabel 3. 1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan	1) Rendahnya RLS. 2) Lambatnya Peningkatan HLS. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 89,28%. 4) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B 5) APK untuk jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menurun menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 102,18 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2023 sebesar 89,68 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 104,32. 6) Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/Paket C 7) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 90,96 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 91,16, APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. 8) Menurunnya Angka Melek Huruf, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 99,64. 9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 83,48%.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<p>10) Terjadi penurunan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 90,88% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 87,92%.</p> <p>11) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami penurunan, dari 115% pada tahun 2021 menjadi hanya 112,90% di tahun 2022.</p> <p>12) Menurunnya Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dari 1:12 pada tahun 2020 menjadi hanya 1:11 di tahun 2022.</p> <p>13) Menurunnya Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, dari 1:25 di tahun 2020 menjadi hanya 1:23 pada tahun 2022.</p> <p>14) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang TK/Paud dari 91,03% tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,3% di tahun 2022.</p> <p>15) Menurunnya Persentase Guru SD bersertifikat, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 95,84% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,55%. Serta Persentase Guru SMP bersertifikat, dimana pada tahun 2021 sebesar 97% menjadi 42,3% pada tahun 2022.</p> <p>16) Masih adanya angka putus sekolah. Beberapa kasus putus sekolah terjadi di Daerah terpencil disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap.</p> <p>17) Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.</p> <p>18) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun.</p> <p>19) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat.</p>
2.	Kesehatan	<p>1) Umur harapan hidup masih rendah. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 73,69 tahun, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana UHH pada tahun 2022 hanya sebesar 73,42 tahun, namun angka ini masih lebih rendah dibanding umur harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang mencapai 73,97 tahun.</p> <p>2) Angka kematian bayi cenderung mengalami peningkatan.</p> <p>3) Angka Kematian Bayi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 15,54 per 1.000 kelahiran hidup.</p> <p>4) Angka Kematian Ibu cenderung mengalami peningkatan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 207 per 100.000 KH</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<p>dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 147 per 100.000 KH.</p> <p>5) Tingginya prevalensi stunting berdasarkan EPPGBM. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan dari 26,7 pada tahun 2019 menjadi 14,61 di tahun 2023. Namun capaian pada tahun 2023 masih terbilang cukup tinggi.</p> <p>6) Tingginya TFR. TFR di Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 2.36%, sementara target nasional sebesar 2.1%</p> <p>7) Menurunnya Rasio dokter umum per 100.000 penduduk, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 29,7 dan pada tahun 2022 menurun menjadi hanya 27,5.</p> <p>8) Cenderung menurunnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi hanya 9,7.</p> <p>9) Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 37,3.</p> <p>10) Rasio Perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 241,1.</p> <p>11) Rasio sanitarian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4.</p> <p>12) Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4.</p> <p>13) Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 13,7.</p> <p>14) Cenderung menurunnya Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk yang semula 9,08 di tahun 2020 menjadi hanya 8,9 pada tahun 2021 dan 2022.</p> <p>15) Menurunnya Rasio Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk, yang semula 16,59 di tahun 2019 menjadi hanya 13,4 di tahun 2021 dan 2022.</p> <p>16) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan tidak optimal.</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<p>17) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya termasuk masih adanya desa yang belum memiliki bidan.</p> <p>18) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang.</p> <p>19) Kurangnya alat-alat kesehatan yang memenuhi standar di puskesmas dan jaringannya serta di RSUD.</p> <p>20) Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak (Balita).</p> <p>21) Masih rendahnya desa Stop Buang Air Besar Sembarangan berdasarkan aspek perilaku masyarakat.</p> <p>22) Masih rendahnya kualitas sumber air minum yang memenuhi syarat kualitas air minum.</p> <p>23) Masih ada puskesmas yang belum terakreditasi dan masih banyak puskesmas yang akreditasinya masih berstatus ketegori dasar.</p> <p>24) Akreditasi RSUD masih berstatus kategori dasar.</p> <p>25) Masih rendahnya BOR RSUD yaitu hanya sebesar 44,1%.</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1) Belum optimalnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2023 masih sebesar 50,47%. hal ini diakibat karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan.</p> <p>2) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu agregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik.</p> <p>3) Masih rendahnya persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik sebesar 33,28% pada tahun 2023.</p> <p>4) Masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilyah sungai kewenangan Daerah yang dibangun yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023.</p> <p>5) Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 95,45%.</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		6) Masih rendahnya Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir, dimana pada tahun 2023 baru mencapai 19,98%. 7) Masih rendahnya Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan. 8) Masih rendahnya persentase PBG yang diterbitkan sebesar 56% di tahun 2021 dan 2022.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni yaitu mencapai 2.012 unit di tahun 2023. 2) Belum optimalnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU, yaitu baru mencapai 86,90 persen di tahun 2022. 3) Masih rendahnya Masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni. 4) Tidak seimbang pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman dengan kelengkapan PSU. 5) Belum adanya sistem pengelolaan persampahan.
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	1) Belum optimalnya Tingkat Partisipasi politik Masyarakat yaitu masih sebesar 7,8% di tahun 2023. 2) Masih kurangnya Sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan bencana. 3) Masih rendahnya kesadaran akan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. 4) Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya Agama pertahanan dan keamanan. 5) Kurangnya kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi konflik sosial. 6) Belum Optimalnya pemahaman wawasan politik dimasyarakat dalam membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab. 7) Belum optimalnya sosialisasi dan simulasi pemilu dan pemilihan kepala Daerah dikalangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pemilihan kepala Daerah. 8) Belum sinkronnya data ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan ormas. 9) Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan Masyarakat.
6.	Sosial	1) Menurunnya Persentase PPKS yang tertangani yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023. 2) Belum tersedianya data progres manfaat. 3) Belum terpenuhinya kepemilikan database PPKS oleh pemerintah Daerah.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		4) Belum optimalnya jangkauan pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. 5) Belum tersedianya rumah singgah. 6) Belum optimalnya kebermanfaatan PSKS.
7.	Tenaga Kerja	1) Menurunnya Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang semula 2.331 orang di tahun 2021 menjadi hanya 2.137 orang pada tahun 2022. 2) Menurunnya Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar yang semula 1006 di tahun 2021 menjadi hanya 259 pada tahun 2022. 3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 2.989. 4) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 3,005 pada tahun 2018. 5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 592 pada tahun 2018. 6) Menurunnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat yang semula 160 di tahun 2021 menurun menjadi hanya 48 pada tahun 2022. 7) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 350 pada tahun 2019. 8) Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja. 9) Masih tingginya angka pengangguran. 10) Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 11) Kurangnya kesempatan kerja dari industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 12) Serapan Tenaga kerja di Sektor Tambang masih kalah dari sector lainnya padahal sector ini penyumbang tertinggi terhadap PDRB kabupaten Balangan. 13) Kurang optimalnya nya pelatihan-pelatihan yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja di sector Non Formal.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% di tahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2022. 2) Masih rendahnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yaitu hanya sebesar 16% pada tahun 2022. 3) Menurunnya Partisipasi angkatan kerja Perempuan yang semula 65,55% di tahun 2021 menjadi hanya 61,66% pada tahun 2022. 4) Masih adanya perkawinan usia anak. 5) Belum tersedianya tenaga konselor dalam penanganan kasus kekerasan di P3A Kab. Balangan. 6) Masih adanya kasus kekerasan anak. 7) Belum tersedianya tenaga konselor dan Psikolog Klinis. 8) Belum tersedianya tenaga Paralegal dan Advokat. 9) Masih kurangnya pemahaman mengenai Konsep Responsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).
9.	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya Ketersediaan Produksi untuk komoditi beras, Cabai Merah/Rawit, Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 2) Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian. 3) Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan-bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu. 4) Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian. 5) Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan.
10.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat yaitu baru mencapai 17% di tahun 2022. 2) Status tanah tidak bermasalah pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 48 pada tahun 2018. 3) Meningkatnya status tanah bermasalah yang semula 1 di tahun 2021 menjadi 3 pada tahun 2022. 4) Penatagunaan tanah pemerintah Daerah yang belum maksimal.
11.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 68,24. 2) Menurunnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi 50.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<p>4) Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 56,45.</p> <p>5) Menurunnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang semula 19 pada tahun 2020 dan 2021 menjadikannya 7 di tahun 2022.</p> <p>6) Masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, yaitu baru mencapai 22,04%.</p> <p>7) Menurunnya Persentase jumlah sampah yang tertangani yang semula 75,18% di tahun 2021 menjadi hanya 71,84% pada tahun 2022.</p> <p>8) Masih rendahnya tutupan lahan.</p> <p>9) Masih rendahnya kualitas air.</p> <p>10) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemilahan sampah.</p> <p>11) Belum optimalnya daur ulang sampah.</p> <p>12) Belum optimalnya pengurangan sampah.</p> <p>13) Belum optimalnya pengelolaan RTH.</p> <p>14) Belum optimalnya penggalian potensi – potensi PAD (Sampah, RTH, LAB).</p>
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1) Belum optimalnya Cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu hanya sebesar 60,41% di tahun 2022.</p> <p>2) IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 84,59.</p> <p>3) Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tahun bersangkutan.</p> <p>4) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD.</p> <p>5) SDM pelayanan belum terlatih dasar-dasar <i>service excellent</i> sehingga dalam memberikan pelayanan belum memenuhi standar pelayanan publik.</p> <p>6) Masih rendahnya tingkat pemahaman penduduk tentang tertib administrasi kependudukan.</p> <p>7) Masih kurangnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>8) Perangkat elektronik untuk pelayanan menggunakan SIAK serta perekaman dan pencetakan KTP-el memiliki umur ekonomis 5 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan minimal 5 tahun sekali.</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		9) Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya Persentase desa mandiri yaitu baru mencapai 14,29 di tahun 2023. 2) Menurunnya Persentase desa berkembang yang semula 81,82% di tahun 2021 menjadi hanya 18,18% pada tahun 2023. 3) Belum optimalnya penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa. 4) Rendahnya BUMDes kategori maju. 5) Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Desa terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa.
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya <i>Mooca Caboel Punk Rock</i> (MCPR) 2) <i>Mooca Caboel Punk Rock</i> (MCPR) sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 76,67 persen. 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan anak. 4) Pengaruh sosial budaya untuk menikahkan anak usia dini terutama di Daerah terpencil. 5) PUS usia kurang dari 20 tahun tidak menggunakan kontrasepsi.
15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana pada tahun 2023 mencapai 30 Laka dari yang semula hanya 21 Laka di tahun 2022. 2) Belum optimalnya Persentase desa yang dilayani angkutan umum yaitu baru mencapai 36,8% di tahun 2022 dan 2023. 3) Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 42,84%. 4) Menurunnya Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan yang semula 2.886 pada tahun 2021 menjadi hanya 1.475 di tahun 2022 dan tahun 2023. 5) Menurunnya PAD Sektor Perhubungan Darat. 6) Rendahnya pelayanan angkutan orang dalam kabupaten. 7) Kurangnya ketersediaan sarana angkutan umum. 8) Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. 9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kir. 10) Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal angkutan penumpang tipe c. 11) Belum optimalnya pengembangan titik-titik parkir sebagai potensi penyumbang PAD.
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Masih rendahnya nilai SPBE.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		2) Belum optimalnya Presentase SKPD yang menerapkan <i>E-Government</i> yaitu baru mencapai 56% di tahun 2023. 3) Menurunnya Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan dari 158% di tahun 2019 menjadi hanya 106,67% pada tahun 2022. 4) Belum maksimalnya jangkauan akses jaringan di Daerah blank spot. 5) Masih rendahnya penggunaan sistem informasi Daerah.
17.	Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	1) Belum optimal persentase koperasi berkualitas yaitu baru mencapai 18,04 persen di tahun 2023. 2) Menurunnya Jumlah Usaha Mikro, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 10.904 unit. 3) Jumlah UMKM pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 11.335 unit. 4) Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 62,96% pada tahun 2018. 5) Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 41,42 persen.
18.	Penanaman Modal	1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 111 pada tahun 2019. 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 1,651,394,241,459. 3) Menurunnya Jumlah Investor PMDN/PMA yang semula 78 di tahun 2021 menjadi hanya 50 pada tahun 2022. 4) Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 206,75:1 pada tahun 2019. 5) Belum optimalnya iklim investasi Daerah (Realisasi Investasi masih didominasi pada Sektor Pertambangan, sementara Sektor yang lebih banyak menyerap Tenaga Kerja seperti Pertanian Masih belum ada dari segi realisasi Investasi). 6) Masih sulitnya melakukan investasi berbasis peta potensi.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		7) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha.
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya Persentase kapasitas daya saing kepemudaan. 2) Belum optimalnya Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan. 3) Masih rendahnya Persentase wirausaha muda yaitu baru mencapai 15% di tahun 2022. 4) Menurunnya Persentase organisasi pemuda yang aktif. 5) Belum terpenuhinya fasilitas olahraga. 6) Belum adanya penataan Induk Organisasi Keolahragan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi olahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
20.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah yaitu hanya sebesar 26,67% di tahun 2022. 2) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral yang valid dan akurat serta terupdate sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan Pembangunan. 3) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai prinsipnya. 4) Belum terintegrasinya portal satu data balangan dengan satu data banua dan Satu data Indonesia. 5) Belum optimalnya pelaksanaan e-walidata.
21.	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih kurangnya pengamanan website pemda. 2) Kurangnya SDM/Tenaga IT Kemanan Informasi. 3) Belum terbentuknya CSIRT Pemkab. 4) Masih rendahnya Hasil Evaluasi Indeks Keamanan Informasi Nilai 184, Tidak Layak).
22.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Minimnya penyelenggaraan festival kesenian. 2) Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya. 3) Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan.
23.	Perpustakaan	1) Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu baru mencapai 49,47 persen di tahun 2022.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 40,96. 3) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27.334. 4) Tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. 5) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti perpustakaan desa yang masih minim. 6) Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling. 7) Letak perpustakaan Daerah kabupaten tidak strategis karena tidak berada diwilayah perkotaan.
24.	Kearsipan	1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 80,44%. 2) Menurunnya Indeks Kearsipan 3) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. 4) Belum optimal memahami tentang kearsipan yang sesuai dengan standar. 5) Belum optimalnya SDM kearsipan sebagai arsiparis yang bersertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun disetiap OPD. 6) Minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip Daerah yang sesuai standar ANRI.
25.	Perikanan	1) Menurunnya Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau untuk komoditas ikan Nila, Patin Siam, dan Baung. 2) Belum optimalnya pertumbuhan PDB Perikanan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan. 4) Belum optimalnya industri pengolahan perikanan. 5) Belum optimalnya pengawasan Kawasan Perikanan Lestari. 6) Kurangnya minat Masyarakat terhadap perikanan tangkap. 7) Belum adanya pengembangan potensi ikan lokal.
26.	Pariwisata	1) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana objek wisata. 2) Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke objek – objek wisata. 3) Masih rendahnya ketersediaan akomodasi yang representatif (penginapan dan rumah makan). 4) Belum optimal nya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang semula 11,97% di tahun 2021 menjadi hanya 7,54% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Nilai Tukar Petani yang semula 110,87 di tahun 2021 menjadi hanya 107,37 pada tahun 2022. 3) Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan untuk jenis tanaman pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 4) Terjadi penurunan Produksi Tanaman Pangan untuk Jenis Tanaman Pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 5) Menurunnya Luas Panen Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Bayam, Buncis, Cabai Besar, Jamur, Kacang Panjang, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, Petai/Sawi, Terong dan Tomat. 6) Menurunnya Produksi Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, dan Petai/Sawi. 7) Menurunnya Produktivitas Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Terong dan Tomat. 8) Menurunnya Hewan Ternak untuk jenis Sapi, Kerbau dan Kambing. 9) Produksi Daging Ternak Sapi dan Kambing mengalami penurunan. 10) Populasi Unggas untuk jenis ayam buras dan 11) ayamraspedagingmengalamipenurunan. 12) Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Itik mengalami penurunan. 13) Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis tanaman Kopi dan Lada. 14) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 15) Belum optimalnyasarana dan prasaranapertanian. 16) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi,pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani. 17) Belum optimalnyapengendalian OPT. 18) Belum optimalnyakelembagaanpetani. 19) Belum optimalnya fungsi irigasi. 20) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan (utama) jagung hibrida, kopi lokal, padi gunung. 21) Mahalnya harga pakan. 22) Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
28.	Perdagangan	1) Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang baru mencapai 9,84% di tahun 2022. 2) Meningkatnya temuan barang tidak layak edar yang semula 82 buah di tahun 2021 menjadi 88 buah pada tahun 2022.
29.	Perindustrian	1) Menurunnya Pertumbuhan Industri yang semula 9,4% di tahun 2019 menjadi hanya 1,36% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB yang semula 1,98% di tahun 2020 menurun menjadi 1,29% pada tahun 2022. 3) Masih rendahnya Persentasi IKM yang Menerapkan Teknologi Industri yaitu baru mencapai 10,00% di tahun 2022. 4) Masih rendahnya Persentase produk industri yang bersertifikat halal yaitu baru mencapai 9,14% di tahun 2022.
30.	Transmigrasi	1) Masih rendahnya Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi yaitu baru mencapai 18,84% di tahun 2023. 2) Masih minim nya kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.
31.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	1) Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi yaitu baru mencapai 70,01 di tahun 2023. 2) Belum optimalnya nilai SAKIP yaitu baru mencapai 70,17 dengan kategori BB di tahun 2023, karena berdasarkan Permen PANRB NO. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Standarisasi bobot nilai nya dari 61 -70 itu masih di katakan rendah. 3) Belum optimalnya Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan yaitu baru mencapai 85,07 di tahun 2023.
32.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Persentase SILPA pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 21,40%. 2) Menurunnya Persentase belanja pendidikan yang semula 20,73% di tahun 2021 menjadi 20,34% pada tahun 2022. 3) Persentase belanja kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 20,87%. 4) IPKD Kabupaten Balangan masih kategori “sangat perlu perbaikan” sebab berbagai dimensi masih menunjukkan kekurangan.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		5) Menurunnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang semula 47,77% di tahun 2019 menjadi hanya 35,08% pada tahun 2022. 6) Menurunnya Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari 2.005 orang di tahun 2021 menjadi 7) hanya 1.993 orang pada tahun 2022.
33.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	1) Belum seluruhnya temuan ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan tindak lanjut temuan, namun capaian 92% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 bahkan menurun menjadi hanya 91%.

Sumber: hasil analisis, 2023

3.2. Peluang

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi Daerah. Percepatan ekonomi Daerah berbasis Riset dan Inovasi idealnya menjadi fokus utama bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kurangnya pendanaan, kekurangan keterampilan, dan tantangan dalam keberlanjutan dan adopsi Inovasi. Meskipun tantangan ini hadir, terdapat juga peluang- peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya

3.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih menjadi peluang penting untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi berbasis Riset dan Inovasi. Hal ini merupakan potensi atau keunggulan yang dapat dijadikan landasan untuk mendorong sektor ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing Daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Riset yang fokus pada pengembangan potensi Daerah, seperti produk unggulan lokal atau pariwisata, dapat meningkatkan ekonomi Daerah. Inovasi dalam pengolahan produk pertanian, perikanan, atau budaya lokal juga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar global.

Inovasi sosial yang didasarkan pada Riset dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan akses kesehatan. Dengan solusi inovatif, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Riset di bidang inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Inovasi dalam menciptakan kebijakan dan program yang memberdayakan kelompok minoritas, perempuan, atau penyandang disabilitas akan memperluas basis talenta SDM dan mengurangi kesenjangan sosial di tempat kerja.

Inovasi dalam komunikasi digital memungkinkan kolaborasi lintas negara lebih mudah. Ini membuka peluang bagi SDM untuk belajar dan bekerja dalam proyek global, mengakses pengetahuan dan pengalaman dari berbagai latar belakang, serta meningkatkan daya saing di pasar kerja internasional. Dengan memanfaatkan Riset dan Inovasi secara

strategis, pengembangan SDM di masa depan akan lebih dinamis, adaptif, dan relevan terhadap perubahan kebutuhan industri dan teknologi, memungkinkan pekerja menjadi lebih kompeten dan berdaya saing tinggi.

3.2.2. Alternatif Pendanaan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan Inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan.

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan Inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integritas ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan

3.2.3. Kemitraan dan Kolaborasi

Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem Inovasi dan pembangunan di suatu wilayah. Ketiganya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Inovasi melalui kebijakan yang mendukung Riset, seperti pemberian insentif pajak untuk R&D, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyederhanaan perizinan. Dari segi pendanaan. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk Riset dan Inovasi melalui program hibah, pendanaan proyek penelitian, atau investasi infrastruktur penelitian. Pendanaan ini dapat mempercepat Inovasi, khususnya di sektor-sektor yang tidak banyak menarik investasi swasta.

Kolaborasi dengan dilakukan dengan sektor swasta yang berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengarahkan Riset agar selaras dengan permintaan

pasar yang nyata. Kolaborasi dengan peneliti dapat membantu perusahaan menciptakan produk yang lebih kompetitif. Sektor swasta memiliki kemampuan untuk membawa teknologi hasil Riset ke pasar melalui produksi massal dan komersialisasi. Dengan jaringan bisnis yang lebih luas, perusahaan dapat mempercepat penerapan Inovasi dalam kehidupan nyata.

Selain itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan Lembaga penelitian dan akademisi memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi inovatif. Mereka berfokus pada Riset dasar maupun Riset terapan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor. Melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga penelitian dapat mempercepat transfer teknologi dari laboratorium ke dunia nyata. Ini melibatkan proses seperti pendaftaran paten, pengembangan produk, hingga uji coba lapangan.

Dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal, maka ditetapkan isu-isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan untuk 20 tahun kedepan. Isu tersebut merupakan hal-hal yang penting, berdaya ungkit dan sangat berdampak bagi pembangunan Kabupaten Balangan. Isu strategis RPJPD Kabupaten Balangan meliputi:

- 1) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- 3) Peningkatan ketahanan sosial dan budaya untuk mendukung pembangunan yang merata
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perdesaan
- 6) Pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial
- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan

3.2.4. Pendekatan Lintas Sektor

Dalam era digital, pendekatan lintas sektor memungkinkan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Inovasi Daerah. Rakor Lintas Program/Lintas Sektor (RLP/RLS) adalah kegiatan rapat koordinasi antara berbagai program atau sektor yang terkait dalam suatu organisasi atau pemerintahan, untuk memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor tersebut guna mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks yang bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor terkait dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar atau kompleks. Sektor swasta yang bergerak dalam teknologi informasi dapat bekerja sama dengan pemerintah Daerah untuk mengembangkan solusi berbasis data, seperti sistem tata kelola kota pintar (smart city), layanan kesehatan digital, atau manajemen transportasi berbasis AI.

Pendekatan lintas sektor dalam Riset dan Inovasi Daerah mengacu pada kolaborasi berbagai sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk mengembangkan solusi inovatif bagi tantangan Daerah. Pendekatan ini menawarkan banyak peluang, termasuk sinergi antara pemerintah dan akademisi dimana pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memanfaatkan Riset akademik guna menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Kolaborasi ini bisa menghasilkan Inovasi dalam tata kelola publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Kolaborasi lintas sektor juga dapat membuka peluang pembiayaan untuk Inovasi yang berbasis Riset. Misalnya, sektor swasta dapat bermitra dengan lembaga keuangan dan pemerintah Daerah untuk mendanai proyek-proyek Inovasi yang berbasis Riset, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi kesehatan, atau pengelolaan limbah. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau hasil laut dapat menggunakan pendekatan lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Riset yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan ahli lingkungan dapat menciptakan Inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang menjaga kelestarian alam sambil meningkatkan nilai ekonomi.

Melalui Riset lintas sektor yang melibatkan akademisi, perusahaan, dan pemerintah, Daerah dapat mengembangkan pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Inovasi yang melibatkan Riset dalam energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan secara lingkungan. Pendekatan lintas sektor dapat mendorong terciptanya program-program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kerja sama antara perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah Daerah dapat menciptakan kurikulum yang disesuaikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap dan terampil di bidang yang dibutuhkan, seperti teknologi, manufaktur, dan pertanian modern.

3.2.5. Regulasi

Regulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Kabupaten Balangan dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti hasil tambang dan pertanian. Pemerintah Daerah dapat merumuskan regulasi yang mendorong Inovasi berbasis sumber daya alam ini, seperti insentif bagi perusahaan atau lembaga Riset yang mengembangkan teknologi untuk pengelolaan tambang yang lebih ramah lingkungan atau pengolahan produk pertanian menjadi komoditas bernilai tambah. Peluang regulasi yang diharapkan bermanfaat adalah pemberian insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berInovasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pengaturan zonasi tambang dan pertanian yang mendukung pengembangan teknologi hijau.

Pentingnya Regulasi Daerah adalah faktor kunci dalam pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan efisien. Regulasi Daerah berperan sebagai landasan hukum dan kebijakan yang mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perlindungan kekayaan intelektual juga sangat penting dalam menciptakan kondisi ekologi lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, pemerintah Daerah memberikan insentif dan perlindungan kepada inventor untuk melanjutkan Riset dan pengembangan serta mengkomersialisasikan hasil Inovasi mereka tanpa takut dicuri atau disalahgunakan. Perlindungan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum yang memungkinkan para

inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Inovasi yang dihasilkan, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Regulasi Riset dan Inovasi juga dapat mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk penelitian, dan kerangka kerja yang memfasilitasi transfer teknologi dari dunia akademik ke sektor industri. Regulasi yang cepat dan tepat dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik, serta mempercepat adopsi Inovasi di dunia industry.

Dengan memanfaatkan peluang yang tersebut, pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi hingga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan kebijakan yang tepat, termasuk insentif fiskal dan perlindungan kekayaan intelektual, Daerah dapat mendorong Inovasi, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri. Penting bagi pemerintah Daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang progresif dan sesuai dengan konteks Daerah mereka, sehingga menciptakan ekosistem Riset dan Inovasi yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kebijakan yang ada dengan kondisi aktual di lapangan terkait Riset dan Inovasi di tingkat Daerah. Analisis ini penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta relevan dengan kebutuhan ekosistem Riset dan Inovasi setempat.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang

merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi. Di dalam implementasinya, diatur pula pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang berada pada level pemerintah provinsi/kota atau kabupaten. Pembentukan badan Riset pada tingkat pemerintah provinsi/kota atau kabupaten diharapkan dapat menjawab tantangan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan Inovasi nasional agar menjadi semakin kompleks dan dinamis serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara pada era digital seperti sekarang.

Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah bisa disebut sebagai keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah tercantum dalam Pasal 1 dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah berisi ketentuan umum yang memberikan definisi dan pengertian dasar dalam peraturan tersebut. Ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan sepanjang peraturan untuk memastikan konsistensi dan pemahaman yang jelas. Beberapa istilah yang didefinisikan mencakup a) Riset dan Inovasi: Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mengembangkan penerapan teknologi, metode, dan/atau produk baru. b) Daerah: Wilayah administratif yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. c) Tata Kelola Riset dan Inovasi: Sistem yang mengatur pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah Daerah, lembaga Riset, dan masyarakat.

Pada dasarnya, ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya Riset dan Inovasi di Daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan pemantapan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Dengan terciptanya ekosistem Riset dan Inovasi yang mumpuni di Daerah, Pemerintah berekspektasi adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis Riset dan Inovasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan Daerah dapat diakselerasi melalui Riset dan Inovasi terutama dalam implementasi Inovasi teknologi. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah Daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini.

4.1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada peraturan, strategi, dan rencana yang disusun oleh pemerintah Daerah untuk mendorong, mengarahkan, dan mendukung kegiatan penelitian serta Inovasi di wilayahnya. Kebijakan ini biasanya mencakup prioritas Riset sesuai potensi lokal, dukungan pendanaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah sarana fisik, teknologi, dan sumber daya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Ini meliputi fasilitas laboratorium, pusat teknologi, akses ke jaringan internet yang kuat, serta keberadaan pusat inkubasi bisnis untuk mengembangkan Inovasi lokal. Secara keseluruhan, kebijakan dan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Riset dan Inovasi di Daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. Bappedalitbang sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi.

Tabel 4. 1. Analisis Kesenjangan Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Tersedia peraturan Daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset dan Inovasi Daerah	Terlaksana sebagian
		Tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya roadmap SIDA terbaru
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersedia basis data Riset dan Inovasi yang terbuka dan mudah di akses	Tersedia namun masih terbatas bagi internal
3	Pengembangan infrastruktur	Tersedia infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian	Tersedia sebagian
4	Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual	Tersedia laboratorium dan atau inkubator penelitian	Tersedia sebagian
5	Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah	Tersedia dan transparansi anggaran Riset dan Inovasi	Tersedia

Kolaborasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan telah terlaksana dengan catatan pengawasan dan perbaikan yang akan dievaluasi tiap tahunnya dengan semua pihak yang berkolaborasi. Pada kolaborasi kajian, perangkat Daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem Riset dan Inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.

4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah

Kapasitas Kelembagaan dalam konteks Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada kemampuan dan kesiapan lembaga-lembaga di Daerah (seperti pemerintah Daerah, perguruan tinggi, pusat penelitian, serta organisasi swasta) untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi. Ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan internal, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan mengelola proyek-proyek Riset.

Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada seberapa baik Daerah tersebut mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi Riset dan Inovasi. Ini mencakup dukungan infrastruktur (seperti fasilitas Riset, teknologi, dan akses informasi), pendanaan yang memadai, serta kerangka kebijakan yang mendorong Inovasi dan kolaborasi antar lembaga. Secara sederhana, kapasitas kelembagaan berfokus pada kemampuan internal lembaga-lembaga untuk mengelola Riset dan Inovasi, sementara daya dukung lebih menekankan pada faktor eksternal di Daerah yang mendukung atau menghambat perkembangan Riset dan Inovasi. Keduanya penting untuk menciptakan ekosistem Riset yang produktif dan berkelanjutan di tingkat Daerah.

Tabel 4. 2. Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan berbagai sektor	Terlaksana dengan catatan perbaikan dan evaluasi
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersedianya basis data Riset dan Inovasi yang dapat dikases semua orang	Tersedia dengan pengawasan sesuai kapasitas pemerintah Daerah
		Tersedianya sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi.	Tersedia dengan catatan pengawasan pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi.
3	Penyediaan sarana pendukung Riset	Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian	Tersedia sebagian

4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah adalah kerjasama antara berbagai pihak di tingkat Daerah, seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas, untuk mendukung dan mengembangkan Riset serta Inovasi. Kemitraan ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian guna menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. BAPPERIDA sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan

harmonis, yaitu kemitraan antarlembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi.

Tabel 4. 3. Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan	Terselenggara kerjasama antara lembaga Riset Daerah, OPD terkait, dan lembaga Riset profesional lainnya	Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan OPD terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil Riset dan Inovasi
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terpublikasi hasil Riset dan Inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum	Terimplementasi sebagian
		Terimplementasi kebijakan publik berbasis hasil Riset dan Inovasi	Terimplementasi sebagian
3	Penyediaan sarana pendukung Riset	Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian	Tersedia sebagian

4.4. Budaya Riset dan Inovasi Di Daerah

Budaya Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang mendukung serta mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ide-ide baru di suatu wilayah. Budaya ini mencakup keterbukaan terhadap perubahan, kreativitas, kolaborasi lintas sektor, serta dorongan untuk menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan Riset dan Inovasi di Daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah terus berlansung dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya Riset dan Inovasi di Daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye Inovasi, apresiasi prestasi Inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat. Secara keseluruhan, budaya ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 4. Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Promosi dan kampanye	Pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum	Terselenggara melalui kegiatan pameran Inovasi, lomba dan seminar hasil Riset dan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
			Inovasi
2	Apresiasi prestasi Inovasi	Penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah	Pemberian hadiah dan penghargaan
3	Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat	Inventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi	Terinventarisasi dengan baik
4	Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi	Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate	Terlaksana sebagian dengan evaluasi

4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi secara harmonis di tingkat Daerah. Ini mencakup kolaborasi yang sinergis antara pemerintah Daerah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, serta memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi.

Riset dan Inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di Daerah. Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah telah selaras dengan kondisi di Daerah. Sumber daya berupa infrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan Daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem Riset dan Inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di Daerah.

Tabel 4. 5. Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan	Pengembangan Riset yang terpadu dan terupdate Bantuan promosi produk unggulan Daerah	Terlaksana, dengan penyempurnaan data produk unggulan Terealisasi di kegiatan
2	Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah	Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan Terselenggara kegiatan Riset dan Inovasi berbasis produk	Terlaksana dengan kebutuhan update rutin

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
		unggulan Daerah	
3	Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah	Penyelarasan arahan dan kebijakan agar terlaksana dengan optimal	Terlaksana

4.6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Riset Inovasi terhadap Perkembangan merujuk pada kontribusi penelitian dan pengembangan ide-ide baru (Inovasi) dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Riset Inovasi berperan penting dalam menciptakan solusi baru yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Penyelarasan IPTEK dan Riset Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan Riset Inovasi di Daerah sejalan dengan tren dan kemajuan global. Ini bertujuan agar Daerah tidak tertinggal dan mampu bersaing secara internasional. Manfaat penyelarasan ini meliputi akses terhadap teknologi baru dan praktik terbaik dari luar negeri, peningkatan daya saing Daerah di pasar global, penerapan solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah lokal dan global, memperkuat kolaborasi internasional yang dapat mempercepat pengembangan Riset dan Inovasi lokal.

Pada bagian akhir ini, ekosistem Riset dan Inovasi Daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di Daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir Riset dan Inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode Riset dan Inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di Daerah.

Tabel 4. 6. Analisis Kesenjangan Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Publikasi informasi hasil Riset dan Inovasi Daerah terhadap publik global	Terinformasinya publik global terhadap temuan Riset dan Inovasi yang ada di Daerah	Terlaksana sebagian dengan publikasi yang perlu digencarkan kembali
2	Kepedulian terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah	Persiapan dan kesiapsiagaan Daerah terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah	Terlaksana dengan kerjasama pihak pendukung
3	Penguatan kerjasama global	Kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan publik global	Belum terealisasi

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi Riset dan Inovasi di Daerah adalah serangkaian rencana dan langkah yang dirancang untuk memperkuat dan mengarahkan upaya penelitian serta pengembangan Inovasi di tingkat lokal. Strategi ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah Daerah, lembaga Riset, universitas, dan industri dalam mengoptimalkan potensi Daerah dan meningkatkan daya saing regional. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan serta Inovasi yang dapat diterapkan dalam sektor-sektor unggulan di Daerah.

Salah satu fokus utama dalam strategi ini adalah pengembangan infrastruktur Riset yang memadai, seperti laboratorium penelitian, pusat Inovasi, dan fasilitas inkubator bisnis. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Riset yang lebih produktif dan inovatif, memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen dan uji coba teknologi dengan dukungan fasilitas yang lengkap. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform daring juga menjadi bagian integral dalam memperluas jangkauan Riset dan Inovasi, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi antara para peneliti dan inovator.

5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Kapasitas dan Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan Daerah dalam merancang kebijakan dan membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Daerah. Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan didukung oleh kerjasama yang baik antar sektor. Keberhasilan Riset dan Inovasi tidak hanya tergantung pada satu pihak, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah, seperti pemerintah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi ini harus difasilitasi melalui kebijakan yang mendukung serta wadah komunikasi yang terstruktur.

Strategi pengembangan kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penelitian dan Inovasi yang mendukung pembangunan lokal. Strategi ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan ekosistem Inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah. Pemerintah Daerah yang merancang kebijakan yang mendukung pengembangan Riset dan Inovasi secara berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup regulasi, insentif, dan tata kelola yang mempermudah pelaksanaan Riset serta Inovasi.

Tabel 5. 1. Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	KONDISI RIIL
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Belum tersosialisasinya rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru	Sosialisasi rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru kepada para pemangku kebijakan di Daerah
		Pengawasan Riset dan Inovasi di Daerah yang jelas dan tegas	Penyusunan tim khusus yang mengawasi dan

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	KONDISI RIIL
			membantu proses Riset dan Inovasi
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Keterbatasan akses hasil Riset dan Inovasi di Daerah karena permasalahan publikasi	Koordinasi dengan pihak terkait agar hasil Riset dan Inovasi dapat dan mudah diakses terbuka
3	Pengembangan infrastruktur	Belum meratanya infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian	Koordinasi antar lini untuk mempermudah penyediaan infrastruktur
4	Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual	Belum meratanya laboratorium dan atau inkubator penelitian	Koordinasi dengan pihak swasta untuk membantu pemerataan
5	Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah	Belum meratanya sosialisasi dan keterbukaan anggaran Riset dan Inovasi	Anggaran akan dibuka dan dipertanggungjawabkan ke publik secara rutin dan detail

5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan institusi lokal (seperti pemerintah Daerah, universitas, dan lembaga penelitian) dalam menjalankan, mendukung, dan mengelola kegiatan Riset dan Inovasi. Strategi ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, serta pendanaan yang mendukung Riset dan Inovasi di Daerah.

Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara Riset dan Inovasi yaitu BAPPERIDA dengan perangkat Daerah di Kabupaten Balangan. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada keterlibatan dalam Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (*blended researcher*) bahwa perangkat Daerah dimasukkan dalam setiap proses Riset dan Inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas Riset dan Inovasi yang lebih implementatif. Selain itu, peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan evaluasi dan pengukuran hasil Riset yang telah terimplementasi dan yang belum. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan perbaikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Balangan kedepan.

Tabel 5. 2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Penguatan kolaborasi Riset	Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan	Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku

NO	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
	dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan	berbagai sektor	kepentingan Riset dan Inovasi Peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat Daerah Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil Riset dan Inovasi di Daerah Pengadaan pelatihan metode Riset bagi perangkat Daerah
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Kendala keterbukaan akses Riset dan Inovasi Kesulitan mendapatkan mitra dan sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi.	Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi Bekerjasama dengan pihak swasta
3	Penyediaan sarana pendukung Riset	Inkubator penelitian yang belum optimal	Studi banding dengan pemerintah Daerah lain yang berhasil membangun inkubator penelitian

5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Riset dan Inovasi memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Maka, BRIN memberikan keleluasaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi melalui berbagai institusi Riset baik swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang disinergikan oleh BRIDA. Kabupaten Balangan telah melakukan kemitraan dengan berbagai pihak antara lain lembaga Riset swasta, perguruan tinggi, perangkat Daerah, dan masyarakat. Intensitas kemitraan yang perlu ditingkatkan adalah dengan perguruan tinggi terutama pada mekanisme kerjasama pendanaan eksternal seperti Matching Fund Kemendikbud dan Kedaireka. Sedangkan, kemitraan juga perlu dikuatkan pada implementasi hasil Riset dan Inovasi dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat hasil Riset dan Inovasi Daerah. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan harus lebih banyak lagi yang dilandaskan pada hasil Riset dan Inovasi.

Tabel 5. 3. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Promosi dan kampanye	Terselenggara pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum	Perluasan dan penguatan promosi melalui media cetak maupun online dan pameran
2	Apresiasi prestasi Inovasi	Terselenggaran penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau	Pemberian hadiah dan penghargaan yang lebih variatif agar

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
		menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah	semakin menarik
3	Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat	Terinventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi	Publikasi ierinventarisasi dengan mudah
4	Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi	Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate	Penguatan kerjasama di tingkat sekolah

5.4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah

Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya koordinasi, sinergi, dan integrasi antara berbagai pelaku Riset dan Inovasi di Daerah, seperti pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan ekosistem yang saling mendukung sehingga Riset dan Inovasi di Daerah dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal. Sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah agar berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah Daerah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat, sehingga hasil Riset dan Inovasi dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan Daerah.

Tabel 5. 4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan	Keselarasan Riset yang belum terupdate	Penyelarasan tema dan arah Riset dan Inovasi
		Belum mudahnya promosi produk unggulan Daerah	
2	Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah	Peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan yang belum terbaru	Penyelarasan dengan pihak terkait
3	Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah	Kebijakan belum optimal	Koordinasi antar lini

5.5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Dengan Perkembangan Global

Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah mengikuti tren dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi global. Tujuannya adalah agar Daerah dapat beradaptasi dan tetap kompetitif di tingkat internasional. Fungsi strategi penyelarasan adalah meningkatkan daya saing Daerah dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaik

dari dunia internasional, mempercepat Inovasi lokal melalui penerapan tren global dalam Riset dan pengembangan, mendorong kolaborasi internasional yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan ke Daerah, dan mengatasi masalah lokal dengan solusi inovatif yang relevan secara global. Dengan penyelarasan ini, Daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan keunggulan lokal.

Tabel 5. 5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan Perkembangan Global

NO	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Peningkatan kepekaan publik terhadap isu global	Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah	Menginfiltrasikan literatur, teori, konsep, dan Inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan
2	Penggalakan publikasi Riset dan Inovasi Daerah ke publik global	Fasilitas dan koneksi publikasi yang belum luas	Pengiriman delegasi untuk bekerjasama dengan instansi pendidikan

5.6. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat kegiatan Riset serta Inovasi di suatu Daerah. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan telah dianalisis sebagaimana penjelasan diatas. Dari 6 elemen ekosistem Riset dan Inovasi yang dianalisis, terdapat banyak strategi penguatan ekosistem Riset dan Inovasi. Sebagai langkah efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran, maka prioritas strategi pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Strategi prioritas ini akan menjadi peta jalan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan. Strategi prioritas penguatan dan pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah ini bertujuan untuk mendukung program kegiatan Riset dan Inovasi sehingga dapat terwujud perencanaan dan kebijakan berbasis bukti dan ilmiah.

Strategi prioritas pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi ini juga mengemukakan adanya target pelaksanaan tahunan sehingga dapat menjadi langkah strategis BAPPERIDA Kabupaten Balangan dalam melakukan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Selain itu, indikator kinerja dan perangkat Daerah terkait juga dikemukakan dalam rangka menciptakan sinergi antar perangkat Daerah dalam mendukung strategi penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi. Termasuk, target dan indikator sasaran secara eksplisit agar evaluasi dan upaya pencapaiannya dapat diukur dengan pasti dan optimal dalam implementasi.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah adalah suatu dokumen strategis yang merinci langkah-langkah, prioritas, dan rencana tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan Riset dan Inovasi di suatu Daerah, dalam hal ini Kabupaten Balangan. Peta jalan ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan sumber daya dan fokus pada area-area yang dianggap krusial untuk pengembangan Riset dan Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

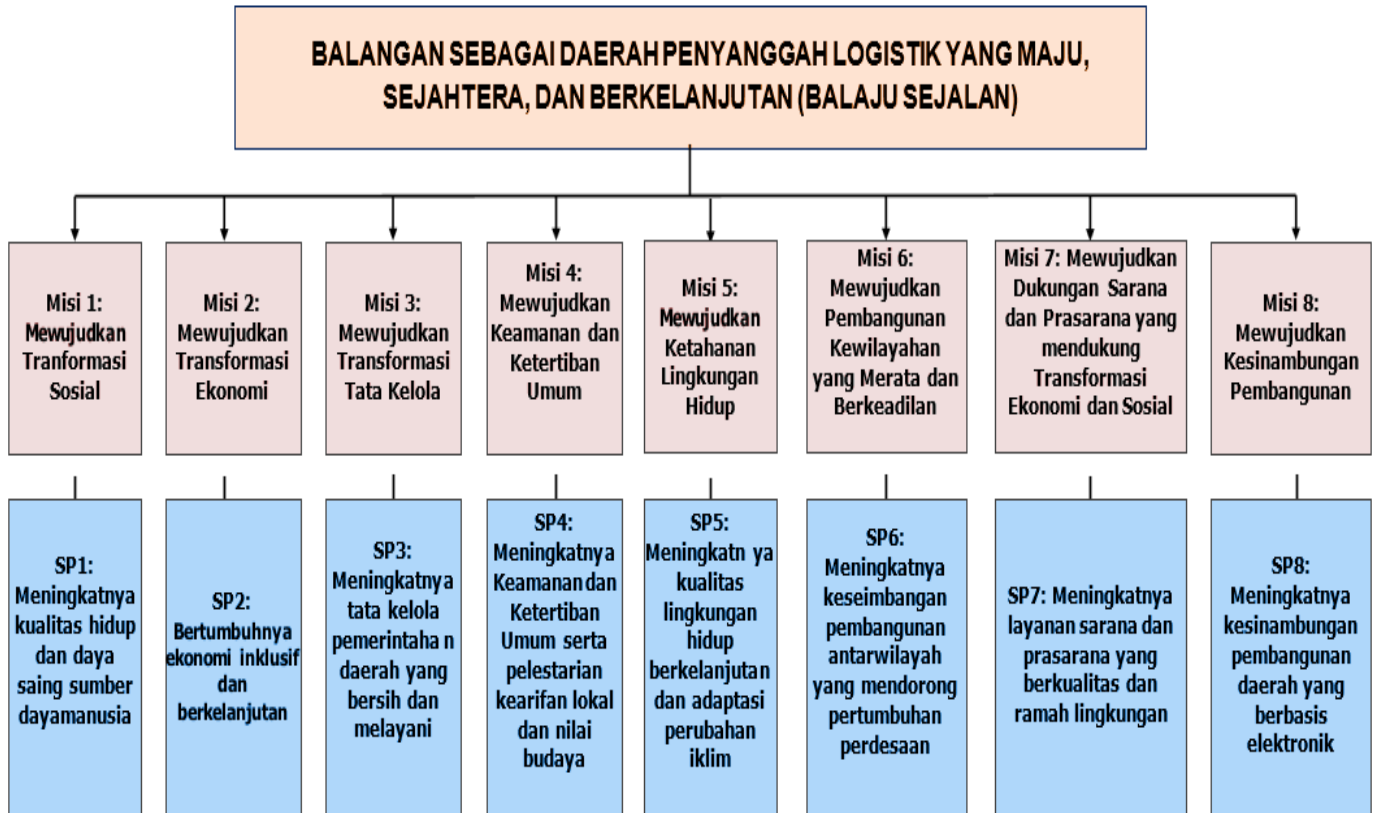
Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Riset dan Inovasi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Peraturan tersebut menugaskan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu didukung oleh Riset dan Inovasi. Kehadiran Riset dan Inovasi memberikan kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perwujudan peningkatan perekonomian serta mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di tingkat Daerah.

Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi, Mengatasi Kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan, dapat menekan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan, dll.

6.1. Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan

Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan dijabarkan kedalam sasaran pokok yang spesifik dan terukur. Keterkaitan antara 8 (delapan) misi dengan sasaran pokok RPJPD disajikan pada Gambar 6.2. Sasaran pokok merupakan proses berkesinambungan yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode. Sasaran pokok tersebut akan menjadi sasaran RPJMD periode berkenaan selama 4 periode/tahapan RPJPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok RPJPD sangat ditentukan oleh RPJMD dan pencapaian RPJMD setiap periode pemerintahan Daerah.

Indikator utama pembangunan (IUP) adalah serangkaian parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan pada periode tahun 2025 sampai 2045. Indikator tersebut merupakan hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Kalimantan. Adapun sasaran pokok, indikator utama pembangunan dan target baseline tahun 2025 dan target 2045 serta arah pembangunan yang selaras dengan RPJPN dan RPJPD provinsi dimuat pada gambar berikut.



Gambar 6. 1. Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selain itu, berikut ini adalah empat kemungkinan Program Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan yang dapat mendukung pengembangan Daerah:

- 1) Program Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi: Fokus pada Riset dan pengembangan teknologi di bidang pertanian yang sesuai dengan potensi lokal, seperti peningkatan hasil panen, pengelolaan air, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Balangan.
- 2) Program Pengembangan UMKM Inovatif: Mendukung Riset dan Inovasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penerapan teknologi digital, pemasaran online, serta pengolahan produk lokal yang bernilai tambah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui Inovasi bisnis.
- 3) Program Riset Lingkungan dan Energi Terbarukan: Fokus pada Riset untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan (surya, air, atau biomassa) serta perlindungan dan rehabilitasi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam di Balangan.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Riset Inovatif: Menyediakan pelatihan bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat tentang Riset dan Inovasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan keterampilan Riset, kreativitas, dan kemampuan untuk mengembangkan solusi lokal yang inovatif, termasuk di bidang teknologi dan sosial.

Program-program ini bertujuan untuk memajukan Kabupaten Balangan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

BAB VII PENUTUP

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kabupaten Balangan merupakan tonggak strategis yang dirancang untuk mendorong pembangunan berbasis Riset dan Inovasi. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) guna memastikan seluruh kebijakan pembangunan selaras dengan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan nasional. Sebagai kabupaten yang strategis di Kalimantan Selatan dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balangan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Riset dan Inovasi sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Balangan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, terutama tambang. Oleh karena itu, dokumen ini memberikan arah strategis untuk mengatasi kendala tersebut melalui penguatan Riset dan Inovasi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, Kabupaten Balangan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk unggulan Daerah, seperti padi, jagung, karet, ayam, dan ikan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan produk berbasis budaya lokal, seperti fesyen, kuliner, dan kriya, diintegrasikan dengan sektor pariwisata untuk memperkuat ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama dalam dokumen ini. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas teknis, pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Program pendidikan vokasi berbasis Riset dan teknologi akan menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor unggulan.

Penguatan infrastruktur Riset juga menjadi elemen penting dalam dokumen ini. Penyediaan fasilitas seperti laboratorium, pusat penelitian, dan akses teknologi digital akan mendukung kegiatan Riset dan Inovasi secara efektif. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung Riset tetapi juga sebagai katalis dalam memperkuat daya saing Kabupaten Balangan di tingkat regional dan nasional. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan utama dalam pelaksanaan rencana ini. Dengan melibatkan pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, dokumen ini menekankan pendekatan pentahelix untuk menciptakan ekosistem Inovasi yang inklusif. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam dokumen ini. Dengan pendekatan ekonomi hijau, Kabupaten Balangan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dokumen ini juga menjadi panduan dalam mendukung peran Kabupaten Balangan sebagai penyangga IKN. Melalui konektivitas yang baik dan integrasi kawasan strategis, Kabupaten Balangan dapat mengambil manfaat maksimal dari pengembangan IKN. Hal ini mencakup peningkatan investasi, penguatan sektor logistik, dan pengembangan sektor unggulan yang mendukung kebutuhan pasar IKN. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Balangan juga dirancang untuk menjawab kebutuhan masa depan, termasuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Dengan fokus pada Inovasi, Balangan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun global. Dokumen ini menjadi pemandu dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada masa depan.

Sebagai penutup, dokumen ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Balangan untuk memanfaatkan Riset dan Inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, dukungan semua pemangku kepentingan, dan kolaborasi lintas sektor yang solid, Kabupaten Balangan siap menjadi Daerah yang inovatif, maju, dan berdaya saing tinggi di era global.

Salinan sesuai dengan aslinya

